

MOESLIM CHOICE

HARGA RP. 125.000,-



BERTAHAN
DI POSISI KE-3
EKONOMI
ISLAM GLOBAL

RAWAN
KORUPSI
DI RANAH
PENDIDIKAN

SOLUSI
BERAS
OPLOSAN

SUMSEL
PUNYA RETRET
PANDU SATRIA

LAYANAN WA
KEMENDIKDASMEN

MASALAH
KUOTA SISWA
DI JABAR

**HERMAN DERU
TERUS MELAJU
SUMSEL MAJU**

Untuk

MOESLIMCHOICE.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIMCHOICE
MAGAZINE

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTUR

Irmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie

REDAKTUR BISNIS

.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin

REPORTER

Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir

KEPALA BIRO SUMSEL

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

1447

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Masih dalam suasana pergantian tahun dari 1446 ke 1447 hijriyah, bagaimana kita memaknai tahun baru dalam almanak yang dimulai sejak peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Dalam kalender gregorian, peristiwa hijrah berlangsung pada 622 Masehi. Momen hijrah menjadi dasar penetapan tahun pertama dalam kalender hijriyah. Meskipun hijrah terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal, bulan Muharram dipilih sebagai awal tahun Hijriah karena dianggap sebagai awal dari keinginan hijrah, serta menjadi waktu kaum muslimin kembali dari ibadah haji.

Latar belakang hijrah dari Makkah ke Madinah adalah dakwah Rasulullah SAW yang penuh tantangan dan penolakan terutama dari kaumnya sesama suku Quraisy. Tantangan dan penolakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para mukminin yang sudah sangat keterlaluhan, membuat beliau akhirnya memutuskan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik.

Beberapa ayat Alquran menegaskan pentingnya hijrah. Bahkan hijrah dalam perspektif bisnis pun sudah terdokumentasi dalam surat keempat Annisa Ayat 100: "Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak."

Namun hijrah bukan hanya sekedar berpindah tempat. Intinya adalah perubahan. Karena itu Tahun Baru 1447 Hijriyah pun relevan untuk meningkatkan ketaqwaan dan berubah menjadi lebih baik. Hijrah juga bermakna penguatan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Begitu-lah kita mengenal kaum muhajirin (yang berhijrah dari Makkah) dan kaum anshar (yang menolong di Madinah)

Pada konteks masa kini, di Indonesia, yang masih harus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, layaklah kita saling mengingatkan. Untuk yang terhindar dari dampak ekonomi global, alangkah baik jika memanfaatkan kelebihannya untuk membuka lapangan kerja yang berkesinambungan. Tentu saja dengan perencanaan bisnis yang mempertimbangkan banyak hal agar tidak gagal.

Secara historis, Rasulullah berhijrah ke Madinah setelah ada baiat dari kaum anshar. Baiat kaum Anshar di Madinah merujuk pada perjanjian yang dilakukan oleh penduduk Madinah (yang kemudian dikenal sebagai kaum Anshar) dengan Nabi Muhammad SAW, yang terjadi dalam dua tahap, yaitu Baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua. Baiat ini merupakan titik penting dalam sejarah awal Islam, menandai diterimanya dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan kesiapan kaum Anshar untuk melindungi dan menolong beliau serta kaum Muhajirin.

Kini setelah 1447 tahun berlalu, peristiwa hijrah masih sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Masih banyak umat Islam yang menghadapi masalah ekonomi sehari-hari. Katakanlah fakir miskin. Memberdayakan fakir miskin insya Allah mencegah mereka dari kekufuran. ♦

>>COVER EDISI INI



ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06



20



58



24

06

LAPORAN UTAMA

Kuota Haji 2026 diharapkan sudah diketahui pada 10 Juli 2025. Namun, kabar terbaru, pengumumannya keluar pada 15 Juli 2026. Ada apa dengan kuota haji?

24

SUMSEL SYARIAH

Gubernur Herman Deru menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Bhayangkara Ke-79 yang dilaksanakan di Lapangan Mako Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), Palembang pada Selasa (1/7/2025).

20

EKONOMI SYARIAH

Peringkat Indikator Ekonomi Islam Global, The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE), menempatkan Indonesia di peringkat ketiga pada periode 2024/2025.

58

BIROKRASI KEMENDAGRI

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) wajib mematuhi semua aturan yang berlaku, tanpa terkecuali. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan bahwa Pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang bertindak di luar aturan hukum.



44

44

KEMENAG

Dalam rangka merayakan dan menyambut tahun baru hijriah, Kementerian Agama (Kemena-g) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pen-catatan Nikah dalam rangkaian kegiatan yang diberi nama 'Peaceful Muharam 1447 Hijriah'.

52

MUBA MAJU LEBIH CEPAT

Semarak Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-45 yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, men-jadi panggung bagi para perajin terbaik dari seluruh penjuru tanah air. Salah satunya kerajinan kain tenun Gambo yang menjadi pakaian khas Kabupaten Musi Banyuasin.

88

LAPORAN KHUSUS

Gegara kenaikan harga di tingkat kon-sumen, temuannya malah beras opo-losan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan solusinya.



52



88

60

BIROKRASI KEMKOMDIGI

Sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk mem-buat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.



REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 38 | WISATA HALAL
- 68 | PARLEMEN
- 72 | KAJIAN
- 76 | MUALAF
- 80 | KESEHATAN
- 82 | RESENSI
- 84 | INSPIRATIF
- 86 | KOLOM 1
- 84 | PARLEMEN

SIMPANG SIUR KUOTA HAJI

Kuota Haji 2026 diharapkan sudah diketahui pada 10 Juli 2025. Namun, kabar terbaru, pengumumannya keluar pada 15 Juli 2026. Ada apa dengan kuota haji?

Pengumuman kuota haji 2026 oleh Kerajaan Arab Saudi untuk semua negara pengirim jamaah memang dijadwalkan pada 15 Muharram 1447. Namun, tanggal itu yang bertepatan dengan 11 Juli 2025 telah berlalu.

Informasi awal tentang pengumuman kuota haji pada 10 Juli 2025 pun sudah pernah dikemukakan pada 20 Juni 2025 atau 25 Zulhijah. Harap maklum, sejak 2022, lazimnya, Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan kuota haji untuk tahun berikutnya pada 12 Zulhijah, bersamaan dengan perayaan

masar nusuk atau e-Haji,” ungkap Hilman Latief menjawab pertanyaan Tim Media Center Haji (MCH) Daker Madinah, Jumat, 20 Juni 2026.

Menurut Dirjen Hilman, pemerintah Arab Saudi tengah membangun kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh negara pengirim jamaah haji mengenai pola penyelenggaraan haji 2026, saat mana kuota resminya baru akan ditetapkan pada bulan berikutnya.

Muncul pula pertanyaan tentang Nota Diplomatik yang disampaikan Dubes Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri Agama. Juga dampaknya terhadap alokasi kuota

perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman yang kala itu masih berada di Madinah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Saudi yang memberi kemudahan dan bantuan kepada Indonesia. Hilman pun menjelaskan satu per satu masalah serta solusi yang telah dilakukan selama proses haji.

Hilman mengatakan masalah pertama ialah perbedaan data jamaah dalam E-Hajj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan. Dia menyebut ada beberapa nama yang batal berangkat sehingga harus diganti. Hilman menyebut proses pembata-



malam penutupan penyelenggaraan ibadah haji. Namun, untuk 2025, tidak langsung diumumkan. Pada malam penutupan itu hanya dibagikan informasi seputar timeline penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief pun mengamini hingga 12 Zulhijah 1446 itu negara-negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia, belum menerima informasi seputar kuota haji 1447 H/2026 M. Menurutnya, kuota haji baru akan diumumkan oleh otoritas Arab Saudi pada 15 Muharram 1447 H.

Maka, muncullah 10 Juli 2025 sebagai tanggal pengumuman kuota haji 2026. “Pengumuman secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi

2026, Hilman Latief memastikan tidak ada implikasi terkait itu.

“Catatan yang tercantum dalam nota diplomatik bersifat sebagai saran perbaikan, bukan teguran atau sanksi, serta tidak berimplikasi pada pengurangan kuota haji Indonesia,” tandasnya.

Hilman menjelaskan, nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dan merupakan catatan tertutup yang hanya ditujukan ke Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri. “Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk

lan kadang terjadi secara tiba-tiba karena jamaah sakit, meninggal atau hal lainnya.

“Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” ujar Hilman.

Dia mengatakan Kantor Urusan Haji RI di Saudi telah melakukan pencocokan data ulang dengan Kementerian Haji Saudi dan syarikah yang melayani jamaah. Persoalan itu telah selesai dan sebagian jamaah sudah pulang ke Indonesia. “Itu sudah selesai dan alhamdulillah lancar sebagaimana saat ini jamaah juga sudah bisa kembali ke Tanah Air,” ujarnya.

Hilman juga menjelaskan masalah terkait pergerakan jamaah haji gelombang I dari Madinah ke Makkah. Menurut Hilman, jamaah haji ditempatkan di hotel sesuai kelompok terbang atau kloter selama di Madinah.

Menurut Hilman, persoalan terjadi ketika jamaah akan diberangkatkan ke Makkah berdasarkan syarikah. Dia menyebut kondisi ini membuat beberapa jamaah dalam satu kloter terpisah jadwal pemberangkatannya. "Ditjen PHU atau Misi Haji Indonesia menye-

Masalah berikutnya ialah penempatan jamaah di hotel-hotel Makkah. Dia mengatakan jamaah seharusnya menginap di hotel sesuai syarikah masing-masing agar memudahkan pemberangkatan ke Arafah.

Namun, ada beberapa jamaah yang terpisah hotel dengan mayoritas kloternya meminta digabung meski syarikahnya berbeda. Dia menyebut ada juga jamaah yang pindah hotel secara mandiri tanpa melapor kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

"Ini yang disebut sebagai penempatan

tinggi.

"Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jamaah dengan kondisi khusus (lansia/risti, berisiko tinggi) semacam itu. Ini kan masih terjadi, jadi masih masuk catatannya dalam nodip," kata Hilman.

Dia mengatakan pihak Saudi menginginkan seleksi atau pemeriksaan kesehatan lebih ketat. Dia menilai pesan itu juga ditujukan pihak Saudi kepada keluarga calon jamaah haji di masa depan agar tidak memaksakan keluarganya berangkat haji jika punya sakit parah seperti harus cuci darah.

Masalah kelima ialah penyembelihan hewan dam atau hadyu bagi jamaah haji Indonesia. Hilman mengatakan Kemenag sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji bahwa di Indonesia ada dua skema membayar dam, pertama melalui Adahi dan kedua menyembelih dam di Tanah Air melalui BAZNAS.

"Kita sudah menyampaikan pesan ini kepada seluruh jamaah untuk bisa menggunakan platform hadyu dari Adahi. Tapi ini tidak mudah karena kewajiban itu muncul belakangan, sementara banyak masyarakat Indonesia melalui para pembimbing KBIH dan lain lain sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH (Rumah Potong Hewan), ada juga yang belanja ke pasar sendiri beli kambingnya atau mitra dati mukimin. Sementara tahun ini Saudi begitu keras melarang hal tersebut," ucap Hilman.

"Mungkin di situ ada masalah lain, misalnya harga terlalu tinggi melalui Adahi. Kita sampaikan pada Kerajaan," sambungnya.

Hilman juga menyebut rancangan kontrak sudah ditandatangani Kantor Urusan Haji RI. Namun, pihak Adahi belum menandatangani karena menunggu kepastian jumlah kambing yang akan disembelih. "Kita sudah tahu fakta dan situasinya di KBIHU dan para pembimbing ibadah haji yang sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan pihak lain non Adahi, sehingga kita tidak bisa pastikan berapa orang yang akan menyembelih melalui Adahi," ujarnya

Dia mengatakan urusan dam ini akan menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan haji di Indonesia. Menurut Hilman, hal itu dapat mempermudah pembuatan kontrak dengan Adahi.

Nah, kembali ke pengumuman kuota haji 2026 per 10 Juli atau 15 Muharram 1447 hijriyah rupanya bergeser lagi ke 15 Juli 2025. Salah satu yang menginformasikannya adalah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.



diakan transportasi sendiri. Ada yang memakai mobil lebih kecil atau mini-bus atau mobil yang lain. Inilah yang disebut dalam surat tersebut sebagai pemberangkatan tidak sesuai dengan prosedur," ungkapnya.

Dia menyebut persoalan itu sudah selesai karena jamaah akhirnya bisa dibawa dari Madinah ke Makkah. Dia mengatakan pemberangkatan itu juga dilakukan setelah Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan syarikah.

yang tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji dan syarikah penyedia layanan. Termasuk penggabungan suami istri, lansia (lanjut usia) dan pendampingnya," ujar Hilman.

Masalah berikutnya terkait kesehatan jamaah. Hilman mengatakan masalah kesehatan jamaah haji Indonesia ini sudah menjadi perhatian sejak awal karena tingginya jumlah jamaah lanjut usia (lansia) dan risiko

"Besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar," ujar Cucun dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu, 13 Juli 2025.

Menurut dia, pengumuman itu juga berkaitan dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tengah disusun oleh DPR bersama pemerintah. Ia mengatakan revisi regulasi tersebut merupakan bagian dari langkah besar dalam perombakan tata kelola haji di Indonesia.

Menurutnya, selama ini pelaksanaan haji cenderung berlangsung dengan pendekatan business as usual, terutama dalam aspek pengawasan yang dilakukan DPR. "Ini revolusi besar tentang pelaksanaan ibadah haji. Kami lagi menyusun RUU tentang Revisi 8/2019 yang sering dari tahun ke tahun business as usual. Ributnya ya permasalahan kuota, permasalahan penanganan bagaimana kontraktual, yang tidak ada kontrak itu dalam di-protect karena DPR masuknya di ujung pengawasannya," katanya.

Cucun menilai pengawasan terhadap proses pemilihan hotel, catering, dan fasilitas lainnya selama ini hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan. Hal ini menyebabkan masalah yang terus berulang setiap tahunnya.

"Tidak dari proses bagaimana hotel yang disewa seperti apa, catering yang disewa seperti apa, kadang yang diperlihatkan di ujung, contohnya bagus ketika pelaksanaan karena mengurus orang banyak, akhirnya ya kejadian dari tahun ke tahun seperti itu," jelasnya.

"Dan tidak bisa menghindari daripada moralitas siapapun juga yang menjadi pengambil keputusan dalam pelaksanaan PPIH itu," tutur Cucun lebih lanjut.

Ia menjelaskan struktur kelembagaan yang menangani ibadah haji kini telah berubah. Pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH). "Bapak ibu sekalian yang kami lagi lakukan ini bagaimana apalagi sekarang dilepas dari Kementerian Agama sudah final strukturnya, tidak di Kementerian Agama tapi di Badan Penyelenggara Haji. Ya, sebentar lagi karena harmonisasi sudah selesai, Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah membuat BPH," ujar Cucun.

Ia menambahkan tahapan pembahasan RUU kini sudah kembali ke Komisi VIII DPR. Usulan RUU inisiatif DPR akan segera dibahas sambil menunggu keluarnya peraturan presiden (perpres) terkait kelembagaan baru. "Tetapi karena siklus haji ini sudah ber-

jalan di bulan Juli, besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan Perpres akan keluar," kata dia.

Cucun mengatakan dalam rancangan perpres yang lama, BPH masih disebut bekerja bersama kementerian yang membidangi urusan agama. Namun, dalam perpres baru nanti, BPH akan menjalankan fungsi penuh secara mandiri.

Toh sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah Arab Saudi dipastikan tak akan mengurangi kuota haji Indonesia pada

Mohammed bin Salman Al Saud pekan lalu.

"Sepanjang informasi yang kami dapatkan kuota masih kuota basic ya, kuota dasar," kata Prasetyo, dikutip Jumat, 11 Juli 2025. Menurut dia, dalam waktu dekat, pemerintah Arab Saudi akan mengirimkan surat yang berisi perencanaan Kuota Haji 2026. Pemerintah pun akan mulai melakukan sejumlah tahap awal sehingga pelaksanaan haji tahun depan semakin baik.

"Karena proses haji itu kan memang panjang, dimulai dengan kuota. Kemudian dari situ nanti dengan database jamaah haji kita



2026. Jadi, sesuai kuota tahun ini, Indonesia akan kembali mengirimkan 221 ribu jamaah untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci pada 2026,

Mensesneg Prasetyo sebelumnya sempat mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan berupaya untuk meminta penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan saat presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan bertemu Perdana Menteri Arab Saudi,

yang sudah mengantre, dari situ mulai dicocokkan," kata dia.

"Kalau kemarin masih agak sedikit ambigu, perpres ini menekankan bahwa BPH menjalankan dengan kementerian yang membidangi agama, tapi nanti perpres baru akan full langsung ke Badan Penyelenggara Haji," ujarnya.

Selengkapnya, kita simak saja setelah 15 Juli 2026. Semoga yang terbaik untuk jamaah Indonesia. ♦

BUKAN HANYA SOAL KUOTA

Kerajaan Arab Saudi belum juga mengumumkan kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia. Namun, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Agustus 2025. Boleh jadi kunjungan itu akan menjawab tanda tanya seputar kuota haji 2026.

Yang memiliki kewenangan mengumumkan kuota haji memang tuan rumah Kerajaan Arab Saudi. Pada saatnya, tentu pengumuman kuota itu akan keluar. Toh sambil menanti kepastian kuota haji, upaya perbaikan penyelenggaraan haji dari pihak Indonesia juga memerlukan perhatian.

Badan Penyelenggara (BP) Haji, lembaga pemerintah yang akan mulai mengelola penyelenggaraan ibadah haji jamaah Indonesia pada 2026, pun mengakui tak mengetahui alasan Kerajaan Arab Saudi belum juga mengumumkan kuota haji tahun depan. "Sampai hari ini kami belum tahu ya penyebab belum diumumkan kuota haji. Tapi memang ada rencana Menteri Haji dan Umrah (Arab Saudi) akan ke Indonesia pada Agustus nanti," ungkap Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI, Selasa, 15 Juli 2025.

Menurut Dahnil, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah dijadwalkan

berkunjung ke Indonesia pada 4-6 Agustus 2025. Toh ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda utama dari kunjungan tersebut.

Dahnil juga belum dapat memastikan apakah kuota haji Indonesia akan diumumkan dalam agenda kenegaraan itu. "Tanggal 4-6 Agustus Menteri Haji dan Umrah akan ke Indonesia. Kita enggak tahu, mungkin momentumnya akan disampaikan pada momentum itu atau seperti apa," ujarnya.

Namun Dahnil membantah alasan kuota haji 2026 untuk Indonesia belum juga diumumkan akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan pemangkasan terhadap kuota haji untuk Indonesia.

"Nggak. Jadi, pengurangan kuota itu kan sudah disampaikan oleh Kementerian Saudi: Tidak akan mereka lakukan," kata Dahnil



Menurut Dahnil, sejauh ini Arab Saudi kemungkinan memberikan kuota untuk jamaah haji Indonesia sama seperti tahun sebelumnya. "Kemarin Pak Kepala (BP Haji Indonesia, Irfan Yusuf) bertemu dengan Kementerian Haji (Arab Saudi). Kemungkinan ya kuota kita sementara sama dengan sebelumnya. Jadi estimasinya ya sekitar 221 ribu," kata Dahnil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah menjelaskan alur penetapan kuota untuk jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Sepanjang informasi yang kami dapatkan, kuota masih kuota basic ya, kuota dasar, sebagaimana setiap tahun. Biasanya, setelah penyelenggaraan haji itu segera Pemerintah Arab Saudi itu mengirimkan surat yang isinya adalah perencanaan kuota," kata Prasetyo Hadi, Jumat, 11 Juli 2025.

Dia menambahkan tahapan hingga kuota haji itu ditetapkan cukup panjang, karena setelah adanya surat berisi perencanaan kuota, nantinya pemerintah akan menggunakan database calon jemaah haji yang telah mengantre untuk dicocokkan jumlahnya. "Tetapi kalau detail angkanya mohon berkenan ditanyakan ke Pak Menag (Menteri Agama) maupun ke Badan (Penyelenggara) Haji," ungkap Mensesneg Prasetyo.

Nah, sementara kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia belum diumumkan, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah agar memperjuangkan penambahan kuota terutama untuk menyelesaikan persoalan masa tunggu ibadah haji yang begitu panjang saat ini. Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu memperjuangkan agar kuota haji dihitung tidak lagi dengan metode penghitungan satu banding seribu, tetapi menjadi dua banding seribu, mengingat jumlah penduduk Muslim serta sarana dan prasarana haji yang telah berkembang pesat saat ini.

"Apabila bisa diperjuangkan atau pemerintah kita memperjuangkannya supaya kemudian bisa menjadi dua banding seribu, itu akan memotong masa tunggu yang begitu banyak," kata Hidayat saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi kelompok mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

Selama ini kuota Haji Indonesia mengacu kepada Keputusan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Tahun 1987 di Amman, Yordania, yaitu 1 per 1.000 dari jumlah penduduk Muslim suatu negara,

yang jumlah setiap tahunnya ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan menurut Hidayat, saat ini pun dengan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam, mencapai 245 juta, seharusnya kuota jamaah haji dari tanah air adalah sebanyak 245.000, bukan 221.000 seperti yang ditentukan

pakan haknya jamaah haji Indonesia adalah 245 ribu," ujarnya.

Berikutnya, menurut Hidayat, Pemerintah Indonesia juga dapat melobi Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji dengan pendekatan berkenaan penghitungan 1 banding 1.000 yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Focus Group Discussion (FGD)

Membedah Permasalahan Penyelenggaraan

Ibadah Haji

Evaluasi, Solusi, dan Arah Kebijakan Nasional

Selasa

15 Juli 2025 Pk 13.00 - 16.00 WIB
di Ruang Fraksi PKS DPR RI,
Gd. Nusantara 1, DPR RI

Youtube Live
PKSTV DPR RI

Zoom Meeting
bit.ly/FGD-PenyelenggaraanHaji



pada Haji 2025 lalu.

"Satu banding seribu, kalau kaidahnya memang demikian, maka harusnya kuota jamaah haji Indonesia bukan hanya 221 ribu karena jumlah umat Islam di Indonesia sudah lebih dari 245 juta dari keseluruhan 280 juta penduduk Indonesia. Bila 245 juta, maka kuotanya mestinya, bukan kuota tambahan, tapi kuota yang meru-

"Bisa juga dengan mempergunakan pola pendekatan bahwa satu banding seribu itu adalah angka yang sudah klasik. Ketika diputuskan pada tahun 1987 tentang kuota satu banding seribu itu, waktu itu jumlah umat Islam belum sebanyak sekarang. Jumlah jamaah yang terkategori mampu, istitha'ah itu belum sebanyak sekarang," kata dia.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hidayat menambahkan, transportasi untuk haji juga belum semudah dan semurah saat ini. Begitu pula dengan sarana serta prasarana di Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah yang belum sebagus sekarang.

Ia mencontohkan tempat lempar jumrah pada tahun 1987 hanya satu lantai dan setengah lingkaran. "Sekarang, sudah bertingkat-tingkah dan hampir lingkaran penuh. Maka, bila bisa diperjuangkan atau pemerintah kita memperjuangkannya," ujarnya.

Lebih dari itu, Hidayat mengemukakan pentingnya persiapan serius dari semua pihak dalam peralihan penyelenggaraan haji, dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara (BP) Haji. Menurut dia, pidato Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjadi momentum transisi penyelenggaraan ibadah haji yang kini dipegang BP Haji usai ibadah

serius," ujarnya

Dari DPR, ia mengungkap bahwa Komisi VIII akan segera membahas draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan BP Haji agar revisi ini dapat dirumuskan secara komprehensif dan tepat waktu.

"Revisi ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, bukan hanya pemerintah yang dirugikan, tapi jutaan calon jemaah haji. Kita harus cepat, tapi bukan asal cepat. Lebih cepat, lebih bagus, tanpa bertele-tele, asalkan benar dan berkualitas," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu juga mengusulkan agar BP Haji ditingkatkan menjadi setara kementerian. Tujuannya agar BP Haji dapat menangani kompleksitas penyelenggaraan haji secara nasional dan

Badan Penyelenggara (BP) Haji dalam menyelenggarakan Haji 2026 yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya melalui penyiapan data yang baik. "Ini -Kemenag- bersama BP Haji sedang menyiapkan untuk 1447 Hijriah -2026 Masehi-, mudah-mudahan kita siapkan data yang baik," kata Hilman

Menurut Hilman, data yang baik itu berperan penting dalam pelunasan dan pengelolaan antrean jemaah haji menjadi lebih tertib dan akurat, sekaligus meminimalkan kendala teknis saat keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Hilman juga menyoroti persoalan kuota haji yang tidak terpakai. Menurut dia, sisa kuota itu harus disepakati, misalnya lewat revisi Undang-Undang Haji, untuk tidak digunakan guna mencegah adanya lompatan dalam antrean.

Dia memandang kuota sisa itu sepatutnya tidak digunakan guna menjaga



haji 2025 terlaksana.

"Pidato Pak Menteri Agama sangat penting. Beliau menyampaikan bahwa amanah penyelenggaraan haji yang selama ini dipegang Kemenag akan dilimpahkan ke badan penyelenggara haji. Ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tapi mengandung amanah konstitusional yang harus disiapkan secara

daerah. "Presiden ingin pelayanan haji lebih bagus tapi lebih murah. Ini tantangan nyata. Revisi UU ini harus bisa menjawab tantangan itu secara konkret dan terukur," ungkapnya.

Sedangkan dari Kementerian Agama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyatakan siap untuk membantu

ketertiban antrean sekaligus menghindari potensi menjadi temuan terkait penyalahgunaan kuota. "Kita belajar betul dari tahun yang lalu bahwa orang yang melunasi belakangan, tidak bisa dengan begitu mudah bergabung dengan orang yang melunasinya di depan. Suami melunasi belakangan, ya tidak bisa serta merta bergabung dengan istrinya yang di depan,"

katanya.

Apabila kuota itu memang kembali disepakati untuk harus diisi, menurut dia, jamaah pengganti atau yang mengisi kuota yang kosong itu tidak boleh mendapatkan besaran nilai manfaat dana haji yang sama dengan jamaah yang sesuai dengan antrean. Hilman menyampaikan pula ke depan persoalan tersebut akan dibahas secara mendetail bersama mitra Kemenag, yakni Komisi VIII DPR RI.

Sedangkan Wakil Kepala BP Haji Dahnil menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemberantasan praktik kartel dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan haji. Menurut dia, perintah itu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai menerima laporan darinya mengenai keberadaan praktik kartel dalam haji, yang ditemukan selama mempelajari penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini.

"Saya sebutkan Pak, ini ada kartel, di perhajian kita ada kartel. Apa jawab Presiden pada saya? Udah, kau babat aja. (Saya menjawab) Pak ini kartel loh, kartel itu besar, punya semua sumber daya yang ada. Bisa-bisa dibabat balik," kata Dahnil.

Menurut dia, perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo karena orang nomor satu di Indonesia itu menginginkan penyelenggaraan haji bersih dari praktik manipulasi, bahkan korupsi. "Concern Presiden itu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu bersih dari praktik manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya," kata Dahnil.

Pemberantasan kartel itu pun, ucap Dahnil melanjutkan, merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang berintegritas. Menurut dia, semaksimal apa pun persiapan yang dihadirkan, penyelenggaraan haji akan sulit untuk menjadi lebih baik apabila tidak disertai dengan integritas dari seluruh pihak yang ada di dalamnya.

"Oleh sebab itu, seperti pesan Presiden, ini wajah lembaga kalian (BP Haji), wajah utamanya itu harus integritas. Kalau tidak, maka siap-siap SOP yang kami buat sebgus apa pun tidak ada artinya," kata Dahnil.

Ia menyampaikan penyelenggaraan haji yang saat ini masih belum menjunjung integritas dapat dilihat dengan keberadaan oknum yang memanipulasi status perkawinan dengan menggunakan dokumen pernikahan palsu. Ia mengatakan terdapat oknum yang mengisi antrean haji yang tersisa, dengan alasan mahram dari pasangannya yang telah

masuk dalam antrean, padahal mereka belum menikah.

"Bahkan, KTP bisa jadi palsu, surat nikah bisa palsu, paspor bisa palsu. Praktik ini ditemukan dan saya dengarkan langsung presentasi dari teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu. Bayangkan, surat nikah bisa palsu untuk haji," ujarnya.

Dahnil mengatakan praktik seperti itu masih ditemukan karena ketiadaan perbaikan integritas dalam penyeleng-

Penyelenggara (BP) Haji hingga tingkat kecamatan.

"Dalam revisi UU ini, ternyata kekhawatiran kami dijawab. Bahwa memang dia badan, tapi sekelas, setingkat kementerian. Di Pasal 106, dinyatakan bahwa akan dibentuk cabang-cabang badan ini di setiap provinsi, kabupaten/kota, sampai di tingkat kecamatan," kata Hidayat

Menurut dia,, pembentukan cabang-cabang itu diatur dalam revisi UU Haji



garaan haji. Apakah penyelenggaraan ibadah haji yang beralih ke BP Haji dapat lebih baik?

Untuk soal ini Hidayat Nur Wahid berharap revisi Undang-Undang Haji dapat mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik oleh BP Haji. Menurut dia, revisi Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji) mengatur mengenai pembentukan cabang-cabang Badan

bertujuan memaksimalkan pengelolaan penyelenggaraan haji. Dengan demikian, ujar dia melanjutkan, BP Haji akan mampu menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, bahkan dengan harga yang lebih murah, sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.

Akhirnya, sementara kuota haji belum diumumkan Kerajaan Arab Saudi, banyak hal yang memerlukan pembenahan di Indonesia. Segera. ♦

AKHIR HAJI 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup operasional penyelenggaraan haji 1446 hijriyah 2025. Penutupan kali ini sekaligus menuntaskan 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian untuk beralih ke Badan Penyelenggara Haji.

Akhir Haji 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup operasional penyelenggaraan haji 1446 hijriyah 2025. Penutupan kali ini sekaligus menuntaskan 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian untuk beralih ke Badan Penyelenggara Haji.

Ya, penutupan operasional haji 2025 juga beriringan dengan transisi penyelenggara dari Kemenag ke BP Haji. Dengan berakhirnya operasional ibadah haji tahun berikutnya semakin membaik.

Mulai tahun depan, ujanya, mekanisme pelaksanaan ibadah haji akan dipegang sepenuhnya oleh Badan Pe-

Jakarta Pusat, Senin, 14 Juli 2025..

Menag Nasaruddin mengemukakan pula ibadah haji tahun ini tidak luput dari permasalahan. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada jamaah atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama, selaku Amir Haji juga memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, terutama jamaah haji, mungkin ada pelayanan kami yang kurang baik," ujar Menag Nasaruddin.

"Dari lubuk hati kami yang sangat dalam, bersama kami mewakili teman-teman petugas, termasuk Amirul Haji, memohon maaf," sambungnya.

Penutupan operasional penyeleng-



nyelenggara (BP) Haji. "Sekarang ini akan beralih kepada BPH, Badan Penyelenggara Haji, dan kita berdoa sekaligus membantu ya, bukan hanya mendoakan, tapi kita bantu bersama bagaimana pelaksanaan haji yang akan datang itu akan lebih sempurna," ucapnya dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin,

garaan ibadah haji 1446 H/2025 seiring dengan tibanya kelompok terbang (kloter) terakhir jamaah haji Indonesia pada Jumat, 11 Juli 2025. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berlangsung sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jamaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci.

Dalam rentang 72 hari masa opera-

sional, tercatat 203.149 jamaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.

Sebanyak 103.806 jamaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jamaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jamaah gelombang II. Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jamaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jamaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Alhamdulillah seluruh tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum, penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur,

Sebanyak 99,29 persen jamaah haji reguler asal Indonesia melaksanakan haji tamattu', 0,66 persen haji ifrad, dan 0,04 persen melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99 persen) jamaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jamaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jamaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jamaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jamaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.

Menurut Menag, ada 40 jamaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga jamaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbul-

Selama masa operasional haji 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan sejumlah layanan bagi jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 312 hotel bagi jamaah haji Indonesia, terdiri atas: 212 di Makkah dan 100 di Madinah. Jarak akomodasi atau hotel paling jauh di Makkah adalah 4,5 km dari Masjidil Haram. Sementara hotel di Madinah semuanya berada di wilayah Markaziyah.

Terkait layanan konsumsi, PPIH Arab Saudi telah distribusikan 15.537.589 boks catering jamaah dan petugas haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter). Sementara di Madinah, ada 2.665.812 boks catering yang dibagikan pada gelombang I dan 2.396.667 boks catering didistribusikan pada gelombang II.

Selain itu, pada fase puncak haji (7



semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi," ungkap Menag

"Jamaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafari-wukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir," lanjutnya.

lah) yang belum ditemukan juga terus dilakukan.

Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jamaah haji reguler dan 12 jamaah haji khusus. "Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jamaah," jelas Menag.

- 13 Zulhijjah 1446 H atau 3 - 9 Juni 2025), ada sekitar 3,7 boks makanan siap saji yang didistribusikan kepada jamaah haji Indonesia. Sebanyak 1.281.680 boks makanan (paket siap saji) didistribusikan di hotel jamaah untuk makan pagi, siang, dan malam pada 7 Zulhijjah, makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan malam pada 13

Zulhijjah. Selain itu, ada 2.045.004 boks makanan (lauk siap saji) dan 468.400 boks makanan (paket siap saji) yang didistribusikan pada fase Armuzna, sejak di Arafah hingga Mina.

PPIH Arab Saudi menyiapkan ribuan bus untuk melayani jamaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang

Makkah (10 Mei - 1 Juni dan 10 Juni - 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk melayani jamaah haji Indonesia.

Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H)

jamaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Adapun lima hal progresif (5P) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembentukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menag. Pertama, percepatan penyiapan regulasi haji. Menurut dia, perlu percepatan dalam penyelesaian regulasi haji di Indonesia. Alasannya, penyelenggaraan haji juga terikat dengan timeline yang dibuat oleh Arab Saudi.

"Bulan Juli 2025 sudah harus ada transfer dana awal, lalu di Agustus harus konfirmasi penggunaan lokasi tenda musim haji dan mulai kontrak layanan dasar, hotel, transportasi, dan maskapai," sebut Menag.

Harapan kedua, percepatan proses transisi dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji. Selanjutnya ketiga, Nasaruddin juga berharap segera dimulainya transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif di Arab Saudi.

"Harapan keempat penguatan komitmen isti'ath'ah kesehatan. Karena pemerintah Arab Saudi tahun ini sangat concern terhadap isu kesehatan jamaah," kata Menag.

Terakhir, Nasaruddin berharap BP Haji mewujudkan haji yang berdampak positif, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. "Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jamaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik," ungkapnya. ♦



disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair. Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jamaah haji gelombang I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jamaah haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat yang setia mengantarkan jamaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jamaah di kota

untuk peningkatan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata erata BPIH 2024 sebesar Rp93,4 juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar

RENCANA BESAR KAMPUNG HAJI

Salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Untuk rencana ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa lokasi kampung yang khusus menampung jemaah Indonesia itu akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.

"Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram," kata Rosan

Sedangkan Badan Penyelenggara (BP) Haji mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga opsi skema yang dapat diterapkan dalam pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. "Ada beberapa skema pembangunan Kampung Haji yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi," kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang digelar Fraksi PKS DPR

investasi yang sangat besar," ucapnya.

Lalu untuk pilihan skema kedua, Pemerintah Indonesia akan memilih hotel yang berkapasitas besar agar mampu menampung semua jemaah haji dari tanah air. "Yang kedua, skema yang kedua, apakah kemudian kita membeli hotel yang existing (telah ada), yang bisa menampung jumlah tamu yang besar. Misalnya, 50 ribu. Kemudian, ini kita akuisisi, kemudian diubah menjadi Kampung Haji," ujarnya.

Yang terakhir, terkait dengan skema ketiga, pengontrakan terhadap hotel terkait akan dilakukan dalam jangka



saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu, 13 Juli 2025, sebagaimana dikutip dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Hal senada juga disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa Indonesia mulai menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi terkait rencana mewujudkan Kampung Haji di Makkah. "Kemarin juga saya bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi kampung haji Indonesia," kata Menag, Kamis, 3 Juli 2025.

RI di Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

la mengemukakan tiga skema itu meliputi pembangunan Kampung Haji dari awal oleh Danantara, pembelian hotel untuk dijadikan Kampung Haji, atau pengontrakan hotel di Arab Saudi.

Terkait opsi pertama, Dahnil menyatakan terdapat sejumlah risiko yang akan dihadapi dalam pembangunan Kampung Haji, seperti potensi jangka waktu pembangunan yang lama dan biaya investasi yang besar.

"Skema pertama, bisa jadi dibangun dari awal dengan misalnya dibangun oleh Danantara. Dengan risiko, memang butuh waktu karena harus dibangun dari awal, dari nol kemudian sampai jadi, pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan

waktu yang panjang. Dari semua opsi itu, Dahnil mengatakan penentuan akan dilakukan setelah pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Dewan Koordinasi Tinggi. Meskipun begitu, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang mendorong pembangunan Kampung Haji itu memiliki kecenderungan memilih pembangunan dari awal.

"Semua skema ini akan dibicarakan oleh Dewan Koordinasi Tinggi, yang dibentuk antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Belum ada keputusan yang mana akan kita pilih, walaupun Presiden punya kecenderungan agar Kampung Haji itu bisa dibangun sejak awal dan bisa diakselerasi," kata Dahnil. ♦

BANDOL

GUNAWAN EFFENDI

Boleh jadi di antara kita ada yang menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Bukan ini masalahnya. Namun, adakah di antara kita yang terjerat perjudian menggunakan jaringan internet (online) yang dikenal dengan sebutan judol? Ini soal lain lagi.

Masalahnya adalah sudah menerima dana Bansos, kemudian menggunakannya untuk transaksi judol. Sebut saja bansos dipakai judol, bandol. Sementara boleh jadi ada yang layak menerima Bansos, dan tak suka berjudi, namun tak terdaftar sebagai penerima manfaat bansos itu.

Kabarnya, sekitar setengah juta rekening penerima manfaat Bansos ternyata terlibat transaksi judi online. Memang belum seberapa jika dibandingkan dengan jumlah penerima bansos yang tercatat lebih dari 75 juta keluarga. Angka 75 juta lebih ini berasal dari data resmi Badan Pusat Statistik.

Namun, setengah juta yang kemudian terlibat transaksi judol merupakan peringatan dini untuk lebih berhati-hati. Data lengkapnya terekam oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan nilai transaksi dari aktivitas tersebut mencapai hampir Rp 1 triliun, Satu triliun, sama dengan seribu miliar, angka 1 diikuti 12 nol di belakangnya.

Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, lembaganya baru menganalisis penerima bansos dari satu bank. Cara memeriksanya adalah dengan pengecekan silang dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos, dicocokkan dengan rekening yang bertransaksi judi online, juga tindakan pidana korupsi hingga pendanaan terorisme.

Angka pastinya, PPATK mencatat 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judol sepanjang 2024. Jumlah rekening yang terekam PPATK sebagai pemain judol pada analisis ini tercatat sekitar 9,7 juta NIK. Sedangkan total deposit judol dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial itu mencakup sekitar 7,5 juta kali transaksi.

Seiring dengan itu, PPATK telah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil analisis rekening penerima bantuan sosial dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan sosial yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

Untuk tahun ini, per 1 Juli 2025, Gus Ipul melaporkan lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan rincian bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota KPM dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara untuk bansos sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar

84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun. Untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

Mengenai temuan penerima bansos bertransaksi judol, Gus Ipul mengaku masih mendalaminya. Termasuk mendalami rekening di bank-bank lain mengingat data yang dianalisis PPATK baru berasal dari satu bank untuk penyaluran Bansos 2024.

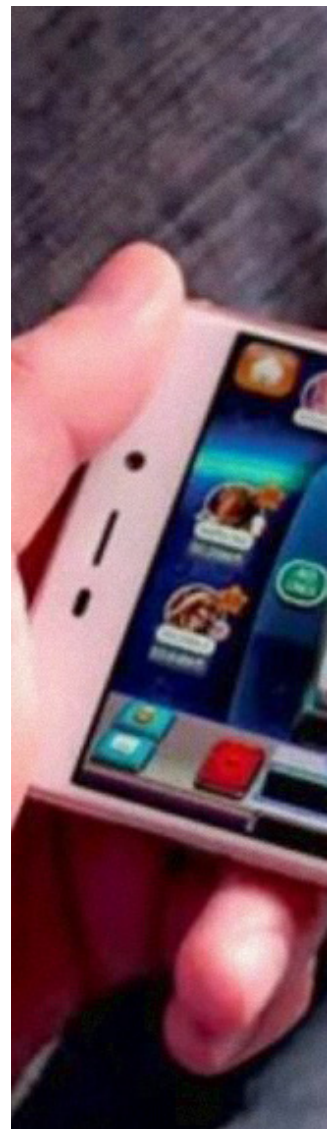
Toh Gus Ipul memastikan akan mencoret penerima bansos tersebut jika benar digunakan untuk judol. Dia mengatakan nantinya bansos akan diberikan kepada pihak yang lebih berhak. Kalau memang terbukti bansos itu digunakan untuk keperluan judol maka rekening penerimanya akan dicoret untuk dialihkan kepada mereka yang lebih berhak.

Di awal Juli 2025 pula, sudah beredar di berbagai media informasi penyaluran bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Kemensos memastikan bahwa pencairan dana bansos tahap 3 akan dilakukan secara bertahap melalui empat bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Tahap 3 itu berlangsung antara Juli-September.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengemukakan, pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judol. Menurut dia, sanksi berupa pencabutan bansos akan tetap dilakukan, meskipun penerima bansos tersebut terkategori masyarakat miskin maupun miskin ekstrem.

Toh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq meminta pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat sebelum menjatuhkan sanksi atau mencabut hak warga atas bantuan sosial (bansos) jika terbukti terlibat judol. "Kita harus tetap menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru menjadi korban," kata Maman.

Menurut Maman, pemerintah jangan sampai gegabah dalam mengambil keputusan. Ia memandang masih terdapat kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi seperti NIK oleh pihak lain juga harus dipertimbangkan secara



serius. Bila terbukti bahwa NIK mereka disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk berjudi secara online, sambungannya, maka aparat penegak hukum harus mendalami kasus ini dan menangkap pelaku penyalahgunaan identitas tersebut.

Maman juga mendesak agar pemerintah bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi dengan PPATK serta Kepolisian guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap data tersebut. Jika benar mereka terlibat dalam praktik judi online, maka bansos yang mereka terima harus segera dihentikan. Menurut Maman, negara tidak boleh membiayai gaya hidup yang merusak.

Sedangkan Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menyarankan pemerintah memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada penerima bansos sebagai langkah evaluasi usai adanya kasus penyalahgunaan bansos untuk judol. Menurut dia, persoalan bansos disalahgunakan untuk bermain judi itu bukan semata soal sanksi, melainkan bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri

maupun keluarga.

Netty menyinggung pula pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal penyaluran bansos agar tetap sasaran. Ia menilai pengawalan dalam penyaluran bansos itu pun dapat melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial. Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Menurut dia, kita semua perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, anggota DPR dari Fraksi PKS itu menyampaikan pihaknya akan terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar lebih tepat guna dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dia menegaskan siap bersinergi dengan kementerian terkait dan mitra kerja untuk evaluasi dan perbaikan sistem agar bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju kemandirian.

Jadi, banyak pilihan kebijakan. Untuk kemaslahatan, tersedia banyak jalan mengatasi bandol: bansos dipakai judol. ♦





BERTAHAN DI POSISI KE-3

Peringkat Indikator Ekonomi Islam Global, The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE), menempatkan Indonesia di peringkat ketiga pada periode 2024/2025. Bertahan di posisi yang mulai tercapai pada 2023-2024. Kapan meraih peringkat pertama?

Sejak pertama SGIE meluncur pada 2014/2025, masih berada di peringkat 10-11. Posisi ini bertahan hingga SGIE 2019/2020. Peringkat SGIE ini mencakup tujuh sektor utama ekonomi dan keuangan syariah global: Mulai dari makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, kosmetik halal, farmasi, hingga media dan rekreasi.

Nah, mulai SGIE 2019/2020, Indonesia mulai melompat ke posisi kelima. Saat wabah COVID-19 merajalela, posisi Indonesia justru terus merangkak naik lagi ke posisi keempat dalam SGIE 2020/2021 dan 2021/2022. Nah, pada SGIE 2023/2024, Indonesia mencapai posisi ketiga untuk pertama kali. Selanjutnya tetap bertahan di posisi ini pada SGIE 2024/2025.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil mempertahankan posisi ketiga," kata Partner DinarStandard Reem El Shafaki dalam agenda Global Launch The SGIE Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

DinarStandard adalah lembaga pengelola SGIE Report. Sejatinnya lembaga yang berkantor di New York, Amerika Serikat dan Dubai Uni Emirat Arab sebagai klien utama dalam proyek SGIE Report. Firma riset dan manajemen eksekusi strategi per-

tumbuhan yang memberdayakan organisasi untuk mencapai dampak global yang menguntungkan dan bertanggung jawab, memiliki spesialisasi dalam inovasi pemerintah, ekonomi halal/etika global, dan ruang dampak sosial. Sejak 2008, DinarStandard telah mendukung lebih dari 30 lembaga pemerintah, lembaga investasi, pemimpin industri, dan perusahaan multilateral dari lebih dari 12 negara di seluruh dunia. Proposisi nilai uniknya berakar pada penyampaian fakta asli dan dampak klien yang didorong oleh visi ke depan yang didasarkan pada keunggulan dan etika.

Menurut El Shafaki, Indonesia bertahan di peringkat ketiga merupakan sebuah prestasi. "Bukan hanya itu. Indonesia telah menempati posisi pertama dalam indikator budaya muslim, peringkat kedua dalam wisata ramah muslim, dan peringkat kedua dalam farmasi dan kosmetik," ujar Reem.

Posisi pertama dan kedua pada SGIE Report 2024/2025 juga tetap diduduki oleh Malaysia dan Arab Saudi. Toh Indonesia menunjukkan kinerja yang baik terutama dalam sektor modest fashion yang menempati peringkat pertama. Tidak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan utama investasi halal, dengan mencatatkan 40 transaksi investasi senilai US\$ 1,6 miliar, tertinggi secara global mengungguli Uni Emirat Arab

dan Arab Saudi.

Selanjutnya, SGIE 2024/25 juga mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim dunia mencapai US\$ 2,43 triliun di tahun 2023, dan diproyeksikan tumbuh menjadi US\$ 3,36 triliun pada 2028. Sementara itu, aset keuangan syariah global mencapai US\$ 4,93 triliun, dengan Indonesia terus memperkuat posisinya melalui inovasi teknologi dan kebijakan strategis nasional.

Nah, di acara peluncuran SGIE Report 2024/2025, tampil menyampaikan sambutan antara lain Wakil Presiden Ke-13 RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya Kiai Ma'ruf mengemukakan, untuk memperkokoh pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, dalam waktu dekat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan bertransformasi menjadi Badan Ekonomi Syariah.

"Insya Allah Komite Nasional akan bertransformasi sebentar lagi menjadi Badan Ekonomi Syariah, Insya Allah tidak akan lama lagi. Pak Presiden sudah bicara dengan saya, kita bicara di akhir bulan ini, sehingga ini akan mempercepat prosesnya," ungkapnya.

Badan baru ini, ungkap Kiai Ma'ruf, dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden. "Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menegaskan, Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas. "Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha. "Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel," tambah Kiai Ma'ruf.

Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, KH Ma'ruf Amin meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat. "Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah

bisa," ujarnya.

Dalam acara yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengemukakan ekonomi Islam dapat menjadi instrumen untuk membangun perdamaian dan solidaritas. "Kita hidup di era pasar dengan polycrises: perubahan iklim, pemanasan global, konflik, ketimpangan, dan ketidakpastian ekonomi. Dengan berbagai tantangan ini, ekonomi Islam dapat menjadi instrumen untuk membangun perdamaian dan solidaritas," kata Rachmat Pambudy.

Pada kesempatan tersebut, Rachmat menerangkan bahwa inti dari Surat Al-Insan Ayat 8-9 berkaitan dengan misi utama keadi-

gitu pula dengan program Sekolah Rakyat yang mewujudkan pesan iqra' untuk mencari ilmu, perluasan layanan kesehatan dan menambah jumlah dokter, serta memperkuat ekosistem ekonomi Islam demi kemashlahatan masyarakat.

"Melalui investasi etis, keuangan inklusif, dan komitmen bersama untuk kebaikan bersama, kita dapat mengurangi akar penyebab marginalisasi dan ekstremisme," ujar Kepala Bappenas itu pula.

Rachmat mengemukakan pula, penguatan ekonomi syariah telah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi. Arah ini telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-



lan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya ketulusan dan tak mementingkan diri sendiri dalam hubungan sosial.

Nah, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia disebut mewujudkan nilai-nilai Islam tersebut dalam tindakan nyata dengan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan. Be-

2029. "Sebagai tujuan dan cita-cita pada tahun 2029, ekonomi syariah Indonesia, insya Allah, dapat menjadi yang terbaik dalam peringkat ekonomi Islam global," kata dia lagi.

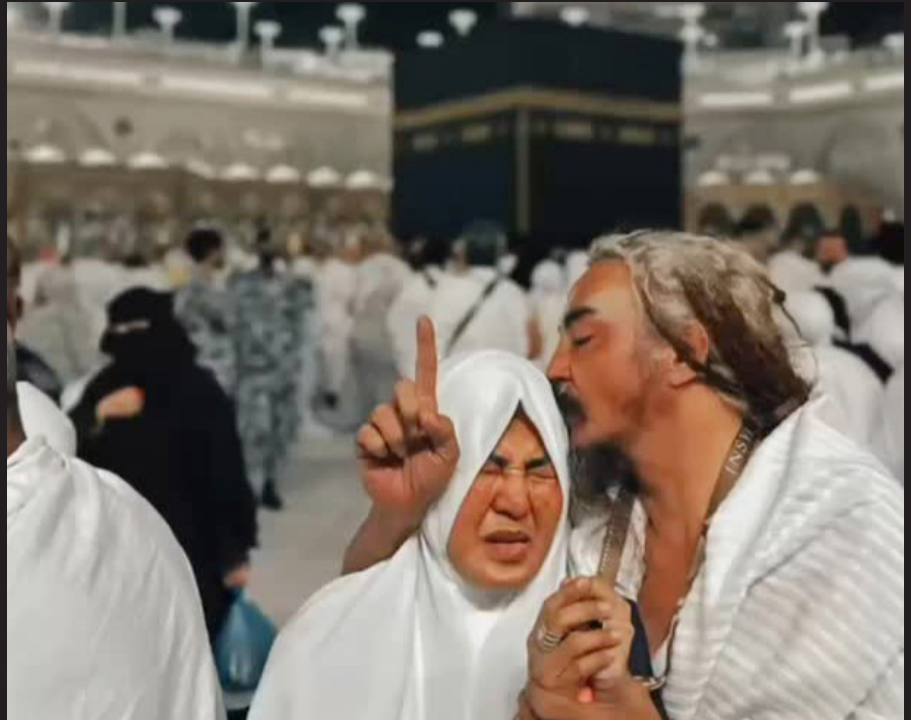
Masih ada waktu beberapa tahun hingga 2029. Sanggupkah Indonesia naik ke peringkat pertama? Semoga setiap tahun akan menjadi lebih baik, kullu aam wa antum bi khoir. ♦

KISAH UNIK LIMBAD SAAT MENJALANKAN IBADAH UMRAH SEMPAT DITAHAN DAN DITERIAKI 'SAYTON'

Penampilan memang bukanlah segalanya, namun segalanya terkadang berawal dari penampilan.

Itulah yang terjadi pada Limbad, yang gegara penampilannya, ia harus rela ditangkap pihak imigrasi Jeddah, Arab Saudi saat akan melaksanakan ibadah umroh. Tentu saja, kisah unik Limbad di Arab

Saudi ini langsung menyedot perhatian publik di Tanah Air.



Pada saat itu, Limbad yang memang dikenal sebagai sosok pesulap yang memiliki kesan misterius, kabarnya ditahan gegara gigi taringnya, sehingga orang-orang yang baru melihatnya ketakutan, bahkan menyebut Limbad dengan sebutan sayton alias setan.

Cerita pengalaman unik Limbad ini, diungkap oleh komika Abdur Arsyad melalui kanal YouTube Tuah Kreasi. Dimana dalam video tersebut, ia berbincang santai bersama Mamat Alkatiri, Praz Teguh, dan Arie Kriting.

Abdur Arsyad menceritakan kronologi bagaimana Limbad sampai ditahan oleh pihak imigrasi Arab Saudi.

Cerita bermula saat Limbad dan rombongan dari Indonesia tiba di bandara Jeddah, Arab Saudi. Saat pemeriksaan dokumen, petugas Arab Saudi melihat penampilan Limbad yang cukup nyentrik dan tak lazim, apalagi di Arab Saudi.

Gigi taring Limbad membuat petugas terkejut, sekaligus ketakutan.

"Jadi waktu itu, saya umrah bareng Limbad. Nah, sampai di imigrasi Jeddah, dia punya taring tanam yang nggak bisa dilepas," kata Abdur Arsyad menceritakan kisah Limbad tersebut.

Abdur menambahkan, karena penampilan yang tidak lazim inilah, hingga akhirnya Limbad pun ditahan.

"Petugas imigrasi Arab sampai nahan dia," tambah Abdur.

Saat itu, Limbad, seperti biasa berpenampilan cukup nyentrik, namun terkesan menakutkan bagi yang tidak biasa melihatnya. Ia mengenakan jubah lengkap berwarna gelap, dengan rambut panjangnya.

Limbad dikenal sangat pendiam jarang berkata-kata, dan jika tersenyum itupun sedikit menakutkan, karena akan memperlihatkan gigi taringnya yang panjang.

Hal itulah yang membuat petugas imigrasi Arab Saudi, merasa was-was, dan bahkan tegang, hingga panik saat melihat Limbad yang tidak pernah dilihat sebelumnya.

"Katanya di sana, 'sayton', 'sayton'," ungkap Abdur Arsyad, saat menirukan petugas imigrasi Arab Saudi.

Hal tersebut semakin menjadi-jadi lantaran Limbad tetap diam, meski diteriakin sayton, karena ia memang jarang berbicara di hadapan publik. Hingga para petugas imigrasi tersebut terpaksa menahan Limbad untuk dimintai keterangan.

Limbad Akhirnya Dilepas

Saat ditahan dan diinterogasi, Limbad pun mulai menjelaskan siapa dirinya dengan menggunakan Bahasa Inggris sederhana, dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang artis yang berasal dari Indonesia.

"Akhirnya dia bilang ke Imigrasi, 'I'm artist from Indonesia,'" ujar Abdur.

Namun pihak imigrasi tidak percaya begitu saja, karena dari penampilan Limbad benar-benar terlihat sangat aneh dan menakutkan.

"Master didengarkan ayat-ayat suci Al Quran sebanyak 30 juz sampai master ketiduran, karena keasyikan mendengarkan. Harapannya dari pihak imigrasi, master akan kepanasan atau kesurupan, tapi nyatanya master malah asyik dan menikmatinya," kata perwakilan Limbad, seperti dilansir dari detikcom, Kamis (9/7/2025).

Pemandu jamaah umrah yang biasa disebut sebagai 'mutawif' kemudian sempat menjelaskan kepada pihak imigrasi, bahwa Limbad merupakan pesulap terkenal di Indonesia. Namun, pihak imigrasi masih belum percaya dan tidak mau membebaskan Limbad.

Para petugas imigrasi pun lalu menguji Limbad untuk membaca ayat-ayat suci Al Quran untuk membuktikan bahwa dia memang seorang Muslim. Setelah Limbad membaca beberapa ayat Al Quran dengan lancar, akhirnya ia pun dibebaskan.

"Mutawif sudah menjelaskan kalau master seorang pesulap dan artis Indonesia, tetap enggak digubris. Sampai master diperiksa fisik dari badan, rambut gimplal, sampai ke gigi taring," tambahnya.

Saat petugas imigrasi meminta Limbad untuk membaca Al Quran, Limbad dengan senang hati membaca Al Quran secara random, dan surat Ar-Rum-lah yang dipilih Limbad, yang dibacanya hingga selesai.

"Akhirnya Limbad dibebaskan oleh pihak imigrasi dan berpelukan haru," ungkap perwakilan Limbad tersebut.

Setelah dibebaskan, Limbad pun melanjutkan melaksanakan ibadah umrahnya. Bahkan, ia mendapat pengawalan khusus dari pihak keamanan Arab Saudi untuk memudahkannya melaksanakan ibadah umrah. Baik saat di Makkah, yaitu untuk shalat di Hijr Ismail hingga mencium Hajar Aswad, maupun saat di Madinah, yaitu untuk shalat di Raudhah.

Tak sampai disitu, Limbad bahkan diajak berkeliling ke beberapa tempat istimewa di Makkah, termasuk juga ke gurun pasir.

Cerita unik Limbad ini, pertama kali viral setelah diungkapkan oleh komika Abdur Arsyad dalam sebuah siniar di YouTube.

Perwakilan Limbad mengonfirmasi cerita itu terjadi beberapa tahun lalu.

Limbab juga kembali melaksanakan ibadah umrah pada 2025 tahun ini, tepatnya sebelum bulan puasa Ramadhan lalu. Saat itu, merupakan umrah keempat yang dilaksanakan Limbad.

Perjalanan Karier Limbad
Limbab mulai dikenal publik sejak

gan salah satu stasiun TV. Dan, sejak saat itu pula, ia tidak pernah terlihat berbicara di setiap penampilannya.

Asistennya-lah yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Limbad kepada publik. Pada setiap aksinya, Limbad terlihat menarik karena membawa burung hantu yang diberi nama Burhan.

Menurut Limbad, Burhan merupakan



mengikuti ajang sulap The Master dan dinobatkan sebagai Master Magician. Pada setiap penampilannya, Limbad selalu memukau penonton dengan aksi sulap beraliran faqir magic atau sulap yang menampilkan unsur-unsur berbahaya dan memancing ketegangan.

Setelah kemenangannya di acara The Master musim kedua, Limbad menerima banyak tawaran dari sejumlah program acara televisi. Penampilannya yang menghibur berhasil memikat penonton. Limbad lalu menandatangani 'kontrak bisu' den-

kependekan dari burung hantu, yang ia temukan 10 tahun silam dalam kondisi nyaris mati. Penggemar Limbad (Limbaders) sendiri memberi nama burung hantu tersebut dengan sebutan Limbird.

Selain dunia sulap, Limbad juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia seni peran. Beberapa sinetron dan film pernah ia bintang, di antaranya adalah dalam sinetron Tarzan Cilik dan Baim Anak Soleh. Sedangkan untuk film, di antaranya adalah film Ghost Jenglot (2007), Maling Kutang (2009), dan The Mentalist (2011). ♦

Irup Hari Bhayangkara Ke-79 dan Beri Kado Istimewa GUBERNUR MINTA POLDA SUMSEL TERUS TINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT

Gubernur Herman Deru menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Bhayangkara Ke-79 yang dilaksanakan di Lapangan Mako Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), Palembang pada Selasa (1/7/2025).

Upacara diikuti Personel Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Satuan Pengamanan (Satpam) yang berada di lingkungan Sumatera Selatan.

Dalam amanatnya, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih dan

apresiasi atas capaian prestasi yang telah diperoleh Polda Sumsel selama memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengatakan Hari Bhayangkara merupakan hari bersejarah yang menjadi tonggak berdirinya Polri di Indonesia.

"Hari ini merupakan momentum bagi

kita untuk mengenang dan merenungi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kepada kita dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat", tuturnya.

Gubernur juga meminta dukungan agar Polda Sumsel untuk selalu memberikan dan meningkatkan layanan pri-



ma untuk masyarakat sumsel, sehingga terciptanya rasa aman di Sumatera Selatan.

Hibahkan Lahan dan Gedung Kantor

GUBERNUR lebih lanjut mengatakan, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Polda Sumsel, Pemprov Sumsel memberikan satu bangunan dan lahan kepada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas). Lahan yang dihibahkan tersebut di Jalan POM IX di seberang Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang.

“Tidak banyak Polda yang menerima penghargaan itu. Saya sebagai Gubernur memberikan reward berupa bangunan dan lahan yang sebelumnya adalah kantor Samsat, diserahkan menjadi Markas Ditlantas Polda Sumsel, agar pelayanan lebih mengena di masyarakat,”



Sementara itu, dalam momen ta-syakuran Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si menyampaikan harapannya, semoga Polda Sumsel selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sumsel. Juga, penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

“Dukungan dari masyarakat sangat penting agar kami dalam melayani,

melindungi dan mengayomi masyarakat bisa lebih baik lagi. Kami terus berbenah diri supaya Kami bisa bekerja terus melayani masyarakat,”kata Wakapolda.

Wakapolda mengatakan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi tidak hadir di kesempatan tersebut karena menerima Penghargaan Nugraha Sakanti atas kinerja Polda Sumsel dari Presiden RI Prabowo Subianto. ♦

PELANTIKAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA SUMSEL

Gubernur: NU Organisasi Besar, Harus Selalu Solid dan Gerak Cepat!

Gubernur Herman Deru menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan Masa Khidmat 2025-2030. Pelantikan yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf ini berlangsung di Griya Agung, Palembang, Selasa, 1 Juli 2025.

Usai pelantikan yang berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, Gubernur memberikan kata sambutan. Dirinya mengingatkan jajaran PWNU Sumsel, agar menyadari bahwa mereka semua mengemban amanah besar organisasi dalam membentuk arah kehidupan sosial, politik, dan moral di wilayah Sumsel.

Gubernur Herman Deru menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru ini dapat semakin solid, baik secara internal maupun dalam menjalin silaturahmi.

"Saya yakin tidak ada alasan bagi NU Sumsel untuk tidak bergerak cepat dalam pelayanan dan kepengurusan kemanusiaan. Saya merasa kerjasama ini sangat baik, dan Sumsel berhasil mempertahankan zero konflik," ungkapnya.

Ia juga berharap tidak ada perpecahan, dan NU dapat memiliki peran di semua lini, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya, sehingga dapat lebih menonjolkan kekhasannya dalam pelayanan kemanusiaan, mengingat NU adalah organisasi yang sangat besar.

"Menjaga persatuan umat dan memperkuat peran strategis organisasi ini di tengah masyarakat adalah hal yang sangat



penting. Terlebih sekitar 67 persen warga Sumsel merupakan bagian dari NU," Gubernur menekankan.



Menjaga persatuan umat dan memperkuat peran strategis organisasi ini di tengah masyarakat adalah hal yang sangat penting. Terlebih sekitar 67 persen warga Sumsel merupakan bagian dari NU.

Gubernur Deru mengatakan, NU merupakan organisasi sangat besar di mana basis massa NU di Sumsel lebih dari 67

persen.

"Data terbaru menyebut 67,20% masyarakat Sumsel adalah warga Nahdliyin. Ini bukan hanya angka, tapi juga amanah besar yang harus dijaga," tandasnya.

Ketua PWNU Sumsel: Herman Deru, NU Selalu di Hati

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan yang baru dilantik KH Hendra Zainuddin dalam sambutan perdananya mengungkapkan rasa bangga terhadap Gubernur Herman Deru.

Ia menyebutkan bahwa Gubernur Herman Deru selalu hadir dalam setiap kegiatan Nahdlatul Ulama, menginspirasi bahwa "apapun jabatannya, NU selalu di hati."

"Pak Ketum, Pak Herman Deru ini setiap acara Muslimat pasti datang, itu sudah pasti datang. Secara struktural, pengurus NU Sumsel naik signifikan. Berdasarkan survei independen, 67,20% warga Sumsel

menyatakan diri sebagai warga NU.

Ia menjelaskan, NU Sumsel kini memiliki jaringan yang sangat luas dan kuat, meliputi 17 pengurus cabang, 241 Majelis Wakil Cabang (MWC), 1.494 ranting di tingkat desa, dan 103 anak ranting.

"Ini jaringan besar yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tantangan sekaligus peluang besar bagi kita semua," tegas KH. Hendra Zainuddin.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa khidmat kepengurusan baru PWNU Sumsel, diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan kemajuan Sumatera Selatan.

"Kami bertekad menghadirkan NU yang mampu menjawab kebutuhan zaman dan relevan dengan tantangan kontemporer. Kami menyusun program yang berbasis data dan kebutuhan lapangan," katanya. ♦





RETRET LASKAR PANDU SATRIA, INISIATIF GUBERNUR HERMAN DERU PENDIDIKAN KARAKTER MEMBENTUK GENERASI MUDA TANGGUH

Gubernur Herman Deru menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh, dalam menyambut Bonus Demografi menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Sumatera Selatan.

Penegasan itu disampaikan Gubernur pada Pembukaan Pendidikan Karakter Laskar Pandu Satria pada Rabu (2/7/2025). Bahwa melalui retret ini, para siswa dididik menjadi generasi muda yang bisa menyelesaikan persoalan internal mereka masing-masing, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih baik.

"Anak-anak yang kita terima saat ini, atas persetujuan orangtua dan guru mereka, adalah anak-anak yang patut kita hargai. Mereka adalah anak-anak yang sadar akan kekurangannya dan siap digembleng untuk menjadi pribadi yang kuat serta siap berkompetisi secara positif," ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa Bonus Demografi 2045 bukan sekadar menandai 100 tahun Indonesia merdeka, tetapi juga menandakan kesiapan para

pemuda kita dalam bersaing di kancah global.

Gubernur juga menilai perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI) harus bisa dimanfaatkan oleh generasi muda secara maksimal.

"AI adalah teknologi yang suka tidak suka harus kita kuasai. Kita tidak boleh jadi pecundang, justru harus jadi penguasa dan pemanfaat dari teknologi baru ini", tutur HD.

Gubernur menyampaikan bahwa retret ini dilakukan juga untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak yang memiliki masalah sosial atau perilaku dengan gagasan pendidikan karakter yang telah digaungkannya sejak tahun 2020.

"Ini adalah momentum kebangkitan kembali program pendidikan karakter di Sumsel. Kita punya sumber daya manusia

yang siap, kita juga punya mitra yang kuat TNI, Polri, dan Kejaksaan.

"Mari kita gunakan kekuatan ini untuk membina anak-anak kita menjadi generasi tangguh, bebas dari pengaruh negatif seperti miras, narkoba, dan pergaulan bebas," tegasnya.

100 Siswa dari Enam Kabupaten-Kota

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi & Umum H. Zulkarnain selaku Ketua Panitia Retret menjelaskan bahwa Retret merupakan program inisiatif Gubernur Sumsel, dengan tujuan penguatan karakter pelajar serta menyiapkan generasi muda unggul menyongsong Bonus Demografi 2045.

"Retret berlangsung selama 10 hari, mulai Tgl 1-10 Juli 2025, diikuti oleh 100 siswa SMA/SMK dari 6 kabupaten/kota yai-

tu Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang.

"Peserta yang mengikuti program ini telah dipilih secara selektif, dengan prioritas utama bagi siswa yang menunjukkan perilaku bermasalah berulang, seperti sering membolos, terlibat perkelahian, atau mengalami gejala perundungan", ucapnya.

Selama kegiatan berlangsung, pe-



AI adalah teknologi yang suka tidak suka harus kita kuasai. Kita tidak boleh jadi pecundang, justru harus jadi penguasa dan pemanfaat dari teknologi baru ini.

serta akan mendapatkan berbagai materi penguatan karakter seperti Kedisiplinan, Wawasan kebangsaan, Kerja sama tim, Motivasi diri, dan Pengelolaan emosi sosial yang disampaikan oleh para pelatih dari unsur TNI, Polri, serta narasumber profesional lintas sektor.

Turut hadir Kajati Sumsel, DR. Yulianto, SH.,MH, Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M. Si, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumsel, Aria Ahmad Mangunwibawa, S.PSI., M.SI, Ketua Kwarda Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, M.M dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. ♦



Retret Laskar Pandu Satria, Gubernur Herman Deru: BUKAN MAU MENYAMAI, TUJUANNYA YANG SAMA

Gubernur Herman Deru telah membuat langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu para siswa bermasalah, dengan menginisiasi Retret Laskar Pandu Satria.

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Retret Laskar Pandu Satria, Gubernur pun diundang jadi narasumber dalam program TV Nasional Metro TV News Line dengan tema "Retret Anak Bermasalah di Sumsel" pada Rabu (2/7/2025)

Dalam program TV Nasional tersebut Gubernur menekankan, pembentukan Karakter manusia itu merupakan salah

satu program prioritas dalam rencana pembangunan yang ada di Sumatera Selatan semenjak periode pertama menjadi Gubernur Sumsel.

"Dalam perkembangan zaman saat ini ditemui beberapa kendala terhadap anak-anak, sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar dalam sekolah. sehingga penting bagi kita untuk menjalankan gerakan Pramuka, Pramuka dalam artian yang

sebenarnya.

Sehingga kami mengadakan kegiatan Laskar Pandu Satria guna membentuk anak-anak yang dipilih sehingga tidak menyusahkan atau menjadi beban keluarga yang ada di Sumatera Selatan. dalam kegiatan ini kami bekerjasama dengan TNI, Dinas Pendidikan, Psikolog dan Tenaga pendidik lainnya", jelasnya.

Gubernur menegaskan kegiatan yang

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Newsline

PEMROV SUMSEL ADAKAN RETRET LASKAR PAN

dilakukan ini tidak mesti disamakan di tempat yang lain, namun setiap pemimpin memiliki tujuan yang sama yaitu mencetak generasi penerus yang berkarakter baik untuk keberlangsungan pembangunan bangsa.

“Parameter sukses atau tidak kegiatan ini akan memerlukan kontribusi penilaian dari orang tua juga tentunya bagaimana menilainya.

“Pihak sekolah, orang tua dan panitia akan menilai masing masing hasil dari kegiatan retreat terhadap anak-anak tersebut,” katanya.

Dengan terselenggaranya retreat, ini diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak dan generasi penerus bangsa bukan sebagai beban negara tetapi sebagai pencetak generasi yang berprestasi dan berkarakter bagi bangsa dan negara.

Turut Hadir Kadiskominfo Rika Efianti, SE, MM, Kepala BPPD Iqbal Alisyahbana, Karo Humas Protokol Toni Kurniawan. ♦



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL 2025 GUBERNUR: PESERTA HARUS HASILKAN KARYA, DAN ANTI JUAL BELI JABATAN!

Gubernur Herman Deru secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yang pembukaannya dilangsungkan di Griya Agung Palembang, Senin (7/7/2025).

Dalam arahnya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar untuk mendapatkan sertifikat. Disorotinya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pasca-otonomi daerah, namun ia menegaskan pentingnya mendorong kemampuan untuk memaksimalkannya.

Gubernur Herman Deru mengatakan, "Yang pertama ini adalah networking, kedua sikap. Kita ini selalu sadar dengan kelebihan namun tidak sadar den-

gan kelemahan, lalu manajemen karena kita tahu semua SDM tidak sama. Nah, bagaimana kita menyatukan kekuatan ini?"

Ia menjelaskan bahwa seorang pimpinan harus memiliki capaian kerja yang menghasilkan produk dan mampu memberikan solusi dalam setiap permasalahan.

"Jadi lurah harus ada solusi, jadi camat harus ada solusi, jadi kepala kesehatan jika ada masalah wabah harus ada solusi. Jadi seorang pimpinan ini harus mem-

berikan solusi, jangan sampai bawahan kita menghadap kita tidak ada solusi," tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan, agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) ke depan dapat mengadakan pelatihan guna menguasai teknologi yang begitu pesat berkembang, sehingga kemajuan teknologi dan SDM dapat seimbang.

Dalam kesempatan itu pula, ia berpesan keras agar tidak pernah melakukan jual beli jabatan yang dapat membel-





enggu diri sendiri dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.

Gubernur memberikan kata kunci agar aman dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni aspek legal, tidak mark up atau fiktif, serta bermanfaat.

DIGEMBLENG 30 HARI

Kepala BPSDMD Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M, melaporkan bahwa sebanyak 28 peserta akan mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXI Provinsi Sumsel Tahun 2025.

Peserta berasal dari berbagai daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, dan pelatihan akan berlangsung selama 30 hari.

“Menyampaikan kepada seluruh peserta dapat menyelesaikan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kami mengharapkan dukungan kepada Pak Gubernur dan semua pihak sehingga PKN XXI ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Prof. Edwar Juliarta.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas oleh seluruh peserta PKN XXI.

Turut hadir Deputy Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Dra. Army Winarty, M.Si, dan para peserta PKN XXI. ♦





Sukses, Herman Deru Turunkan Inflasi dengan GSMP **KINI, GSMP MENYAPA DAN MENGUBAH PARADIGMA PANTI SOSIAL**

Gubernur Herman Deru hadir dengan berbagai inovasi dan terobosan dalam upayanya memajukan Provinsi Sumatera Selatan dan menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang telah sukses menurunkan angka inflasi di Sumsel.

Kini program GSMP terus dikembangkan, di mana Gubernur Herman Deru pada Selasa (8/7/2025) Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Menyapa Lingkungan Desa (G-SMP Menyapa) dan G-SMP Goes To Panti Sosial ODGJ Sako, Palembang.

Menurut Gubernur, langkah tersebut menandai langkah serius pemerintah provinsi dalam mengubah paradigma panti sosial; Dari sekadar penerima bantuan menjadi sumber penghasilan di bidang ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa GSMP berawal dari keprihatinannya atas tingginya inflasi kebutuhan pangan di Sumsel, padahal provinsi ini memiliki lahan yang luas dan subur.

Inisiatif ini bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.

"Bagaimana semua orang yang di sini

akan memiliki pengaruh untuk semua menggerakkan ini. Yang penting nilai kita akan menimbulkan perubahan mindset," ungkap Herman Deru.

Ia menekankan bahwa Sumsel terbukti mampu mengatasi inflasi kebutuhan pokok.

"Untuk itu di sini ada Bu Wagub, Bu Wakil Bupati Banyuasin, silakan semua untuk menggerakkan organisasinya untuk menggerakkan ini," tambahnya.

GSMP Menyapa Lingkungan Desa

Gubernur Herman Deru juga menjelaskan bahwa gerakan ini bukan hanya tentang kemampuan membeli, tetapi bagaimana masyarakat, termasuk panti sosial, dapat memenuhi kebutuhan kecil sehari-hari.

"Kebutuhan kecil, kebutuhan dapur, rata-rata Rp300.000/bulan. Bayangkan jika mindset-nya sudah berubah untuk menanam sendiri, maka sudah mampu menutupi kebutuhannya," jelasnya.

Ia mengajak untuk memasifkan gerakan ini di seluruh wilayah, baik desa-desa



maupun panti sosial di Sumsel.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruzuan Effendi, menyampaikan program ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, menasar 60 dasawisma, 17 kelompok wanita tani, dan 1.530 rumah tangga di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

Untuk panti sosial, program ini dilaksanakan melalui OPD terkait dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti PT. Pusri dan Jakfa, yang membantu menyalurkan program berupa ikan gurame, ikan patin, ikan lele, ayam, serta sayuran dan buah-buahan.

"Ini mendorong transformasi kemandirian pangan masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan di Sumsel. Dan saat ini, Pak Gubernur, telah dilaksanakannya GSMP Goes To Office yang akan dilombakan pada perayaan 17 Agustus 2025 nanti," terang Ruzuan Effendi.

Di akhir acara, Gubernur Sumsel didampingi para OPD menebar benih ikan gurame, lele, dan patin di kolam yang berada di lingkungan Panti Sosial ODGJ Sako Palembang.

Turut hadir Ketua BKOW Sumsel Hj. Lidyawati Cik Ujang, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, S.P., dan OPD terkait lainnya. ♦ros

Hadiri Tahun Baru Islam di Air Batu Banyuasin

HERMAN DERU TEKANKAN MAKNA DOA DAN SILATURAHMI

Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah di Kelurahan Air Batu, Kabupaten Banyuasin, berlangsung istimewa pada Minggu (13/7/2025). Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru hadir langsung untuk bersilaturahmi sekaligus mengikuti prosesi adat Ruwatan Bersih Desa bersama warga.

Kegiatan ini menjadi perpaduan antara nilai-nilai keislaman dan adat tradisional masyarakat Jawa yang hidup di wilayah tersebut. Tahun baru Hijriyah dimaknai warga Air Batu sebagai momentum untuk berdoa bersama, sekaligus mensyukuri keberkahan alam dan kehidupan.

Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan pentingnya memaknai Tahun Baru Islam dengan semangat pembauran dan penguatan ukhuwah. Ia menilai, momen ini sangat tepat untuk mempererat silaturahmi dan mendoakan kebaikan ber-

sama.

"Ini bukan sekadar ritual. Kita panjatkan doa agar desa ini dijauhkan dari musibah, dan kehidupan kita selalu diberkahi," ungkapnya.

Herman Deru juga menyoroti pentingnya hubungan sosial antarwarga. Menurutnya, salah satu hikmah peringatan Tahun Baru Islam adalah meningkatnya kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Dengan berkumpul seperti ini, masyarakat bisa saling mengenal, saling menguatkan. Nilai-nilai seperti inilah yang





harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan santunan kepada 100 anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial. Ia berharap, semangat berbagi ini bisa terus ditanamkan dalam setiap kegiatan keagamaan.

Ketua Panitia, Devi Susanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah menjadi tradisi tahunan warga Air Batu, yang digelar secara mandiri melalui dana gotong royong. "Kami percaya, menjaga tradisi adalah bentuk ibadah dan kepatuhan kepada ajaran agama serta leluhur," ujarnya.

Devi juga menyampaikan harapan masyarakat terkait kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan yang masih belum memadai. Ia berharap pemerintah dapat membantu memperbaiki akses transportasi di wilayah mereka.

Acara diakhiri dengan ritual pemecahan kendi sebagai simbol ruwatan, serta arak-arakan warga yang penuh semangat. Hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Bupati Banyuasin, para anggota DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Peringatan ini menunjukkan bahwa perayaan Tahun Baru Islam dapat dirangkai dengan kearifan lokal yang sarat makna, memperkuat spiritualitas sekaligus solidaritas sosial masyarakat. ♦





10

DESTINASI WISATA RELIGI TERINDAH DI UZBEKISTAN PERPADUAN BUDAYA KUNO DAN KEAJAIBAN ALAM

Pada 1991, Uzbekistan memproklamasikan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari Uni Soviet dan sejak saat itu, negara ini mengalami banyak perubahan dalam pemerintahan dan juga ekonominya.

Uzbekistan juga memainkan peran penting dalam membina hubungan antara negara-negara di Asia Tengah melalui berbagai organisasi, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dewan Kerjasama Shanghai, dan Uni Ekonomi Eurasia.

Namun yang lebih menarik, Uzbekistan memiliki budaya yang kaya dan unik, serta potensi ekonomi yang besar. Meskipun masih memiliki tantangan dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi, Uzbekistan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi internalnya

dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tengah dan dunia secara keseluruhan.

Uzbekistan juga merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budaya, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Uzbekistan memiliki banyak



Madrasah Ulugh Beg

tempat wisata muslim yang menarik untuk dikunjungi.

Selain itu, di Uzbekistan, mencari makanan halal juga sangat mudah, karena banyak sekali pelancong muslim yang berkunjung ke negara ini. Sehingga pihak pemerintah menyediakan makanan dan restoran halal.

Jadi bagi para pelancong, tidak perlu khawatir kesulitan menemukan restoran atau warung makan yang menyajikan hidangan halal.

Bahkan, banyak hidangan tradisional Uzbekistan yang memang berbahan dasar daging halal dan rempah-rempah yang kaya rasa. Dijamin enak dan akan ketagihan.

Pesona sejarah, alam, dan budaya di Uzbekistan memang berhasil menarik perhatian dunia. Kecantikan gurun dan berbagai desain interior bangunan unik, juga bisa ditemukan di tempat ini.

Berikut 10 Destinasi Wisata Religi yang Dapat Dikunjungi di Uzbekistan:

1. Masjid Hazrat Khizr, Samarkand

Wisata religi pertama yang bisa dikunjungi saat berada di Uzbekistan adalah Masjid Hazrat Khizr, Samarkand. Masjid ini berlokasi di pusat kota, sehingga akan sangat mudah bagi wisatawan untuk menemukan Lokasi ini.

Masjid Haazrat Khizr ini terbilang sangat tua di Uzbekistan, karena sudah

berdiri sejak abad ke-8. Selain itu, masjid ini juga hadir sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Hazrat Khizr AS.

Sebagai informasi, Nabi Hazrat Khizr AS merupakan cucu langsung dari Nabi Nuh AS. Penampilan dan desain arsitektur dari masjid ini sangat memukau.

2. Madrasah Ulugh Beg

Dinamakan Madrasah karena tempat ini adalah tempat untuk menimba ilmu,

dan sudah pasti memiliki Sejarah, serta perjalanan panjang yang berhasil menciptakan generasi-generasi luar biasa.

Di Uzbekistan terdapat sebuah situs Warisan UNESCO berupa sebuah bangunan yang dulunya adalah Madrasah Ulugh Beg. Antara tahun 1417 sampai dengan 1421 bangunan ini mulai berdiri, yang dibangun oleh Gubernur Samarkand kala itu, yaitu Ulugh Beg.

Menariknya lagi, Ulugh Beg ini merupakan salah satu cucu dari Timur yang



Kalta Minor Minaret Khiva



seorang astronom terkemuka. Tentu saja pada zamannya madrasah ini aktif menciptakan generasi-generasi muda berkualitas.

3. Kalta Minor Minaret Khiva

Kalta Minor Minaret Khiva merupakan salah satu objek wisata paling menarik di Uzbekistan, dan siapapun bisa mengunjungi tempat ini. Kalta Minor merupakan bangunan tertinggi di wilayah Khiva, bahkan di seluruh Asia Tengah ini memang sangat menarik dari sisi tampilan.

Hal ini membuatnya berhasil menarik perhatian banyak wisatawan yang

berkunjung ke Uzbekistan. Tidak hanya itu, proses pembangunannya juga berjalan cukup panjang dan telah mengalami renovasi berkali-kali yang terhenti di tahun 1855. Meskipun terhenti, tampilan dan keindahan kondisi bangunan belum selesai ini seolah menjadi magnet baru untuk para wisatawan.

4. Istana Khudayar Khan

Memiliki nama lain sebagai Mutiara Kokand, Palace of Khudayar Khan menjadi salah satu tempat wisata religi sangat menarik di Uzbekistan. Istana Khudayar Khan ini, sebenarnya merupakan tem-

pat kediaman pimpinan Kokand terakhir yaitu Khudayar Khan.

Karena keunikan, serta kemegahan dari bangunannya, tidak sedikit para wisatawan yang datang dan mampir untuk melihatnya. Proses pembangunan dimulai dari tahun 1871, penampilan eksterior dari istana ini sangat memukau dengan ubin dekoratif rumit. Skema warna kuning dan hijau khas Uzbekistan menambah keindahan pada bangunan ini.

5. Tash Khouli Palace Khiva

Kembali ke wilayah Khiva, juga terdapat sebuah objek wisata berupa Rumah



Istana Khudayar Khan

Batu yaitu Istana Tash Khouli. Ini merupakan salah satu mahakarya arsitektur terkenal di Kicha dengan pola desain menarik.

Struktur bangunan yang menggunakan berbagai elemen seperti panel Majolika, ubin keramik, kayu berukiran membuatnya sangat memukau.

Pesona dari tempat wisata ini sudah sampai di berbagai telinga wisatawan manca dunia. Sebenarnya istana Tash Khouli berfungsi sebagai tempat tinggal khan Khica bersama dengan selir selirnya. Keindahan bangunan di sini akan memberikan wawasan tambahan saat



Tash Khouli Palace Khiva



Shah I Zinda, Samarkand



Madrasah Abdulaziz Khan

berkunjung ke negara Uzbekistan.

6. Shah I Zinda, Samarkand

Tempat wisata selanjutnya adalah Shah I Zinda, yang cukup populer sebagai salah satu situs paling luar biasa di Samarkand Uzbekistan. Ini merupakan area kompleks yang memiliki masjid, makam, beserta bangunan ritual lainnya di dalamnya.

Keberadaannya sudah ada sejak abad ke-11 sampai dengan ke-15 terus ke 19. Desain eksteriornya dengan menerapkan laporan kerajinan keramik membuat bangunan ini sangat indah.

Tambahan garis garis geometris juga menjadikan bangunan ini semakin el-egan. Pola warna warni yang menghiasi

struktur bangunan menambah kemegahan dari kompleks bangunan ini.

7. Madrasah Abdulaziz Khan

Berdiri sejak tahun 1652 di wilayah Bukhara, Madrasah Abdul Aziz Khan juga jadi tempat dengan keindahan luar biasa di Uzbekistan. Pada saat pemerintah Abdulaziz Khan berkuasa, yang memiliki ketertarikan luar biasa pada ilmu pengetahuan dan pendidikan, madrasah ini pun mulai berdiri.

Daya tarik utama dari madrasah ini, ada pada pintu masuknya yang sangat menonjol. Ada hiasan keramik dengan ukiran indah dari berbagai jenis batu, majolika, dan marmar yang memukau. Penggunaan cat berwarna kuning me-

nambah daya tarik dari madrasah ini. Se-jauh ini cukup banyak wisatawan yang menghabiskan waktu di Madrasah Abdulaziz Khan.

8. Registan Square, Samarkand

Registan atau tempat persimpangan budaya merupakan salah satu kota tertua di Asia Tengah dan masuk ke dalam Situs Warisan dunia UNESCO. Adanya sejarah panjang dalam dua setengah milenium membuat tempat ini sangat populer.

Sementara itu, sejarah mengenai perdagangan jalur sutra di masa lalu yang melintasi Registan, juga menjadi daya tarik kenapa tempat ini banyak pengunjungnya.

Tak heran jika keberadaan Registan



Square menjadi salah satu daya tarik luar biasa sebagai destinasi wisata. Registan Square ini, juga terdiri dari 3 bangunan utama yaitu sekolah Islam berdesain eksterior mozaik-mozaik indah serta memukau.

9. Kompleks Hazrat Imam: Pusat Manuskrip Al Quran Kuno

Di Kompleks Hazrat Imam, para pengunjung bisa melihat salah satu manuskrip Al Quran tertua di dunia, yaitu Mushaf Utsmani. Selain itu, kompleks ini juga memiliki masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang indah, seperti Madrasah Barak-Khan dan Masjid Telyashayakh. Ini adalah tempat yang tepat untuk merasakan perpaduan antara seja-

rah dan spiritualitas.

10. Masjid Tillya Sheikh

Masjid bersejarah yang terletak di kota Samarkand. Masjid ini dibangun pada abad ke-14 dan menjadi salah satu tempat wisata religi yang populer di Uzbekistan.

Masjid Tilla Sheikh adalah sebuah masjid bersejarah yang terletak di kota Bukhara, Uzbekistan. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 oleh seorang penguasa Uzbekistan, yang bernama Abdullah Khan II, dan merupakan salah satu contoh arsitektur Islam terbaik di wilayah tersebut.

Masjid Tilla Sheikh memiliki arsitektur yang indah dengan dinding yang dihiasi

dengan keramik biru, putih, dan hijau. Di dalam masjid terdapat ruang shalat yang luas dengan enam kolom yang menggambarkan enam tiang surga dalam tradisi Islam.

Selain itu, terdapat pula sebuah kubah besar yang menutupi ruang shalat dan dihiasi dengan hiasan-hiasan kaligrafi Islam yang indah.

Masjid Tilla Sheikh juga dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir dari seorang ulama terkenal bernama Sheikh Abdullah Yamani, yang dihormati oleh masyarakat setempat. Karena sejarahnya yang kaya dan keindahannya yang menakjubkan, Masjid Tilla Sheikh menjadi salah satu tempat wisata yang populer di Uzbekistan. ♦



Kompleks Hazrat Imam: Pusat Manuskrip Al Quran Kuno



Masjid Tillya Sheikh



Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.

Peaceful Muharram 1447 H:

KEMENAG LUNCURKAN GERAKAN SADAR PENCATATAN NIKAH

Dalam rangka merayakan dan menyambut tahun baru hijriah, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan yang diberi nama 'Peaceful Muharam 1447 Hijriah'.

Program yang diluncurkan pada Minggu (6/7/2025) di area Car Free Day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta ini, bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Usai acara jalan santai melalui Sakinah Fun Walk, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, secara simbolis meresmikan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah dengan menekan tombol sirine.

Hadir dalam peresmian tersebut, yang ikut mendampingi Menag, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Abu Rokhmad; Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri-

hastuti Sulistyaningrum, serta tokoh public, Husein Ja'far Al Hadar atau yang akrab disapa Habib Ja'far.

Menag: Jangan Terbawa Budaya Barat

Dalam kesempatan tersebut, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu, penurunan angka perkawinan di Indonesia sebagai fenomena yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Biasanya 2.200.000 orang menikah setiap tahun. Kini jumlahnya menurun. Ini tidak bisa dibiarkan, karena bisa menggeser nilai-nilai budaya kita," kata Menag, Nasaruddin Umar di Jakarta, seperti dilansir dari Kemenag, Minggu (6/7/2025).

Menag kemudian membandingkan dengan kondisi di sejumlah negara Barat, seperti Prancis, Amerika, dan Kanada,

yang mengalami penurunan minat terhadap pernikahan. Bahkan, negara Prancis memberi insentif besar kepada warganya yang memilih menikah dan memiliki anak.

"Di Prancis, Bapak-Ibu sekalian, begitu rendahnya minat perkawinan, pemerintah sampai memberikan hadiah besar bagi warganya yang mau punya anak. Anak-anak yang lahir dari orang tua asli Prancis bahkan mendapat beasiswa hingga pembebasan pajak. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga pernikahan," tambah Menag.

Menag juga menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kanada, di mana praktik hidup bersama tanpa menikah sudah dianggap biasa.

"Saya pernah di Kanada, ada teman saya yang 20 tahun hidup kumpul kebo, bahkan sudah punya anak satu," ungkap Menag.



Menag tentang Pencatatan Nikah.

Menag juga menjelaskan, pencatatan perkawinan berdampak langsung terhadap hak-hak sipil. Tanpa akta nikah, seseorang tidak dapat memperoleh akta kelahiran untuk anaknya, yang berarti juga kehilangan akses terhadap kartu keluarga, KTP, dan paspor.

Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, juga rentan kehilangan hak-haknya, termasuk hak atas warisan dan tunjangan negara bagi anak ASN.

Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran Kemenag hingga ke tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk aktif memasyarakatkan pentingnya pencatatan nikah. Ia mengingatkan bahwa modernitas tidak boleh membuat masyarakat abai terhadap pernikahan yang sah.

"Jika budaya kumpul kebo dibiarkan, masa depan bangsa akan terganggu," tegas Menag.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad menambahkan, peluncuran Gerakan Sadar Pencatatan Nikah ini merupakan bagian dari kampanye nasional menjaga keluarga dan membangun masa depan bangsa.

Abu Rokhmad menyebut, kegiatan tersebut sebagai simbol jihad sosial untuk mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis.

"Dari keluarga yang kokoh, kita wujudkan Indonesia Emas 2045," ungkap Abu Rokhmad.

Abu juga mengajak generasi muda yang telah memenuhi syarat usia menikah, minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang, untuk tidak ragu mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Ia mengatakan, bahwa pencatatan pernikahan adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dan juga anak-anak.

"Negara hadir untuk melindungi, bukan menghalangi. Mari kita wujudkan keluarga yang sah, kuat, dan bermartabat," pesan Abu Rokhmad.

Urgensi Pencatatan Nikah

Menag menekankan bahwa pencatatan nikah secara resmi di Indonesia sangat penting. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Agama, pusat dan daerah, untuk aktif mengedukasi masyarakat bahwa urgensi pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak keluarga.

"Saya mohon betul Kementerian Agama dan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan," ujar Menag Nasaruddin.

Menag mengaku heran, karena masih ada sejumlah pihak yang menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan enggan mencatatkan pernikahan. Sebab, pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), saat ini tidak lagi dipungut biaya alias gratis.

Bahkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), juga

menjalankan program nikah massal gratis bagi masyarakat. Program ini memberikan fasilitas pernikahan lengkap tanpa biaya, bahkan termasuk pakaian pengantin, salon, hingga mahar.

Lebih lanjut Menag mengungkapkan, bahwa program nikah massal ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan pernikahan.

Menag juga mengatakan, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi bagian dari identitas budaya bangsa. Ia mengingatkan masyarakat, agar tidak meniru praktik-praktik pernikahan yang bertentangan dengan nilai dan norma Indonesia.

"Kita harus menjaga budaya kita sendiri. Jangan sampai terjadi westernisasi kebudayaan kita dalam hal perkawinan," pungkask Menag.

Pasangan Nikah Massal Ikuti Bimbingan Perkawinan

Masih dalam semangat menyambut Tahun Baru Islam 1447 H dan masih terkait soal pencatatan pernikahan, Kementerian Agama (Kemenag) juga menggelar Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi 100 pasangan suami istri. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada 3-4 Juli 2025, di Jakarta, sebagai lanjutan dari perhelatan nikah massal yang sebelumnya

digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Peaceful Muharam ini, adalah bertujuan untuk mempersiapkan pasangan pengantin, agar lebih siap menjalani kehidupan pernikahan secara lahir dan batin, serta mewujudkan keluarga yang harmonis, kuat, dan sejahtera.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, juga

catatan pernikahan secara resmi, agar pasangan suami istri dan anak-anak mereka terlindungi secara hukum oleh negara.

"Pernikahan yang tercatat memiliki bukti legal, yaitu buku nikah, yang akan melindungi keluarga di masa depan. Ini penting, dan perlu disampaikan juga kepada masyarakat sekitar, agar sadar betapa pentingnya pencatatan nikah," imbuh Abu Rokhmad.

sar para nabi," jelasnya.

Cecep juga mengungkapkan, untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, dibutuhkan bekal ilmu dan keterampilan, terutama dalam hal komunikasi, pengelolaan keuangan, kesehatan, hingga psikologi keluarga.

"Karena itu, pemerintah menghadirkan program Bimwin (Bimbingan Perkawinan). Materi yang disampaikan sangat



Menteri Agama, Nasaruddin Umar dan Anak Yatim.

ikut menyampaikan, bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran agama yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

"Pasangan ini sedang menjalankan syariat. Nikah itu jalan hidup, sunnah, dan ajaran. Maka pernikahan harus dilakukan, bukan ditakuti. Jangan bilang marriage is scary. Justru banyak keberkahan yang lahir dari pernikahan," kata Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

la juga menekankan, pentingnya pen-

Sementara itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar, menekankan makna pernikahan dalam pandangan Islam. Ia pun mengutip Al Quran yang menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalizha atau perjanjian yang kokoh.

"Istilah mitsaqan ghalizha hanya disebutkan dalam tiga konteks: para Nabi Ulul Azmi, Bani Israil, dan pernikahan. Artinya, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat agung, setara dengan amanah be-

lengkap dan relevan untuk kehidupan berumah tangga," pungkas Cecep.

Peaceful Muharram 1447 H: Kemenag Berlebaran dengan Anak Yatim dan Disabilitas

Menyambut tahun baru Hijriah 1447, Kementerian Agama (Kemenag) RI, menggelar acara lebaran anak yatim dan disabilitas dalam acara yang diberi nama "Lebaran Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas", yang digelar di Auditorium HM

Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (4/7/2025) petang.

Gelak tawa anak-anak dan kebahagiaan mereka pun mengisi setiap sudut Auditorium HM Rasjidi. Ini bukan kebisingan biasa, melainkan suara kebahagiaan murni yang merayakan datangnya tahun baru hijriah.

Ratusan wajah ceria dari berbagai penjuru Indonesia pun, memancarkan se-

terpendam dan keceriaan mereka dalam pentas seni kreatif yang memukau.

Salah satu momen yang paling dinanti adalah kehadiran Dani Aditya, seorang konten kreator difabel, yang kisahnya telah menginspirasi banyak orang. Dengan penampilannya, Dani sekali lagi membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya dan memberikan dampak positif. Ia adalah potret

lain adalah malaikat maut.

“Jangan anggap enteng mereka yang tampak lemah,” ujar Menag Nasaruddin berpesan.

“Karena bisa jadi, di balik kelemahan itu tersimpan kekuatan dan kebenaran,” imbuah Menag.

Sebuah petuah yang menancap, mengingatkan kita akan kebijaksanaan yang seringkali lahir dari kesederhanaan.



Menteri Agama, Nasaruddin Umar dan Anak Yatim.



Kemenag dan anak-anak yatim.

mangat dan harapan, mengubah ruang itu menjadi panggung kebersamaan yang hangat dan penuh cinta.

Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari program “Peaceful Muharam” besutan Ditjen Bimas Islam Kemenag ini, anak-anak istimewa ini tak hanya menjadi tamu, tapi juga disuguhkan beragam penampilan yang tak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi.

Bahkan, beberapa di antaranya berani unjuk kebolehan, menampilkan bakat

nyata bahwa semangat tak pernah mengenal batas, mampu menerobos segala rintangan.

Pesan Kebijakan dan Pelukan Kebersamaan

Suasana hening menyelimuti ruangan, saat Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyampaikan tausiyahnya. Ia mengisahkan cerita dari kitab Irsyadul ‘Ibad tentang seorang raja zalim yang ajalnya dijemput oleh kakek tua, yang tak

Kemenag juga memanfaatkan kesempatan ini, untuk memberikan ‘Piagam Kolaborator Terbaik’ sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi luar biasa dalam program-program mereka. Ini adalah simbol terima kasih atas sinergi dan kepedulian yang telah terbangun.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Syafi’i, tak bisa menyembunyikan rasa terharunya.

“Saya sampai kehilangan banyak kata,

tidak bisa berpidato lagi karena kegembiraan luar biasa yang saya rasakan," kata Wamenag Romo, dengan suaranya bergemuruh.

"Selamat untuk para guru dan pengasuh, kalian pahlawan Bangsa. Membangun Indonesia dengan anak-anak yang luar biasa hebat," tambah Wamenag.

Sedangkan Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengungkapkan, acara 'Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas' ini dihadiri 550 peserta secara luring.

Kegiatan serupa juga digelar serentak di seluruh Kantor Kemenag se-Indonesia. Abu Rokhmad menyatakan, ada dua juta anak yatim dan penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dari Kemenag.

Program kolaborasi antara Kemenag, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan

hangatan yang begitu terasa. Guyonan dari Menag pun ikut meramaikan suasana, menciptakan atmosfer cair dan bersahabat.

Di penghujung acara, Menag mengajak seluruh anak-anak untuk mendoakan kebaikan para donatur.

"Mari anak-anakku semua, kita doakan untuk donatur yatim piatu di seluruh Indonesia. Doakan mereka agar kebaikannya dibalas Allah SWT, insyaallah doanya anak yatim itu makbul," pungkas Menanya.

Hari itu, Auditorium HM Rasjidi bertransformasi menjadi ruang penuh cinta, tawa, dan harapan. Karena di balik setiap senyum yang terpancar, tersirat masa depan Indonesia yang penuh cahaya dan mimpi-mimpi besar dari mereka, anak-anak istimewa.

Bingkisan tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar kepada 18 anak perwakilan dari 18 lembaga mitra. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan 'Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2025', yang mengusung tema 'Satu Kesejahteraan, Sejuta Harapan, Meraih Kebahagiaan', yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/7/2025).

Menag Nasaruddin Umar menyebut, bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian dan solidaritas.

"Lebaran yatim ini luar biasa. Dalam tempo singkat, terkumpul dana sebesar lebih dari Rp 309 Miliar. Dana ini disalurkan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di



Kemenag Salurkan bantuan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini, telah menyalurkan bantuan senilai Rp 310 miliar, bagi anak yatim dan penyandang disabilitas se-Indonesia.

Abu Rokhmad menyebut, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kolaborasi dan kepedulian yang luar biasa untuk mereka yang paling membutuhkan.

Acara semakin meriah dengan sesi doorprize, dimana anak-anak tampak begitu santai, namun penuh antusias menjawab pertanyaan dari Menag. Jawaban lugu khas anak-anak pun memenuhi ruangan dengan tawa, menciptakan ke-

Kemenag Salurkan Bantuan Senilai Lebih Rp 310 Miliar

Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkolaborasi menyalurkan dua juta paket bingkisan senilai total Rp 310,8 Miliar kepada anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Bantuan masif ini, yang meliputi santunan tunai, sembako, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Jakarta. Ini bukti bahwa bangsa ini masih punya rasa untuk membela anak-anak yatim," ungkap Menag dalam Konferensi Pers 'Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas' di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, penyaluran dua juta bingkisan ini merupakan bukti nyata kekuatan kolaborasi antarlembaga.

"Kolaborasi ini bukan tentang siapa yang menonjol, tetapi tentang bagaimana kita hadir bersama, memberi makna dan

harapan,” ungkap Wamenag.

Ia menambahkan, inisiatif ini mencerminkan bahwa negara, umat, dan masyarakat sipil dapat bersatu padu untuk mengangkat harkat anak-anak yang hidup dalam keterbatasan.

“Lebaran Yatim ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan nasional yang berbasis kasih sayang dan solidaritas. Dua juta bingkisan ini menunjukkan bahwa negara, melalui Kemenag, mampu hadir di tengah-tengah anak bangsa,” pungkasnya.

Jumlah Penerima Bantuan di Berbagai Provinsi

Penyaluran bingkisan untuk anak-anak yatim ini, menjangkau seluruh pelosok negeri, dengan beberapa provinsi mencatat jumlah penerima manfaat tertinggi.

disabilitas, dengan total 77.101 bingkisan dan nilai penyaluran sebesar Rp 6.798.500.000.

Sementara di Jawa Tengah, 30.440 anak yatim dan 3.180 penyandang disabilitas menerima bantuan, dengan jumlah bingkisan sebanyak 33.572 paket senilai Rp 9.659.474.200.

Sementara itu, di Sumatra Utara (Sumut), tercatat 22.086 anak yatim dan 1.945 penyandang disabilitas menerima 171.877 bingkisan dengan nilai total Rp 48.042.920.675.

Di Sulawesi Selatan (Sulsel), bantuan disalurkan kepada 21.155 anak yatim dan 2.398 penyandang disabilitas dengan jumlah 23.867 bingkisan senilai Rp3.029.086.500.

- Gerakan Sosial Berlandaskan Nilai Spiritual

dan disabilitas adalah bagian dari ajaran agama. Penyaluran paket ini menjadi bagian dari gerakan sosial berlandaskan nilai spiritual,” kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad.

Selain penyaluran bantuan, Kemenag juga menayangkan video dokumenter berjudul “Jejak Kebaikan Zakat dan Wakaf”, yang menampilkan dampak nyata program zakat dan wakaf di berbagai penjuru Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenag turut memberikan penghargaan kepada mitra kolaborator terbaik dalam program zakat dan wakaf sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memperluas jangkauan manfaat.

Acara ini semakin meriah dengan Panggung Ekspresi, di mana anak-anak yatim dan penyandang disabilitas tampil mem-



Santunan anak yatim Wamenag, Romo Syafii.

Wilayah dengan jumlah penerima manfaat tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan total 246.214 anak yatim dan 8.373 penyandang disabilitas.

Sebanyak 403.808 bingkisan disalurkan, dengan total nilai penyaluran mencapai Rp128.232.638.630. Sementara itu, di DKI Jakarta, bantuan diberikan kepada 100.121 anak yatim dan 3.969 penyandang disabilitas, dengan total 101.161 bingkisan senilai Rp38.052.564.389.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan kepada 78.107 anak yatim dan 441 penyandang

Terkait lembaga mitra penyalur dalam program ini sangat beragam, terdiri dari BAZNAS RI, BAZIS DKI Jakarta, UPZ Kemenag RI, LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Zakat, LAZ Yatim Mandiri, LAZ BMH, Rumah Yatim, serta lebih dari 2.000 lembaga lainnya dari unsur pusat hingga daerah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk nyata dari misi keagamaan yang diwujudkan dalam tindakan sosial.

“Momentum 10 Muharam adalah pengingat bahwa memperhatikan anak yatim

bawakan pertunjukan seni yang memukau, seperti perkusi dari barang bekas, seni angklung, dan tari saman.

Yang tak kalah menariknya adalah penampilan Rara Sudirman, finalis Indonesian Idol musim ke-13, yang turut hadir menghibur dan bernyanyi bersama anak-anak, menambah keceriaan suasana.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban sesaat, tetapi juga menumbuhkan rasa dihargai dan diperhatikan bagi anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh penjuru negeri,” pungkas Abu Rokhmad. ♦



Tiga Terobosan Haji 2025: LEBIH TERBUKA, TERJANGKAU, DAN KOMPETITIF

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 telah selesai dan mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan perdana yang menjadi tonggak pembaruan layanan jamaah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah-langkah strategis: mulai dari keterbukaan informasi jamaah haji khusus, efisiensi pemanfaatan dana haji, hingga peningkatan layanan yang lebih kompetitif melalui skema multi syarikah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief menyatakan, bahwa ketiga langkah tersebut, bukan sekadar inovasi administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam tata kelola haji.

"Ini langkah progresif dalam tata kelola haji, dari yang semula cenderung tertutup dan sentralistik, menjadi lebih terbuka, adil, dan partisipatif," kata Dirjen PHU, Hilman Latief di Jakarta, seperti dilansir dari Kemenag, Sabtu (5/7/2025).

Lebih lanjut, pria yang sudah empat kali

menahkodai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini, menguraikan tiga hal perdana tersebut.

1. Daftar Nama Jamaah Haji Khusus Dipublikasikan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah secara resmi mengumumkan daftar nama jamaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun 1446 H/2025 M. Daftar ini diumumkan pada 23 Januari 2025.

"Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jamaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka," kata Hilman.

Langkah transparansi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, yang menyoroti minimnya pengawasan publik terhadap distribusi kuota haji khusus. Selama ini,

kata Hilman, daftar nama jamaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Namun mulai tahun ini, daftar nama jamaah haji khusus diumumkan secara terbuka.

"Sehingga, semua jamaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi," lanjut Hilman.

Tahun ini, pelunasan biaya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung 24 Januari - 7 Februari 2025, dan tahap kedua 14 - 21 Februari 2025. Sebanyak 14.467 jamaah melunasi pada tahap pertama, disusul 1.838 jamaah pada tahap kedua, hingga seluruh kuota 16.305 jamaah terpenuhi.

"Sebagai bentuk transparansi, di akhir masa pelunasan, kami juga merilis nama-

nama jamaah yang sudah melunasi. Ini adalah bagian dari akuntabilitas kami kepada publik," ungkapnya.

2. Efisiensi Dana Haji

Dari sisi pendanaan, tahun ini Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M, dengan rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.

Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp 4.000.027,21 dibanding rerata BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah juga turun. Rata-rata peng-

gunaan nilai manfaat per jamaah pada 2024 sebesar Rp 37.364.114,40. Namun tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jamaah sebesar Rp 33.978.508,01.

Meski demikian, kualitas layanan tidak mengalami penurunan. Dirjen PHU Hilman Latief mengungkapkan, misalnya, jamaah tetap mendapatkan tiga kali makan per hari selama di Makkah, termasuk layanan makanan siap saji (ready to eat atau RTE), serta menu bercita rasa Nusantara yang disesuaikan dengan selera jamaah Indonesia.

3. Skema Multi Syarikah

Tujuannya adalah mengakhiri ketergantungan terhadap satu penyedia layanan, yang selama ini menimbulkan risiko monopoli dan keterbatasan pilihan. Dengan adanya multi syarikah, sistem menjadi lebih kompetitif dan memungkinkan peningkatan kualitas layanan.



Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jamaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka.

Skema ini sempat memunculkan dinamika teknis di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kloter yang terdiri dari berbagai syarikah. Namun tantangan tersebut berhasil dimitigasi secara efektif, melalui sistem koordinasi terpadu antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Apresiasi terhadap keberhasilan ini, disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, saat berkunjung ke kantor PPIH Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah.

"Saya menyampaikan tahniah kepada jamaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan ibadah dengan aman dan nyaman. Haji 1446 H ini sukses, dan kami

memahami adanya catatan teknis mengingat besarnya jumlah jamaah Indonesia. Tapi semua dapat diantisipasi, tanpa menimbulkan krisis," kata Wamenhaj Mashat.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman atas arahnya dalam peningkatan mutu layanan haji.

Apresiasi senada juga disampaikan Dr. Eyad Rahbini, Asisten Deputi Operasional Haji Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dalam kunjungannya ke Daker Makkah.

Menurutnya, sistem koordinasi terpadu antara PPIH Arab Saudi, delapan syarikah, dan Kementerian Haji, menjadi kunci suksesnya pengelolaan multi syarikah tahun ini.

"Komposisi kloter yang kompleks berhasil diatasi dengan sistem operation room (koordinasi terpadu) yang solid. Ini menunjukkan kemitraan yang sangat efektif antara Indonesia dan Arab Saudi," kata Eyad.

Masa Depan Haji Indonesia

Ketiga terobosan tersebut, mencerminkan arah baru penyelenggaraan haji Indonesia, yang lebih transparan, efisien, dan berbasis prinsip keadilan pelayanan.

Pemerintah berkomitmen agar ibadah haji menjadi hak semua umat Islam, bukan hanya bagi yang memiliki akses dan kemampuan ekonomi lebih.

"Dengan keterbukaan informasi, tata kelola yang sehat, dan kerja sama erat lintas negara, Haji Indonesia 2025 diharapkan menjadi fondasi kuat menuju pelayanan haji yang semakin modern dan bermartabat," ungkap Dirjen PHU, Hilman Latief. ♦



GAMBO MUBA BERSINAR DI PUNCAK HUT DEKRANAS BALIKPAPAN

Semarak Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-45 yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi panggung bagi para perajin terbaik dari seluruh penjuru tanah air. Salah satunya kerajinan kain tenun Gambo yang menjadi pakaian khas Kabupaten Musi Banyuasin.

Acara puncak HUT Dekranas yang dipusatkan di BSCC Dome Balikpapan pada 9 Juli 2025 dibuka dengan meriah, menampilkan tarian Selamat Datang "Paser Pesisir" dan musik tradisional Jantung Utang sebagai wujud kekayaan budaya Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dekranas Pusat Ibu Selvi Gibran Rakabuming, para istri menteri Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Organisasi Seruni, serta seluruh Ketua Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/

Kota se-Indonesia serta Ketua Dekranasda Muba, Hj. Patimah Toha,

Dalam puncak peringatan ini, Ketua Dekranasda Muba bersama rombongan Dekranasda lainnya juga mengikuti sejumlah agenda penting seperti jamuan makan malam (gala dinner), kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka aksi penanaman pohon serta peninjauan langsung ke lokasi pengembangan IKN.

Selain itu, Ketua Dekranasda Muba juga mengunjungi berbagai booth pameran



UMKM, bazar, dan side event yang menjadi bagian dari perayaan ini.

Tak hanya hadir, Dekranasda Musi Banyuasin juga turut ambil bagian dalam Expo Dekranasda yang berlangsung selama tiga hari. Dalam kesempatan ini, produk unggulan Gambo Muba kembali mencuri perhatian pengunjung.

Kain tenun khas Kabupaten Musi Banyuasin ini mengusung konsep ramah lingkungan tersebut dipamerkan dalam stand

Dekranasda Sumatera Selatan dan menjadi salah satu produk yang paling diminati.

Ketua Dekranasda Muba, Hj. Patimah Toha, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini.

Ia mengungkapkan bahwa momen ini bukan hanya ajang promosi, namun juga ruang pembelajaran untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk kerajinan lokal.

"Melalui HUT Dekranas ke-45 ini, kami ingin membuktikan bahwa produk Musi Banyuasin, khususnya Gambo Muba, mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. Saya sangat mengapresiasi para pengrajin yang terus berinovasi, menjaga kualitas, dan mengangkat warisan budaya lokal agar makin dikenal luas," tandas Hj. Patimah Toha.

Bangga Muba Ikut Serta

Kabupaten Muba menjadi salah satu perwakilan Sumatera Selatan di pameran HUT ke-45 Dekranas di Balikpapan.

Atas kegiatan ini, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Muba, Hj Patimah Toha menyampaikan rasa bangganya atas keikutsertaan Muba dalam momen nasional bergengsi ini

"Kami sangat antusias dapat berpartisipasi dalam pameran HUT ke-45 Dekranas ini. Ini bukan hanya soal memamerkan kerajinan, tetapi juga menunjukkan identitas budaya daerah dan semangat pemberdayaan UMKM di Muba," ungkap Hj Patimah Toha.

Gelaran Pameran Hari Ulang Tahun ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 yang dipusatkan di Halaman Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) atau Gedung Dome Balikpapan Kalimantan Timur, ditutup secara resmi Mendagri Tito Karnavian.

Kegiatan yang berlangsung sejak 9 Juli ini menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan keragaman kriya Nusantara, termasuk dari Kabupaten Muba yang turut tampilkan produk-produk unggulan khas daerahnya.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahnya menekankan pentingnya kerajinan sebagai bagian dari sektor UMKM, yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"UMKM, termasuk kerajinan tangan, terbukti tangguh menghadapi krisis. Di saat sektor pariwisata dan industri besar terpukul, sektor ini tetap bergerak karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," ujar Tito.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah sukseskan HUT ke-45 Dekranas, khususnya Pemerintah Kota Balikpapan, Dekranasda Provinsi dan Kota, serta para pengrajin yang turut berpartisipasi.

"Kegiatan nasional sebesar ini bukan hal yang mudah. Saya sangat menghargai kerja keras seluruh panitia dan pemerintah daerah. Semoga semua yang tela dilakukan memberi manfaat besar bagi masyarakat dan pelaku kerajinan di daerah," pungkas Tito. ♦



KOMITMEN WUJUDKAN PEMERINTAHAN BERSIH

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang maju dan sejahtera adalah salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal itu menjadi komitmen Bupati Muba HM Toha.

Salah satu untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik curang.

Rapat Koordinasi tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, dan diikuti seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.

Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komit-

publik. Jika kita bekerja secara konsisten dan integritas menjadi prinsip utama, maka cita-cita Indonesia bebas korupsi di tahun 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil," ujar Johanis Tanak.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha di sela kegiatan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Muba di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rohman mempunyai komitmen tinggi untuk terus melakukan pengawasan internal dan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen Pemkab Muba dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi akan terus kami



men bersama antar pemerintah daerah dan KPK merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Kita berharap sinergi antara KPK dan pemerintah daerah terus diperkuat, agar budaya anti korupsi dapat tertanam dan menjadi pondasi dalam setiap kebijakan

tingkatkan. Transparansi menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah," tegas Bupati Toha.

Untuk itu Toha menyambut baik rakor ini, dan menilai kegiatan ini merupakan upaya preventif yang sangat penting guna menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh daerah, ter-

masuk Kabupaten Muba

"Sinergi yang kuat bersama KPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berkualitas," pungkasnya.

Siap Entaskan Kemiskinan dan Dukung Asta Cita Presiden

Di sisi lain Pemkab Muba juga terus menggenjot program kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai wujud keseriusan tersebut, Sekretaris Daerah Muba Dr Apriyadi mengikuti sosialisasi tentang penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim secara virtual.

"Pemerintah daerah juga perlu mengukur kinerja sejauh mana implementasi program dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem



Sinergi yang kuat bersama KPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berkualitas.

di daerah masing-masing," ungkap Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir Restuardy Daud MSc.

Ia mengungkapkan, setiap tahun Pemerintah pusat juga memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah yang berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Sebagaimana kita ketahui, reward tersebut berupa insentif fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim," urainya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Muba Dr Apriyadi mengungkapkan isu kemiskinan di Muba masih menjadi prioritas untuk ditanggulangi melalui program-program Pemkab Muba.

"Program kerja kedepan pak Bupati Toha dan Wakil Bupati Rohman juga memfokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," tandasnya. ♦





MEMBANGUN MUBA DENGAN KEIMANAN

Untuk menciptakan Muba maju dan sejahtera lebih cepat, perlu menggalang semua unsur dan kalangan tanpa terkecuali para ulama dan pondok pesantren. Agar semuanya ikut terlibat, Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman cukup intens melakukan berbagai kunjungan kegiatan keagamaan hingga ke desa-desa.

Seperti yang dilakukan saat mengunjungi warga Kecamatan Tungkal Jaya yang tampak antusias menyambut kehadiran Wakil Bupati Muba Kiyai Rohman dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam 1447 H / 2025 M sekaligus penyerahan santunan untuk anak yatim piatu.

Ribuan warga hadir hingga suasana berlangsung semarak dan sukses meski diadakan di lapangan sepakbola Desa Pandan Sari.

Suasana religius dan penuh kehangatan menyelimuti jalannya acara yang digelar oleh masyarakat dan pihak panitia tersebut. Acara ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, namun juga sebagai wujud nyata kepedulian sosial melalui pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu.

Mewakili Bupati HM Toha, Wabup Rohman menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif dan kekompakan masyarakat Desa Pandan Sari yang telah menyelenggarakan kegiatan bernuansa spiritual dan sosial ini.

"Tahun Baru Islam bukan sekadar pergantian angka dalam kalender hijriyah, melainkan momen refleksi untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat," tegas Rohman

la menambahkan, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis dalam mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat semangat gotong royong, serta menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur di tengah kehidupan masyarakat Muba.

Wabup juga menegaskan bahwa Pemkab Muba sangat mendukung setiap bentuk kegiatan keagamaan dan sosial yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

"Mari kita jadikan Tahun Baru Islam ini sebagai titik awal untuk lebih mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas keimanan, dan bersama-sama membangun desa serta Kabupaten Musi Banyuasin yang maju lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu, Camat Tungkal Jaya Yudi Suhendra menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran langsung Wakil Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba dalam kegiatan tersebut.

"Kehadiran Wakil Bupati dan jajaran rombongan menjadi penyemangat dan bentuk nyata bahwa Pemkab Muba selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan keagamaan dan sosial," pungkasnya.

Jadi Pilar Keteladanan

Wabup Rohman juga melakukan kunjungan ke Desa Bumi Kencana, Kecamatan

Sungai Lilin untuk meresmikan Gedung Ranting Nahdlatul Ulama (NU Center) sekaligus menghadiri Pengajian Rutin Fatayat, Muslimat, dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor se-Kecamatan Sungai Lilin.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Wabup Rohman didampingi kepala Dispopar M Fariz, Kepala Dinas PUPR Alva Elan, disambut hangat Camat Sungai Lilin Irfan Afriadi, Forkopimcam, para kepala desa, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Mewakili Bupati HM Toha, Wabup Rohman mengatakan bahwa Kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat, menurutnya, menjadi perekat sosial dan peneduh umat di tengah tantangan zaman.

"Gedung ini bukan sekadar simbol fisik kemajuan organisasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keagamaan, sosial, dan pemberdayaan umat. Saya yakin, dari



Mari rawat dan manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

sinilah lahir pemikiran-pemikiran besar untuk kemaslahatan masyarakat," ujar Wabup Rohman dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa NU telah berperan aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"NU adalah organisasi dengan toleransi tinggi. Keberadaannya membawa kesejahteraan dan kedamaian. Lagu 'Yalal Wathon' yang dimiliki NU pun menjadi pemantik semangat nasionalisme," tambahnya.

Wabup juga mengapresiasi kegiatan pengajian rutin yang digelar secara konsisten oleh NU dan badan otonomnya.

Menurutnya, forum-forum seperti ini penting dalam menjaga nilai-nilai Islam yang moderat, penuh kasih sayang, serta mendorong terwujudnya masyarakat religius yang toleran.

"Mari rawat dan manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Pemkab Muba berkomitmen penuh untuk melayani dan menjalankan amanah demi menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," tegasnya.

Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sungai Lilin, H. Yulis Siriziq, mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah,

terutama para kades, camat, dan tokoh masyarakat yang selama ini turut serta memajukan kegiatan keagamaan di wilayahnya.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba atas dukungan nyata terhadap peresmian Gedung Ranting NU (NU Center) ini.

Pada kesempatan ini, Wabup Rohman

juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat, sebagai wujud nyata kepedulian Pemkab Muba terhadap kesejahteraan warga.

Bantuan tersebut antara lain berupa program bedah rumah bagi warga Desa Mekar Jadi atas nama Admi dan warga Desa Sumber Rejeki atas nama Ahmad Saipudin Zuhri, bantuan kursi roda, bantuan kambing ternak, bantuan pembangunan MCK, serta penyaluran Dana Desa. ♦





PEMDA BERSAMA APARAT HUKUM WAJIB TEGAKKAN SANKSI BAGI ORMAS

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) wajib mematuhi semua aturan yang berlaku, tanpa terkecuali. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan bahwa Pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang bertindak di luar aturan hukum.

Untuk itu sudah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di mana ia menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti pembentukan Satgas tersebut agar dapat dilaksanakan pula oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, ke-

mudahan cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum," ujar Bima sebagai narasumber pada program talkshow stasiun televisi nasional bertajuk Kontroversi: "Ormas Semakin Panas" yang diikutinya secara virtual dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) akhir bulan lalu.

Ia membeberkan, Satgas tersebut memiliki kewenangan untuk menindak secara tegas ormas yang melanggar aturan. Selain itu, Satgas di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran serius seperti kekerasan fisik dan sebagainya.

Kemendagri terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat



terkait pelanggaran oleh ormas.

Sanksi Mulai dari Pencabutan Izin Ormas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sanksi bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pelanggaran bervariasi. Sangat mungkin diberlakukan sanksi mulai dari administratif, pidana, hingga pembubaran. Namun, ia menekankan bahwa sistem perizinan ormas terbagi pada dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kementerian Hukum.

Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan. Sementara untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum, yayasan, ataupun per-

kumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

“Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” tambahnya.

Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum. Selain itu, hingga saat ini beberapa kepala daerah telah mengambil langkah tegas dalam menindak ormas yang melanggar hukum.

“Ada saatnya untuk merangkul, mengkomodir, membina gitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham, semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah melewati batas,” tandas Bima. ♦



JUDOL DAN PINJOL PERAMPOK MASA DEPAN GENERASI BANGSA

Sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua fenomena berbahaya yang terus mengintai: Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Keduanya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan pribadi, rumah tangga,

tatanan sosial masyarakat, bahkan mengancam masa depan bangsa.

Judi online berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji "kemenangan instan".

Padahal, di balik layar, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

Di sisi lain, seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi, layanan pinjaman digital memang menjadi alternatif. Namun, banyak masyarakat terge-



lincir ke dalam jerat pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjol ilegal menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat, namun menerapkan bunga mencekik dan denda harian yang tak masuk akal. Selain itu, praktik intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga teror psikologis kepada peminjam dan keluarganya kerap terjadi.

Banyak kasus menunjukkan, peminjam yang awalnya hanya butuh dana Rp500 ribu, berakhir harus membayar hingga belasan juta rupiah dalam hitungan minggu. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih jalan tragis karena tekanan yang tak tertahankan.

Judol dan Pinjol, Duet Dahsyat Berujung Maut

Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal bagaikan dua sisi mata uang, keduanya kerap hadir bersamaan dalam siklus yang menciptakan kehancuran finansial dan mental.

Judol menawarkan harapan semu akan kekayaan instan. Dalam satu klik,



Namun, banyak masyarakat tergelincir ke dalam jerat pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

seseorang bisa “bermain” dengan uang dan berharap hasil besar dalam waktu singkat. Sayangnya, seperti semua bentuk judi, sistem ini dirancang agar pemain lebih sering kalah. Akibatnya, uang habis, utang menumpuk, dan mental tergun-cang.

Ketika dana habis dan kecanduan sudah terlanjur mengikat, banyak orang beralih ke pinjol ilegal demi “modal bermain” berikutnya. Pinjol ilegal, yang menawarkan pencairan cepat tanpa prosedur rumit, menjadi pilihan instan—dan jebakan berikutnya. Bunga tinggi, ancaman sebar data, dan tekanan dari debt

collector virtualmenciptakan mimpi buruk yang tak berkesudahan.

Di sinilah terlihat jelas: judul dan pinjol ilegal bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Yang satu menarik korban ke dalam ilusi kekayaan, yang lain menjebakannya dalam utang dan ketakutan.

Yang paling mengkhawatirkan, korban kedua praktik ini tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi tertentu. Mulai dari pelajar, pekerja kantor, ibu rumah tangga, hingga pensiunan—semua rentan jika tidak memiliki literasi digital dan finansial yang memadai.

Banyak kisah tragis bermula dari “sekadar coba-coba”. Bermain judol demi iseng, meminjam online demi kebutu-

han mendesak. Namun dalam hitungan minggu, mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah, baik judul maupun pinjol ilegal telah menyeret generasi muda, yang menjadi aset bangsa, masuk ke dalam lingkaran setan. Tidak sedikit anak-anak usia sekolah terjebak di dalam lingkaran setan itu. Tentunya hal ini sangat mengancam keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia.

Hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa transaksi judol telah dilakukan oleh anak-anak berusia sejak 10 tahun di Indonesia. ♦



SEMUA ILLEGAL DRILLING AKAN DILEGALKAN DENGAN ATURAN INI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Regulasi terbaru ini mengatur terkait dengan kerja sama sumur minyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); kerja sama operasi/teknologi; dan kerja sama pengusahaan sumur tua.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, aturan ini dibentuk untuk mendukung ketahanan energi nasional, sebagai salah satu upaya mencapai swasembada energi. Melalui beleid ini, Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki Wilayah Kerja untuk terus meningkatkan

produksi.

"Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk ketahanan energi dan juga bagaimana kita swasembada energi, mau tidak mau kita harus melakukan peningkatan produksi. Kita mendorong perusahaan-perusahaan KKKS yang sudah diberikan konsesi wilayah kerja bisa meningkatkan produksi," ujar Yuliot pada Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

Wamen Yuliot juga menyoroti sumur minyak dan gas bumi (migas) yang diusahakan oleh masyarakat. Dari sumur-sumur yang dikelola masyarakat terse-





but terdapat potensi penambahan lifting minyak sebanyak 10-15 ribu barel per hari.

"Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15 ribu. Tetapi target optimis dari kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari," katanya.

Kabar Gembira bagi Masyarakat Daerah

Aturan baru ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat di daerah-daerah penghasil minyak dan gas (migas), salah satunya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pemkab Muba mencatat saat ini ada 12.000an sumur minyak yang dikelola rakyat di daerah tersebut dan mayoritasnya ilegal.

Dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM ini, sumur-sumur migas masyarakat itu akan dilegalkan. Semuanya akan dinaungi oleh BUMD/Koperasi/UMKM, melalui kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot menjelaskan, untuk pembentukan UMKM dapat dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam Wilayah

Kerja (WK) tersebut.

Kemudian untuk Koperasi, beranggakan masyarakat pengelola sumur, dan dapat dilakukan juga penghimpunan kegiatan usaha oleh BUMD.



Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15 ribu. Tetapi target optimis dari kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari.

Selain kerja sama dengan sumur minyak masyarakat, beleid ini juga mengatur kerja sama antara kontraktor suatu wilayah dengan mitra, melalui kerja sama operasi ataupun kerja sama teknologi.

Untuk skema kerja sama sumur, melalui aturan ini, mitra diberikan imbalan 70 persen dari harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Sementara untuk skema kerja sama lapangan/struktur, mitra diberikan imbalan 85% dari jatah bagi hasil KKKS.

"Ini bisa di sumur atau lapangan yang ideal, kemudian bisa juga di sumur lapangan yang berproduksi, mitra menanggung investasi dan biaya, dan risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama dengan perusahaan KKKS ini," jelasnya.

Aturan ini juga mengatur kerja sama perusahaan sumur tua, yang akan dilakukan oleh BUMD/Koperasi kepada KKKS rekomendasi Bupati yang disetujui Gubernur.

Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Saat ini masih terdapat 1.400 sumur tua yang berkontribusi pada penambahan produksi sebesar 1.600 barel per hari dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. ♦

MENSOS: DTSEN BUKAN SEKADAR ANGKA, MELAINKAN HARAPAN RAKYAT!

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang karib disapa Gus Ipul menegaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN adalah pondasi keadilan dan martabat. Data ini bukan sekadar angka, tetapi wajah dan harapan jutaan rakyat di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Gus Ipul di hadapan 518 kepala dinas sosial (Kadinsos) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Bahwa setiap rupiah bantuan, setiap program pemberdayaan, setiap langkah kebijakan kesejahteraan sosial, harus sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," kata Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat tinggi madya Kemensos.

Sebanyak 518 Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang terdiri dari 34 Kepala Dinas Sosial Provinsi dan 484 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan ini. Gus Ipul menegaskan kegiatan ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto juga berpesan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Kata kunci untuk menjawab hal ini

adalah DTSEN serta permutakhirannya secara berkala, sebagai basis acuan penyaluran bansos dan program-program pemberdayaan lainnya.

"Kita menyelenggarakan Rakornas dalam rangka untuk menyatukan pemahaman, persepsi terhadap Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujarnya.

DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Data ini adalah gabungan dari tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Gus Ipul menjelaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 bukan aturan tapi panggilan sejarah yang menuntut Kemensos dan Dinsos di daerah bekerja sungguh-sungguh menuntaskan kemiskinan.

Dinsos Harus Jadi Garda Terdepan

Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan, Dinsos sebagai garda terdepan terus memastikan data warga miskin selalu



mutakhir, valid, dan digunakan dengan bijak. Dinsos perlu lakukan pemutakhiran secara berkala, ini penting!

DTSEN bersifat dinamis karena itu selalu dimutakhirkan tiap tiga bulan sekali. Ada dua jalur pemutakhiran data yaitu jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formal melalui musyawarah tingkat Desa/Kelurahan lalu ke Dinsos, dan jalur partisipasi masyarakat melalui saluran-saluran yang telah disediakan Kemensos.

“Karena di balik setiap data yang kita perbaharui, ada jiwa yang menanti keadilan, dan disanalah letak kehormatan kita sebagai pelayanan rakyat,” tuturnya.

Gus Ipul menjelaskan data yang telah dimutakhirkan, selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bukan lagi Kementerian Sosial atau Kementerian lain, validasi akhirnya itu adalah BPS, yang akan memberikan data



Karena di balik setiap data yang kita perbaharui, ada jiwa yang menanti keadilan, dan disanalah letak kehormatan kita sebagai pelayanan rakyat.

balikan terhadap hasil pemutakhiran itu.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengucapkan terimakasih kepada Gus Ipul atas support yang diberikan dalam penyusunan, penetapan, uji petik, hingga pemutakhiran DTSEN.

“Menurut kami bapak sangat aktif dan terus mendorong kebijakan yang berbasis data, semakin menambah semangat kami, karena artinya data yang kami produksi dimanfaatkan,” ucapnya.

Amalia menjelaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tidak hanya ditugaskan kepada BPS, tapi juga kepada 18 Kementerian atau Lembaga terkait. “Ini menunjukkan betapa pentingnya data tunggal yang harus dijadikan sebagai landasan bersama,” jelasnya.

Sebagai penutup, Gus Ipul membacakan kesimpulan, “Setiap angka dalam data kita bukan sekedar statistik, tetapi denyut harapan mereka yang terpinggirkan, teruslah bekerja dengan hati, karena dibalik data yang akurat, tumbuh masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat.” ♦





MASYARAKAT UMUM BOLEH LAPORKAN PERSOALAN KE WA 081218040427

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan responsif kepada masyarakat. Khususnya, masyarakat yang ingin menyampaikan informasi program/kebijakan kementerian yang valid, akurat, dan tuntas.

Salah satunya adalah dengan terus mengembangkan layanan pengaduan publik melalui kanal baru WhatsApp dengan nomor 081218040427 yang juga dapat diakses dengan mengunjungi laman ult.kemendikdasmen.go.id. Pada laman tersebut juga tersedia fitur pelacakan laporan untuk mengetahui informasi penyelesaian kendala yang dilaporkan.

“Responsif bukan hanya berarti cepat, tetapi juga menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang tervalidasi kepada masyarakat,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, saat meninjau layanan contact center ULT Kemendikdasmen di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kemendikdasmen juga menyadari

bahwa pada saat musim penerimaan murid baru terdapat potensi peningkatan pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, laporan dari petugas ULT sangat penting sebagai umpan balik langsung evaluasi kebijakan.



Responsif bukan hanya berarti cepat, melainkan juga menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang tervalidasi kepada masyarakat.



“Apakah masalahnya karena kebijakannya belum tepat atau komunikasinya publiknya yang kurang tersampaikan, itu semua menjadi masukan untuk kami,” lanjut Suharti.

Ia pun menyoroti pentingnya koordinasi antara bagian front office dan back office di ULT untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di akhir sesi kunjungan, Suharti menyemangati para petugas ULT untuk bekerja dengan hati dan tidak menyimpan



aduan bernada negatif dalam hati. Selanjutnya, ia meminta seluruh tim ULT untuk terus menjaga komunikasi internal yang harmonis guna memastikan layanan yang diberikan berjalan optimal. ♦

KOMISI VI DPR RI DORONG BATAM MAMPU SAINGI SINGAPURA HINGGA DUBAI

Harus Diberi Status Baru, FTZ Justru Membelenggu

BATAM memegang peran sangat strategis sebagai pusat industri, perdagangan, investasi, sekaligus pintu gerbang logistik dan investasi internasional. Namun potensi Batam untuk menarik investor harus terus dikembangkan, agar mampu bersaing dengan Singapura dan Johor (Malaysia).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BP Batam, BPKS Sabang, dan KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Ia menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) terkait pengelolaan kawasan strategis nasional. Ada beberapa persoalan fundamental yang harus segera dibenahi agar Batam dapat bersaing dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) di negara lain, termasuk Singapura dan Johor.

"Ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan kawasan industri dan kebijakan investasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi," ujar Nurdin.

Ia mencontohkan persoalan seng-

Johor dan Singapura, Saudara Sekaligus Saingan

Ketatnya persaingan di kawasan ekonomi khusus lain di Asia Tenggara, memerlukan langkah-langkah inovatif supaya Batam menjadi destinasi investasi yang indah, nyaman dan kompetitif. Tak hanya soal tata kelola, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim industri dan investasi di Batam di tengah tekanan global.

Nurdin, Politisi Fraksi Partai Golkar, menekankan perlunya diversifikasi ekonomi agar Batam tidak hanya bertumpu pada sektor industri tertentu. Sektor pariwisata dan jasa, menurutnya, harus lebih serius dikembangkan.

Ia mengingatkan agar seluruh pengembangan kawasan industri dan investasi tetap berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor 16 Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam kerangka demokrasi ekonomi.

"Prioritas pembangunan nasional harus pada BUMN, koperasi, dan pengusaha kecil. Jangan sampai terulang lagi seperti di Batam dulu, yang lahan-lahannya banyak dimainkan swasta tidak jelas, dicabut jual lagi, dicabut jual lagi," tegas Nurdin.

Selain BP Batam, ia juga menyoroti keberadaan BPKS yang dinilai belum optimal memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh dan sekitar kawasan Sabang. Dirinya meminta pengelolaan aset BPKS lebih serius, termasuk dalam mengoptimalkan komersialisasi aset agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Pengelolaan aset BPKS belum serius dan komersialisasi asetnya juga belum optimal. Ini harus menjadi perhatian khusus," tandasnya.

The New Dubai atau Dubainya Indonesia

Senada! Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib mendorong transformasi dalam pengelolaan kawasan Batam, Kepulauan Riau untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi modern yang membanggakan Indonesia. Batam menyimpan potensi luar biasa meski dibayangi berbagai hambatan struktural dan birokrasi yang membelenggu.

Sejak awal tahun 2000-an, Batam digadang-gadang akan menjadi 'The New



keta lahan, kerusakan lingkungan, hingga konflik dalam proyek Rempang Eco City, yang menurutnya harus menjadi perhatian serius BP Batam. Maka dari itu, Kepala BP Batam beserta jajarannya didesak untuk membuat terobosan dalam menata kembali tata kelola kawasan industri dan investasi agar lebih sinkron.



Singapore' ikon kota modern Indonesia di pentas global. Namun kenyataannya, kota-kota lain seperti Dubai di UEA, Shenzhen di China, dan kawasan industri modern lainnya telah lebih dulu melesat menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan teknologi dunia.

Ahmad Labib, dalam keterangan persnya pada Kamis (10/7/2025), mengatakan Kawasan Batam sudah berumur tiga dekade lebih. Namun, hingga saat ini kawasan Batam masih belum berkembang pesat. Karenanya, ia mendorong agar

kawasan Batam dapat menjadi 'The New Dubai' yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kota modern dari segi industri hingga pariwisata.

"Kini saatnya kita mewujudkan Batam sebagai 'The New Dubai' milik Indonesia kota modern yang menjadi episentrum industri, keuangan, pariwisata, dan inovasi masa depan," tandas Ahmad Labib.

Ia mencermati, dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota selama ini menjadi sumber kekacauan regulasi dan kebijakan. Karenanya dinilai

positif langkah pemerintah yang menyatukan kepemimpinan BP Batam dan Pemkot Batam dalam satu tangan. Dualisme kepemimpinan telah terlalu lama membatasi kemajuan Batam. Batam butuh satu komando, satu arah, satu visi.

Batam Harus Diberi Status Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut Ahmad Labib menyoroti pentingnya transformasi dari status Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kebijakan itu bisa menjadi solusi efektif untuk merapikan pengelolaan kawasan, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, dan memisahkan fungsi administratif dari kawasan industri dan perdagangan internasional.

"Kalau kita ingin Batam menjadi 'New Singapore' atau bahkan lebih, maka kita tidak bisa bekerja dengan logika lama. Kita butuh keberanian untuk melakukan reformasi total," tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah-langkah progresif yang dilakukan BP Batam, termasuk penyederhanaan perizinan, penghapusan proses yang tidak efisien seperti Fatwa Planologi, serta peluncuran sistem one stop service dan pengadaan real-time.

Namun, diingatkannya agar deregulasi itu jangan sampai justru membuka celah untuk praktik rente dan penguasaan lahan oleh segelintir pihak. ♦





BUKAN KEMENAG LAGI, HAJI DAN UMRAH DIURUS BPH

Baleg DPR RI Setujui Revisi UU No.8/2019

Haji yang selama ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI akan dipindahkan jadi urusan Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sehubungan itu, Badan Legislati (Baleg) DPR RI resmi menyetujui revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.

Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola haji nasional, terutama dengan penguatan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji yang dalam revisi ini diusulkan sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menjelaskan bahwa revisi ini mencantumkan pasal baru, yakni Pasal 1A, yang secara eksplisit mendefinisikan BP Haji dan Umrah.

"Menyisipkan satu pasal di antara Pasal 1 dan Pasal 2, yakni Pasal 1A yang mengatur mengenai definisi Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah. Yang

selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah," ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu mengungkapkan hal ini saat rapat di Ruang Baleg DPR RI, Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Selama ini, keberadaan BP Haji diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024. Namun dengan masuknya definisi BP Haji dalam undang-undang, status lembaga ini akan menjadi lebih kuat secara hukum dan administratif. Hal ini dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang

profesional, transparan, dan akuntabel.

Visa Kuota dan Visa non Kuota

Revisi UU tentang Haji ini juga memuat pengaturan mengenai pembagian visa haji menjadi dua kategori, yaitu visa kuota dan visa nonkuota. Pengaturan ini diperlukan untuk memberi perlindungan hukum bagi jemaah yang berangkat melalui jalur nonkuota.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri mengatakan, "Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian arah pengaturan mengenai tata kelola terhadap perlindungan jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan kuota haji Indonesia."

Revisi juga memuat ketentuan baru mengenai mekanisme pengusulan dan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Mekanisme ini akan dimulai tahun 2025 untuk penyelenggaraan tahun 2026 dan 2027. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya, BPIH akan ditetapkan satu tahun sebelum pelaksanaan ibadah haji.

"Menyisipkan pasal 127D mengenai mekanisme pengusulan dan pembahasan BPIH, serta mengubah judul BAB 12A dari 'peran serta masyarakat' menjadi 'partisipasi masyarakat'," katanya.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan bahwa seluruh anggota Baleg sepakat untuk membawa hasil harmonisasi revisi UU ini ke rapat paripurna terdekat untuk disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

"Apa yang menjadi catatan harmonisasi ini penting sekali untuk dibawakan di tahapan selanjutnya," tegas Bob Hasan.

Catatan:

* Indonesia merupakan negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Pada musim haji 2025, jamaah haji Indonesia mencapai 241.000; terdiri atas 221.000 jamaah kuota dan 20.000 jamaah non kuota.

* Dengan jumlah sebesar itu, penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan pelayanan dan perlindungan optimal bagi seluruh jamaah.

Diharapkan, Jadi Kementerian Haji

Sementara itu sehari sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyambut baik usulan pimpinan Komisi VIII DPR RI terkait perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji.

"Makanya ada Revisi Undang-Undang itu yang insyaallah dalam waktu dekat segera akan diusahakan (disahkan) oleh DPR," ujar Gus Irfan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

Namun sejauh ini, usulan Revisi yang dari DPR RI tidak menyebutkan nama sebagai Kementerian Haji melainkan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, yang setingkat kementerian.

Dikemukakan Gus Irfan, dirinya menilai bahwa usulan agar BP Haji dijadikan Kementerian Haji bertujuan agar posisi BP Haji lebih kuat. Keputusan pengubahan nama akan tercantum di RUU Haji yang akan dibahas dalam waktu dekat.

"Nanti akan muncul bahwa penyelenggaraan haji akan dipegang, apa-

kah itu Badan Penyelenggara Haji ataupun Kementerian Haji," tuturnya.

Gus Irfan menambahkan, penyelenggara haji ke depan akan sepenuhnya dipegang oleh BP Haji jika RUU Haji disahkan menjadi UU. "Nanti kalau sudah muncul di RUU, insyaallah akan sepenuhnya penyelenggaraan haji dipegang oleh BP Haji," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mengusulkan agar Badan Penyelenggaraan (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji.

"Bagaimanapun tolong mungkin Gus Irfan sama Pak Wakil Dahnil, lobi Presiden, apapun ceritanya kalau bisa badan ini nanti di undang-undang ini jadi kementerian," kata Ansory dalam rapat bersama BP Haji tersebut.

Ansory menilai, penyelenggaraan ibadah haji selama ini belum optimal, sehingga dikhawatirkan akan terulang jika pengelolaan tak maksimal di BP Haji. "Kalau dikelola masih badan, lebih semerawut lagi nanti. Setelah saya lihat kemarin, Kementerian saja begitu, bagaimana kalau badan?" kata dia.

Hal senada juga diucapkan Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid yang meminta BP Haji untuk mempersiapkan landasan kelembagaan untuk menjadikan BP Haji sebagai penyelenggara haji 2026.

"Jadi ini harus dipersiapkan, kalau tidak perlu Perpres-nya, Perppu lah, bicarakan dengan Setneg perpindahan antara Kemenag yang di PHU jajarannya ke bawah ke Badan Haji," katanya. ♦



HUKUM MAKAN BALUT DALAM ISLAM: HALAL ATAU HARAM?

Belakangan ini, di media sosial diramaikan dengan sebuah unggahan video yang sempat viral, terkait makanan yang bernama balut. Balut adalah merupakan telur itik atau ayam yang telah dibuahi dan dierami selama beberapa hari, hingga embrio mulai terbentuk,

Kemudian balut direbus dan dimakan. Balut direbus dalam keadaan telur masih utuh dan hewan di dalamnya belum disembelih. Lalu bagaimana hukum memakannya?

Balut sendiri sebenarnya bukan makanan asli Indonesia, melainkan makanan khas dari Filipina. Namun, makanan ini juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Seiring dengan perkembangan media dan informasi, makanan tersebut, kini telah dikenal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, meskipun tidak mudah ditemukan seperti di negara asalnya.

Balut sendiri adalah telur itik atau ayam yang di dalamnya sudah terdapat embrio yang hampir sempurna, yang kemudian direbus dan dimakan.

Di negara asalnya Filipina, Balut dianggap sebagai makanan tradisional yang telah dikonsumsi secara turun-temurun. Bahkan makanan Balut ini sering dijual sebagai jajanan kaki lima dan memiliki nilai budaya yang kuat.

Selain karena faktor tradisi dan budaya, pengonsumsi Balut percaya bahwa Balut memiliki kandungan gizi yang tinggi.

Lalu bagaimana hukum mengonsumsinya menurut Islam, menurut fiqih? Dilansir dari NU Online, semua jenis telur hukumnya suci dan dapat dikonsumsi, termasuk telur dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti telur burung rajawali, gagak, elang, burung hantu, buaya, kura-kura, dan hewan lainnya.

Namun, ada pengecualian: telur yang sudah rusak atau tidak layak menetas, telur bangkai, dan telur ular, ketiganya tidak boleh dikonsumsi. (Muhammad bin Umar Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, [Beirut, Darul Fikr: tt], halaman 39).

Selanjutnya, bagaimana dengan makanan Balut yang di dalamnya sudah terdapat embrio yang hampir sempurna? Berikut penjelasan Syekh Nawawi Banten: "Jika telur dari hewan yang halal dimakan dipecah, lalu di dalamnya ditemukan anak (embrio) yang belum sempurna penciptaannya, atau sudah sempurna bentuknya, tetapi belum ditiupkan

ruh, maka boleh memakannya. Berbeda halnya jika ruh sudah ditiupkan ia mati tanpa disembelih secara syar'i, maka ia dihukumi sebagai bangkai." (Nawawi Banten, 40).

Penjelasan Syekh Nawawi Banten ini, menegaskan bahwa telur yang sudah berubah menjadi embrio atau bahkan wujudnya sudah sempurna, maka halal dimakan selama belum bernyawa.

Berbeda halnya jika sudah bernyawa kemudian mati, maka hukumnya sebagaimana bangkai, sebab mati dengan tidak disembelih secara syar'i.

Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira kapan embrio unggas; itik atau ayam dalam telur itu sudah mulai bernyawa (nafhirruh)?



Tentu pengetahuan mengenai hal ini, dapat diketahui melalui pendapat ahli (ahli khubrah). Permasalahan ini, dapat disamakan dengan permasalahan telur yang sudah berubah menjadi darah dan bagian yang tidak berubah menjadi cairan.

Halal tidaknya telur tersebut, diserahkan kepada pendapat ahli khubrah dengan mengacu pada kondisi, apakah telur yang demikian itu masih layak menetap atau tidak. Jika tidak layak menetap, maka haram dimakan karena najis. (Fathul Jawad, halaman 71).

Walhasil, dalam tinjauan fiqih, hukum memakan Balut diperinci sebagai berikut:

- Jika embrio dalam telur belum bernyawa (belum ditiupkan ruh), maka hukumnya halal untuk dimakan. Namun, jika embrio tersebut telah bernyawa, maka hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori bangkai.
- Dengan pertimbangan kehati-hatian (itiyah), kami berpendapat bahwa memakan Balut sebaiknya dihindari apalagi hanya ikut-ikutan trend, bahkan bisa jadi haram. Hal ini karena tidak

dapat diketahui secara pasti apakah embrio dalam balut tersebut sebelumnya sudah bernyawa atau belum pada saat dimasak atau dikonsumsi.

Sementara itu, dilansir dari memorandumhajjumrah.com, beberapa ulama telah jelas-jelas mengharamkan telur Balut karena beberapa alasan:

1. Termasuk Bangkai

Dalam Islam, segala sesuatu yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, dianggap sebagai bangkai dan haram dikonsumsi.

Karena embrio dalam telur balut telah berkembang menjadi bentuk hewan yang hampir sempurna, memakannya dianggap sama dengan mengonsumsi bangkai.

2. Tidak Disembelih Secara Syar'i

Dalam Islam, hewan yang dikonsumsi harus disembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikuti aturan penyembelihan.

Embrio dalam telur balut tidak men-

alami proses ini, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat kehalalan.

3. Menjijikkan (Makruh atau Haram?)

Beberapa ulama juga mengategorikan telur Balut sebagai makanan yang menjijikkan (khabits) berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa makanan yang diharamkan adalah yang baik (thayyib) dan tidak menjijikkan.

Karena banyak orang merasa jijik terhadap telur Balut, ada yang berpendapat bahwa makanan ini tidak termasuk dalam kategori thayyib.

Meskipun mayoritas ulama mengharamkan telur Balut, ada beberapa pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu.

Mereka berpendapat bahwa selama embrio dalam telur belum mencapai bentuk hewan yang sempurna dan belum memiliki ruh, maka masih dapat dikonsumsi.

Namun, batasan mengenai kapan embrio memiliki ruh masih menjadi perdebatan. Wallahu a'lam. ♦



ILUSTRASI

7 KEUTAMAAN BULAN MUHARRAM DAN AMALAN SUNNAH YANG DIANJURKAN

Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriyah yang memiliki keutamaan dan makna penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada bulan Muharram ini, Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Selain itu, di bulan Muharram ini juga terdapat hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram.

Maka sebuah hal yang wajar jika umat Islam di seluruh dunia selalu menyambut bulan Muharram ini dengan penuh sukacita dengan melakukan berbagai amalan-amalan Kebajikan yang dianjurkan. Sementara itu, untuk tahun ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 27 Juni 2025.

Sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, Muharram memiliki banyak sekali keistimewaan. Hal tersebut telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Sesungguhnya, zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 belas bulan, di antaranya 4 empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Dzulqadah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadil Tsani (Jumadil Akhir) dan Syaban.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagai salah satu bulan suci, maka di bulan Muharram ini umat Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan atau amal shaleh.

Berikut 7 Keutamaan bulan Muharram yang wajib diketahui:

1. MEMILIKI PERISTIWA PENTING BAGI PARA NABI

Muharram adalah bulan yang memiliki makna penting bagi para Nabi, di antaranya:

Nabi Adam:

Diciptakannya Nabi Adam AS dan istrinya, Hawa. Selain itu, di bulan Muharram ini juga Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah Khuldi yang dilarang oleh Allah setelah dikeluarkan dari Syurga.

Nabi Idris:

Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram ini.

Nabi Nuh:

Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari bencana banjir yang dahsyat.

Nabi Ibrahim:

Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang hampir merenggut nyawanya.

Nabi Yusuf:

Allah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara setelah difitnah karena laporan Al-Aziz yang merupakan majikannya.

Nabi Yaqub:

Masih di bulan Muharram ini, Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub AS, setelah mengalami kebutaan dan jatuh sakit akibat putranya, Nabi Yusuf menghilang. Hal ini tertuang di dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 76.

Nabi Ayyub:

Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub AS yang menderita sakit selama bertahun-tahun, penyakit kulit bernanah di sekujur tubuhnya.

Nabi Musa:

Allah menyelamatkan Nabi Musa AS dari kejeran Raja Fir'aun yang terjadi pada 10 Muharram. Tak hanya itu, kemuliaan bulan Muharram bagi Nabi Musa ini adalah diturunkannya kitab Taurat dan tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah, juga terjadi pada bulan Muharram.

Nabi Yunus:

Allah menyelamatkan Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan besar setelah bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan.

Nabi Muhammad:

Terjadinya Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah.

2. BULAN YANG MULIA

Dalam kalender Islam, terdapat empat (4) bulan yang sangat mulia, yang disebut sebagai bulan haram atau asyhurul hurum, dan salah satunya adalah Muharram. Selain Muharram, 3 bulan lainnya yaitu Dzulhijjah, Rajab, dan Dzulqadah.

Pada bulan-bulan suci ini, umat Islam dilarang melakukan peperangan dan diperintahkan untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. Hal ini tertuang dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 36, yang artinya:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka

janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. At Taubah: 36).

3. TERDAPAT HARI ASYURA

Hari Asyura adalah hari yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Hari Asyura merupakan hari yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi. Asyura yang jatuh pada 10 Muharram ini menjadikan bulan Muharram sebagai salah satu bulan yang istimewa dan mulia.

Karenanya, umat Islam disunahkan untuk melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, umat Islam juga disunahkan untuk melakukan ibadah puasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram, yang disebut dengan puasa Tasu'a.

4. PUASA TERBAIK SETELAH BULAN RAMADHAN

Setelah bulan Ramadhan, bulan Muharram juga merupakan waktu yang baik untuk menjalankan ibadah puasa. Di bulan ini, dianjurkan untuk melakukan berbagai amal saleh, dan salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa.

Bahkan, Rasulullah telah bersabda bahwa puasa di bulan Muharram adalah ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadhan

"Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah

(Muharram), dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam." (HR. Muslim no. 1163, dari Abu Hurairah)

5. DILIPATGANDAKAN PAHALA

Pahala dari ibadah yang dilakukan selama bulan Muharram akan dilipatgandakan oleh Allah. Hal tersebut telah disampaikan di dalam sebuah hadits, sebagai berikut:

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan semua haram (mulia) atas kalian seperti mulianya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian." (HR. Bukhari dan Muslim).

6. PERHITUNGAN DOSA JUGA DILIPATGANDAKAN

Tidak hanya pahala yang akan dilipatgandakan, dosa yang dilakukan pada bulan Muharram juga akan dilipatgandakan. Artinya, dosa yang dilakukan sekecil apapun akan memiliki timbangan yang berat.

Mengutip Kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan:

"Allah SWT mengkhususkan empat (4) bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa, juga melipatgandakan perbuatan dosa disamping melipatgandakan perbuatan baik."

Karena itulah, sebaiknya berhati-hati dan menimbang baik dan buruknya akibat dari

segala tingkah laku dan aktivitas yang kita lakukan di bulan Muharram ini.

7. BULAN PERTAMA DALAM PENANGGALAN HIJRAH

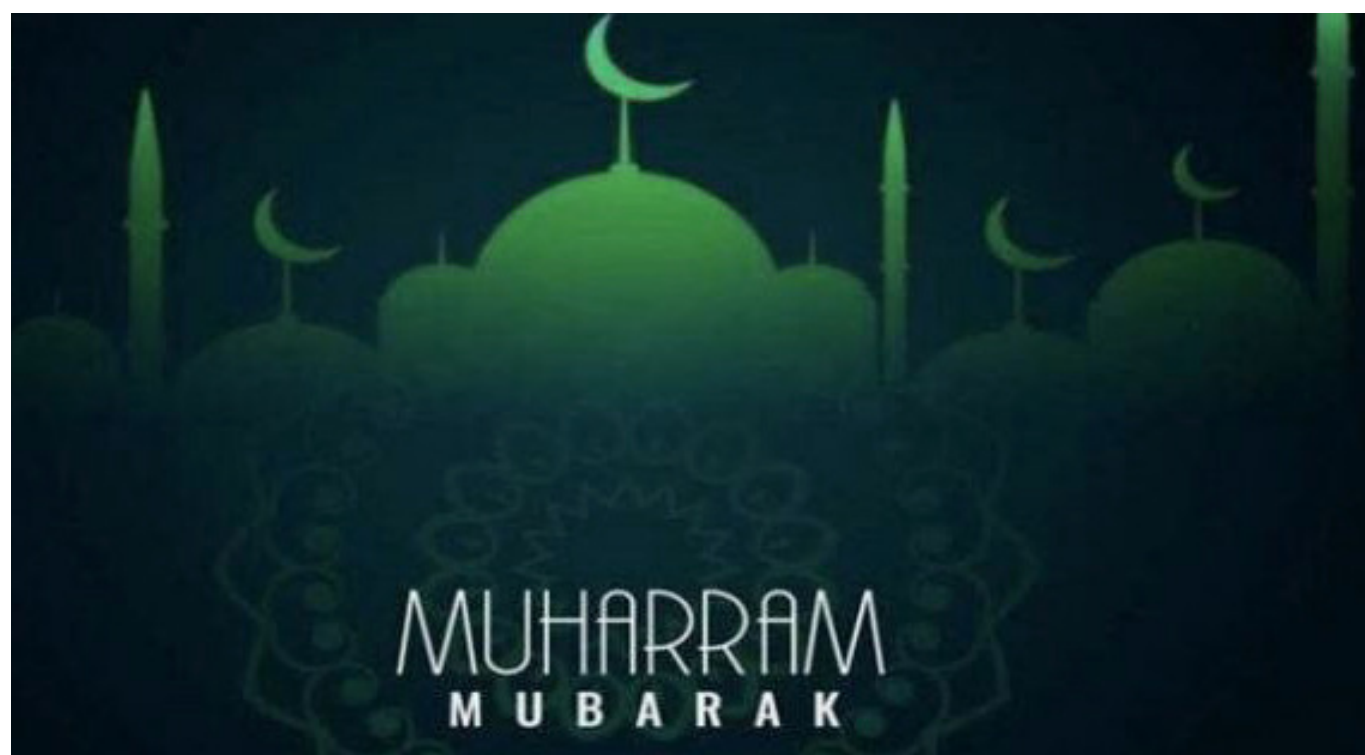
Bulan Muharram disebut sebagai bulan mulia (suci), karena Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijriyah. Tanggal 1 Muharram merupakan tanda peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi.

Mengingat Muharram adalah bulan yang penuh dengan peristiwa penting dan istimewa, maka sudah sepantasnya dan sebaiknya kita melakukan ibadah dan amal yang baik, karena pahala akan dilipatgandakan.

Berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram:

- Puasa sunnah pada bulan Muharram, terutama puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dan puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharram.
- Memperbanyak surah Al-Ikhlâs sebanyak 1.000 kali.
- Menghindari perbuatan buruk, maksiat. Disarankan untuk memperbanyak kebaikan sekecil apapun.
- Memperbanyak sedekah, terutama di tanggal 10 Muharram, yang juga disebut sebagai Hari Anak Yatim.

Demikian beberapa keutamaan bulan Muharram, yang wajib diketahui beserta amalan yang disunahkan. Pastikan kita selalu berbuat kebaikan agar bulan Muharram menjadi bulan ladang pahala. ♦





Dr Henry Klassen, Ilmuan Ternama Amerika Serikat TEKUNI STEM CELL MEMBAWANYA MEMELUK AGAMA ISLAM

Profesor Henry Klassen merupakan ilmuwan terkenal di dunia yang menekuni bidang Stem Cell. Ia dosen oftalmologi ternama di University of California, dan merupakan lulusan Universitas Harvard dan Pittsburgh, Amerika Serikat.

Sebagai pelopor di bidang Stem Cell atau Sel Punca dan rekonstruksi retina, Dr Henry Klassen dikenal karena menemukan obat Stem Cell, yang baru-baru ini disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS untuk mengobati kebutaan turunan.

Ilmuwan terkenal ini telah memeluk Agama Islam pada awal bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, dengan nama baru Abdul Haq. Sebuah video viral menunjukkan dia mengucapkan Syahadat (pernyataan iman Islam), salah satu dari Lima Rukun Islam.

Banyak Muslim yang merayakan berita tersebut di media sosial, menggambarkan keputusan Larson sebagai 'kabar baik.'

"Profesor Henry Klassen masuk Islam

dan diberi nama Abdul Haq. Ilmuwan ini adalah orang yang paling berpengetahuan di dunia dalam Islam," tulis seorang komentator di X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Menurut situs web Azon Global, ilmuwan tersebut dikenal karena menemukan obat sel punca yang baru-baru ini disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS. Sel tersebut dicari untuk mengobati kebutaan turunan.

Berselang Beberapa Hari dari Shaun King

Henry Klassen menjadi mualaf pada Bulan Suci Ramadhan 2024, yaitu bulan kesembilan dalam Kalender Islam. Ramadhan menjadi sangat istimewa bagi umat

Islam, karena sepanjang bulan itu, yang di dalamnya juga ada satu malam yang kebaikannya lebih dari kebaikan 1000 bulan.

Sebagai saah satu dari lima rukun Islam, Ramadhan dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia dengan berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam selama 29 hingga 30 hari. Masuknya Klassen ke Islam terjadi hanya beberapa minggu setelah aktivis terkemuka Amerika Serikat, Shaun King, memeluk Agama Islam.

Shaun King mengumumkan keputusannya untuk memeluk Islam awal bulan ini, yang menuai jutaan komentar yang menyambut baik berita tersebut dan memuji keputusannya. Tidak sendirian. Shaun King masuk Islam bersama istrinya, dan mereka keesokan hari setelah ucap-



kan syahadat, langsung melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan.

Banyak selebritas dan tokoh terkenal telah memeluk Islam dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mantan pemain sepak bola Jose Ignacio serta mantan ikon NBA Stephen Jackson.

Tak sekadar puasa dan shalat Tarawih di bulan Ramadhan itu, Henry Klassen dilaporkan oleh Azon Global, segera menunaikan ibadah umrah. Kabar keislaman Henry sebelumnya menjadi viral di media sosial. Pada 15 Maret 2024, akun X Globe Eye News mengunggah videonya saat mengucapkan dua kalimat syahadat.

Video berdurasi 1 menit 32 detik itu menampilkan Henry Klassen dan seorang ulama yang duduk berdampingan di sebuah sofa dan berjabat tangan. ♦ros



George Rudy Aktor dengan Nama Asli Tjwan Hien MUALAF KARENA PERANKAN ADEGAN YANG TAKKAN TERLUPAKAN

George Rudy merupakan salah satu sosok aktor Indonesia yang karirnya tak pernah lekang oleh waktu. Sejak terjun ke dunia peran di era 1970an, hingga kini George Rudy yang lahir 30 Oktober 1955 dengan nama Tjwan Hien masih terus dikenal publik. Salah satunya karena dia tidak membatasi diri hanya main film layar lebar. Ia juga merupakan bintang sinetron.

George lahir di Jember, Jawa Timur, sebagai non Muslim. Ia merupakan lulusan SMA Katolik Santo Paulus Jember (1972), lalu melanjutkan studi ke Akademi Seni Drama & Film (Asdrafi) di Yogyakarta. Setelah selesai kuliah ia terjun ke dunia film, terutama film-film laga.

Dilansir dari Channel YouTube-nya, George Rudy bercerita bagaimana ia harus melakukan adegan yang akan selalu diingatnya sampai kapanpun. Dia mengatakan pada awalnya tertarik pada agama Islam karena harus melaksanakan adegan salat ketika sedang syuting film Balada Dua

Jagoan.

BERIKUT INI PENUTURAN GEORGE RUDY

Saya syuting Film Balada Dua Jagoan pada 1977, di mana ada adegan saya harus melaksanakan shalat. Saya bilang ke sutradara bahwa saya non Muslim. Tapi sutradara bilang oh enggak apa-apa.

Belakangan disadari. Adegan shalat untuk kebutuhan karakter Film Balada Dua Jagoan yang sedang dia bintanginya itu menjadi jalan George mendapat hidayah, yang diawali dengan tertarik masuk Islam--setelah adegan shalat.

Akhirnya adegan saya jalani, saat gerakan Attahiyat Terakhir sampai memberi Dua Salam, saya pikir saya merasakan naluri kalau ini jalan hidup saya, mendapat hidayah dari Allah SWT.

Kisah perjalanan George Rudy jadi mualaf dimulai dari dia mendapat hidayah Allah SWT. Bisa dibilang hal itu terjadi dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Usai menjalankan gerakan shalat itulah, tiga tahun kemudian George Rudy memperoleh hidayah. Tahun 1980, aktor berusia 69 tahun ini mengaku tertarik mempelajari Agama Islam karena melihat orang



berwudhu.

Tahun 1980 saya mulai tertarik belajar Islam, karena saya melihat orang berwudhu. Saya tanya-tanya, sampai paham oh jadi untuk menghadap Sang Pencipta kita itu bersih secara jasmani. Saya juga pelajari (Islam) pelan-pelan dari terjemahan Al-Quran.

Hingga akhirnya pada Maret 1981 dia mantap memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia merasa bersyukur menjadi mualaf dengan didampingi dan diislamkan oleh sosok yang sangat ia hormati, almarhum Buya Hamka.

Memang sudah merasakan saya pribadi akan masuk Islam. Alhamdulillah yang mengislamkan adalah tokoh yang saya hormati, Buya Hamka. Saya yakin untuk masuk Islam, mantap mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah sampe sekarang saya tetap menjadi seorang Muslim.

Sosok Buya Hamka menjadi salah satu yang sangat berperan ketika George Rudy menjadi mualaf. Buya Hamka memberi George Rudy nama baru yakni Abdul Hadi yang memiliki arti yang diberi petunjuk. Sehingga nama lengkapnya kini menjadi George Rudy Al Abdul Hadi.

Ia menikahi istrinya Inneke Indra pada 1981 dan menua bersama dalam Islam. George mengaku, banyak sekali keberkahan yang ia peroleh dalam hidup setelah menjadi seorang Muslim. Bahkan ada yang tampak sebagai keajaiban.

Berbagai keajaiban George Rudy alami usai resmi menjadi mualaf. Salah satunya ketika dia merasa banyak bantuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya.

Salah satu momen ditolong Allah Ta'ala saat George Rudy pulang dari Surabaya ke Jakarta menaiki kendaraan motor. Ketika itu motornya mendadak mati. Dia pun memutuskan melakukan sholat dahulu dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau pulang ke Jakarta, mau ketemu keluarga saya."

Usai shalat, George Rudy coba menyalakan motornya setelah membaca Bismillah. Ternyata, motornya hidup, dan dia pun sampai Jakarta dengan selamat.

Sesampainya di rumah, George Rudy memanggil montir. Si ahli mesin tersebut kaget motor itu sanggup sampai Jakarta, sebab kondisinya sangat memprihatinkan, banyak komponen rusak. ♦ros



Saraf Kejepit, Bisa Menyerang Segala Usia

BEGINI, GEJALA DAN PENYEBAB HINGGA CARA PENYEMBUHANNYA

Dalam tubuh manusia, ada sistem saraf yang bersifat sangat kompleks dengan fungsi sebagai pengendali aktivitas setiap pengolahan rangsangan pada tubuh. Jika saraf bermasalah, maka bagian yang berkaitan akan mengalami gangguan atau masalah. Masalah yang sering mengganggu saraf di antaranya Saraf Kejepit yang dalam Bahasa Inggris disebut Pinched Nerve.

Saraf Kejepit yaitu suatu kondisi di mana saraf terjepit oleh jaringan tertentu seperti daging, tendon, otot, ligamen, sendi, ataupun tulang. Umumnya, kondisi ini terjadi di area pinggang, namun juga bisa di area punggung, leher, pergelangan tangan dan juga di area man pun di bagian sekitar tulang belakang dan piringan sendi.

Masyarakat umum sering menyebut hal ini sebagai Kecetit. Sementara dalam bahasa medis, saraf kejepit disebut sebagai pinched nerve. Dengan terjepitnya saraf, maka jaringan di sekitarnya akan merasakan rasa nyeri, kebas, sensasi kesetrum, mati rasa, kesemutan, dan sensasi seperti tertusuk-tusuk. Hal ini karena saraf akan mengirimkan sinyal ke otak berupa rasa nyeri.

Umumnya, kondisi ini terjadi akibat gerakan yang berulang-ulang dengan disertai tekanan secara berlebih. Radang sendi maupun cedera juga bisa menjadi penyebabnya karena jaringan yang cedera dapat membengkak dan menjepit saraf.

Tanpa perawatan yang optimal, maka saraf kejepit dapat mengakibatkan beberapa komplikasi. Salah satunya yaitu sindrom cauda equina yang membuat tungkai melemah hingga kesulitan mengendalikan buang air.

Saraf kejepit mampu menyebabkan beberapa kondisi yang berbeda-beda yaitu meliputi beberapa hal di bawah ini:

- ▶ Nucleus pulposus herniation
- ▶ Carpal tunnel syndrome
- ▶ Tarsal tunnel syndrome

- ▶ Cervical radiculopathy
- ▶ Cubital tunnel syndrome
- ▶ Sciatica

Umumnya, saraf kejepit lebih rentan di alami oleh mereka dalam kategori berikut ini:

- ▶ Wanita
- ▶ Usia di atas 50 tahun
- ▶ Punya riwayat cedera
- ▶ Genetik
- ▶ Penderita sakit tiroid
- ▶ Postur tubuh tidak ideal
- ▶ Obesitas
- ▶ Sedang hamil
- ▶ Kerja dengan gerakan berulang

Terjadinya Saraf Kejepit

Penyebab paling umum dari kondisi ini yaitu karena gerakan berulang-ulang



yang disertai dengan beban berlebih. Contohnya yaitu oleh gerakan seperti menarik, membungkuk, menekan, maupun mengangkat sesuatu yang berat.

Akibatnya, bagian tersebut mengalami cedera dan mengakibatkan saraf terjepit oleh jaringan di sekitarnya seperti halnya oleh otot, ligamen, tendon, sendi, maupun tulang.

Berikut ini beberapa penyebab akibat saraf kejepit yang perlu Anda ketahui:

- ▶ Posisi tidur yang salah
- ▶ Tumor yang membesar
- ▶ Kanker yang membesar
- ▶ Cedera
- ▶ Osteoarthritis tulang belakang
- ▶ Rheumatoid arthritis
- ▶ Ligamen atau tendon yang membesar

Gejala Saraf Kejepit

Tiap penderita, gejala yang diderita dapat berbeda satu sama lain. Variasi gejala yang muncul biasanya berupa:

- ▶ Nyeri
- ▶ Terasa panas
- ▶ Mati rasa
- ▶ Kesemutan
- ▶ Kebas
- ▶ Bengkak
- ▶ Kelemahan otot
- ▶ Sensasi di tusuk jarum
- ▶ Sensasi kesetrum

PENCEGAHAN

- ▶ Beberapa metode pencegahan yang dapat Anda lakukan meliputi:
- ▶ Olahraga angkat beban sehingga otot lebih kuat.
- ▶ Hindari terlalu lama duduk.
- ▶ Pastikan jaga berat badan secara ideal.
- ▶ Konsumsi makanan bernutrisi.
- ▶ Cukupi kebutuhan tidur harian.

Pengobatan Saraf Kejepit

Saraf Kejepit dapat disembuhkan dengan pengobatan berupa Perawatan/Pengobatan Mandiri dan Penanganan Medis;

1. Pengobatan Mandiri

Bila gejala yang muncul masih ringan dan dapat Anda tahan, maka pengobatan secara mandiri dapat Anda lakukan seperti:

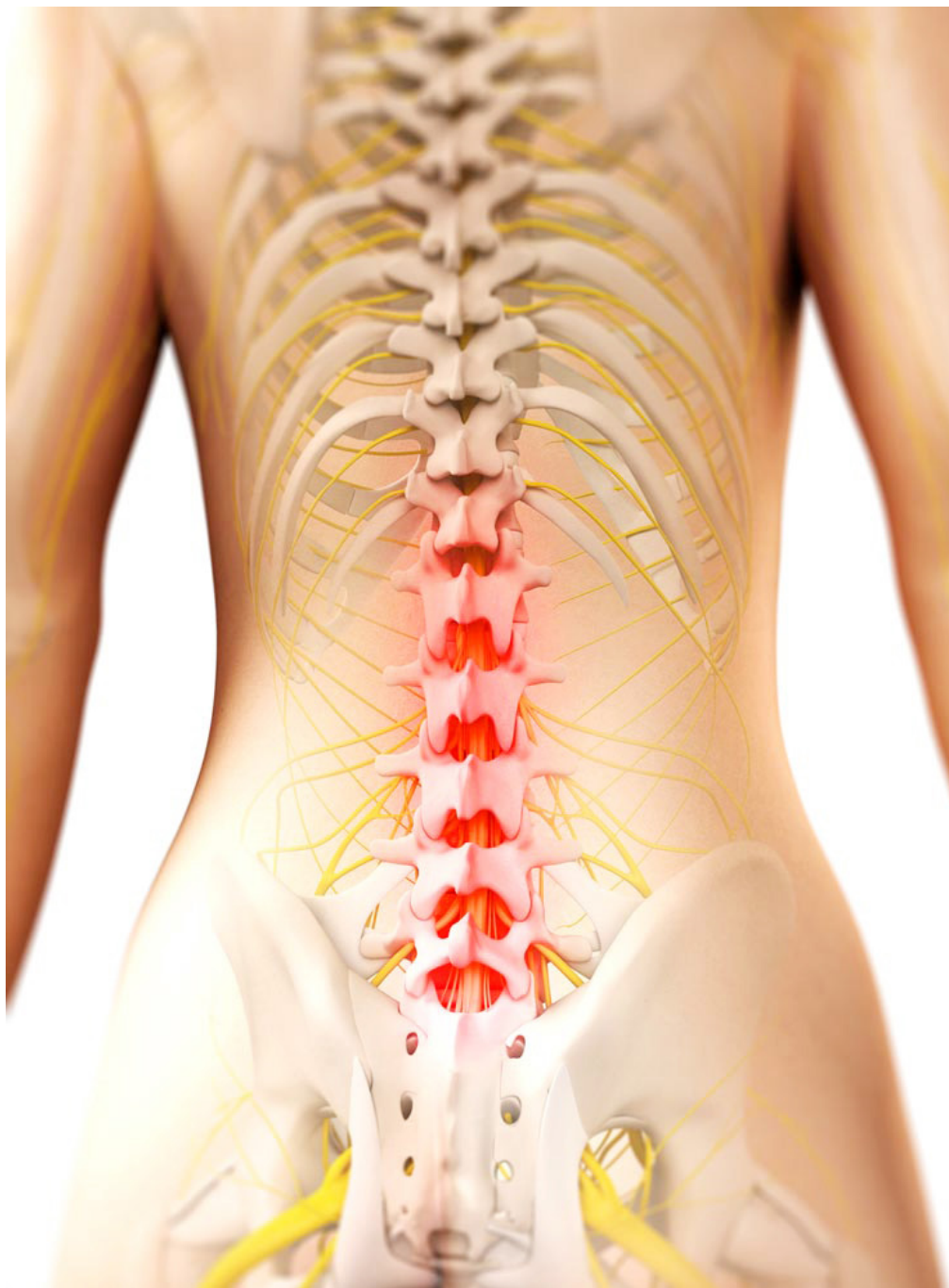
- ▶ Kompres area yang sakit dengan air hangat ataupun dingin
- ▶ Istirahat yang cukup, hindari keserangan begadang
- ▶ Konsumsi obat pereda nyeri bebas seperti ibuprofen atau pun parasetamol
- ▶ Gunakan bantalan khusus agar area yang bermasalah tidak sakit

- ▶ Lakukan peregangan sebelum Anda olahraga

2. Perawatan Medis

Saat pengobatan secara mandiri belum mampu menghilangkan gejala saraf

- ▶ Pemberian kortikosteroid baik dengan suntik maupun dengan oral.
- ▶ Konsumsi obat pereda nyeri saraf seperti halnya amitriptyline dan gabapentin.
- ▶ Dalam kasus tertentu, bisa dilakukan operasi atau pembedahan.



kejepit, maka Anda bisa melakukan perawatan medis dengan menggunakan beberapa tindakan berikut ini:

- ▶ Terapi fisik sehingga otot yang lemah dapat kembali berfungsi normal.
- ▶ Pemberian obat anti nyeri yang kuat seperti natrium diclofenac atau pun mefenamic acid.

KOMPLIKASI yang dapat ditimbulkan Saraf Kejepit antara lain;

- ▶ Sindrom cauda equina
- ▶ Gangguan fungsi saraf
- ▶ Nyeri kronis
- ▶ Sulit menggerakkan tubuh
- ▶ Sulit menahan BAK/BAB
- ▶ Terganggunya aktivitas harian. ♦ros

CARA GAMPANG KESEHATAN HOLISTIK KEMBALI KE ALAM

Luar biasa Buku EKOTERAPI, Panduan Praktis Menuju Kesehatan Holistik dengan Spiritual Alam. Setiap orang penting membaca dan memilikinya. Karena buku ini memberikan panduan praktis bagaimana mendapatkan kesehatan, kebugaran, ketenangan, dan keceriaan, dengan cara praktis, mudah, menyenangkan, dan tidak mahal.

Buku ini memberi penegasan bahwa kehadiran ekoterapi sebagai bagian dari paradigma kesehatan holistik. Dalam sebuah penelitian (hal: 157-158) bahwa ekoterapi dapat menurunkan stress, kesehatan mental, dan mengobati gangguan kecemasan.

Di masa Pandemi Covid 19 yang kala itu melanda dunia. Banyak orang ingin kembali ke alam untuk meringankan stress, meningkatkan well being, dan tetap sehat secara jasmani dan rohani.

Dalam perspektif kesehatan mental, kontak manusia dengan lingkungan merupakan bagian penting guna merespons stres.

Bagi mereka, ekoterapi tidak hanya mengatasi penyakit, tetapi memperbaiki hubungannya dengan alam yang telah rusak dan membangun keintimannya sebagai penyangga kehidupan.

Jika menytir pernyataanya Howard Clinebell, seorang pioner dalam terapi pastoral dan terapi lingkungan. 'Healing and growth nurtured by healthy interaction with the earth.' Artinya, ekoterapi tidak hanya tentang fisik dengan alam, tetapi melibatkan aspek spiritual dan emosional yang memungkinkan seseorang merasa terhubung dengan lingkungan sekitar mereka (hal: 16).

Kesimpulan, buku yang ditulis oleh Dosen Universitas Annuqayah, yakni Mohammad Takdir dan Nuzulul Khair men-

JUDUL BUKU:
EKOTERAPI, PANDUAN PRAKTIS MENUJU KESEHATAN HOLISTIK DENGAN SPIRITUAL ALAM
PENULIS:
MOHAMMAD TAKDIR DAN NUZULUL KHAIR
PENERBIT:
PUSTAKA UNIVERSITAS ANNUQAYAH
TAHUN TERBIT:
DESEMBER 2024
TEBAL:
256 HALAMAN
ISBN: 978-623-89621-0-5

gajak pembaca agar kembali ke alam (back to nature) sebagai fitrah kemanusiaan. Sebab manusia bagian dari alam dan bukan sebagai entitas yang terpisah ♦ros



Mohammad Takdir
Nuzulul Khair

EKOTERAPI

Panduan Praktis Menuju Kesehatan Holistik dengan Spiritualitas Alam





**IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000**



**IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000**



**IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000**

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



**IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000**



CONTACT PERSON: NIKEN

**021 - 791 96 781
0896 4369 4121**

Email: moeslimchoice@gmail.com



KISAH POHON KURMA MENANGIS DI HADAPAN RASULULLAH

Pada zaman Rasulullah SAW, di daerah Madinah terdapat sebuah Pohon Kurma yang berdiri tegak menjulang tinggi. Dia bukan sembarang Pohon Kurma, melainkan memiliki kisah istimewa yang tidak dimiliki oleh Pohon Kurma lainnya. Pohon Kurma yang satu ini memiliki jalinan dan ikatan dengan Nabi Muhammad saw, sang pembawa risalah Islam.

Dilansir dari NU Online, dikisahkan pada suatu hari Jumat, ketika Rasulullah saw sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang berasal dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu, sangat menyedihkan, sehingga membuat jamaah yang hadir di masjid tersebut, menoleh ke belakang ke sumber suara tangisan tersebut.

Suara tangisan itu rupanya berasal dari pohon kurma yang berdiri di dekat mimbar tempat Rasulullah saw biasa berkhotbah. Melihat pohon kurma yang menangis, Rasulullah pun kemudian mengakhiri khutbahnya dan menghampiri Pohon Kurma tersebut.

Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di batang Pohon Kurma sambil berkata, "Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa kamu menangis?"

Pohon Kurma tersebut, dengan karunia Allah swt memiliki kemampuan untuk berbicara, dan langsung menjawab dengan suara yang lemah dan sedih,

"Ya Rasulullah, aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku akan rindu mendengar suara merdu dan nasehat bijakmu yang selalu menenangkan jiwaku," jawab Pohon Kurma.

Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana termaktub dalam Fathul Bari Jilid 4, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, halaman 374; Bahwa seorang wanita Anshar berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku buatkan untukmu sesuatu untuk engkau duduki? Karena aku memiliki seorang anak laki-laki yang tukang kayu."

Beliau bersabda, "Jika engkau mau." Maka wanita tersebut membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad saw. Maka ketika hari Jumat, Nabi Muhammad saw duduk di mimbar yang telah dibuat, lalu pohon kurma yang di depannya saat beliau berkhotbah berteriak hingga hampir pecah. Maka Rasulullah turun hingga mengambilnya, lalu memeluknya.

Maka pohon tersebut mulai meratap seperti rengekan bayi yang sedang didi-

amkan hingga tenang. Beliau bersabda, "Pohon tersebut menangis karena dzikir yang dulu biasa ia dengar."

Menurut Ibnu Hajar, hadits tersebut menjelaskan bahwa Pohon Kurma terse-



but menangis, karena kehilangan nasehat dan zikir yang senantiasa Rasulullah ucapkan didekatnya. Selama ini, Pohon Kurma tersebut telah menjadi tempat Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Bahkan di Pohon Kurma itu, ia mendengar langsung nasihat-nasi-

hat bijak dari Rasul yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Setiap Jumat, Pohon Kurma tersebut telah merasakan lang-sung kasih sayang dan cinta Rasulullah. Pohon itu telah merasakan bagaimana Rasulullah bersandar di batangnya saat memberikan khutbah Jumat. Interaksi itu sangat berbekas di hatinya.

Namun, ketika Rasulullah tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar, karena Rasulullah duduk, maka ia merasa kehilangan. Merasa kesepian dan sedih. Kendati tidak punya hati seperti halnya manusia, namun Pohon

kan Rasulullah sebuah mimbar untuk dipergunakan khutbah di hari Jumat.

Rasulullah saw tidak merasa keberatan dengan ide itu. "Silakan jika kalian ingin melakukannya," kata Rasulullah saw atas ide itu. Itulah yang membuat Pohon Kurma tersebut menangis. Ia merasa akan kehilangan pujaan hatinya, yang setiap hari Jumat menemaninya dan menghiburnya dengan nasihat-nasihat Kebajikan. Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding kehilangan sosok yang dicintai. begitulah derita Pohon Kurma.

Rasulullah saw pun akhirnya menyadari kesedihan Pohon Kurma tersebut.

mah atau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan.

Para pohon itu mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pohon Kurma, dengan buahnya yang lebat dan manis, merupakan salah satu anugerah Allah swt yang sangat berman-



Kurma itu bisa merasa sedih, karena telah ditinggalkan oleh sosok yang sangat dicintainya.

Hal tersebut dikarenakan seorang perempuan tua dari kalangan Anshar dan anaknya yang juga merupakan tukang kayu menemui Rasul. Ia ingin membuat

Beliau kemudian turun dari mimbar dan memeluk batang Pohon Kurma itu. Pelukan cinta dari Rasulullah tersebut, dapat mengobati rasa sedih sang Pohon Kurma.

Kisah tangisan Pohon Kurma kepada Nabi Muhammad ini, memberikan hik-

faat bagi manusia.

Karenanya, kita harus banyak-banyak bersyukur atas anugerah ini dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar Pohon Kurma dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup dan berkembang. ♦

URUSAN SAMPAH, RASULULLAH: JANGANLAH KAMU SEPERTI ORANG YAHUDI!



oleh: Dr. H. Achmad Roziqi, Lc., M.H.I

Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap 21 Februari. Hari Bumi diperingati 22 April, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati tanggal 5 Juni, dan Hari Lingkungan Hidup Nasional jatuh pada 10 Januari.

Hari-hari peringatan di atas termasuk tanggal 22 April, di mana dunia memperingati Hari Bumi sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Di tengah krisis iklim, pencemaran air dan udara, serta meningkatnya volume sampah, umat Islam perlu merenungkan kembali tanggung jawab spiritual dan sosial terhadap bumi yang kita tempati.

Islam bukan hanya agama ibadah individual, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam secara holistik dan penuh kasih. Dalam momentum Hari Bumi 2025 ini, mari kita telaah kembali bagaimana ajaran Islam menempatkan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari keimanan dan tanggung jawab ekologis.

Islam dan Kebersihan Lingkungan

Bersih adalah bagian dari ajaran agama yang kita yakini kebenarannya, Islam. Oleh karena itu, sudah semestinya perilaku bersih ini menjadi salah satu wajah keislaman kita. Dasar dari hal ini bisa kita dapati dalam salah satu hadis Hadraturrasul Muhammad SAW berikut ini: Sesungguhnya Allah itu baik lagi mencintai kebaikan, bersih lagi mencintai kebersihan, mulia lagi mencintai kemuliaan, dermawan lagi mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kalian dan janganlah kalian menyerupai Yahudi yang mengumpulkan sampah di rumah mereka (HR. Imam Tirmidzi).

Berangkat dari hadits di atas, setidaknya kita bisa memahami bahwa perilaku kotor, termasuk membuang sampah sembarangan, adalah bertentangan dengan ajaran agama. Lalu bagaimanakah hukumnya?

Hukum Membuang Sampah Sembarangan

Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU yang ke-29 di Cipasung Jawa Barat tahun 1994 telah memutuskan bahwa hukum mencemari lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan dharar (bahaya), adalah haram dan ter-

masuk perbuatan kriminal (jinayah).

Apakah membuang sampah sembarangan bisa masuk di dalam pencemaran lingkungan? Jawabnya bisa.

Ada beberapa sampah yang menurut penelitian bisa mencemari lingkungan, bahkan mengancam ekosistem alam. Di antara sampah yang termasuk jenis ini adalah sampah plastik. Sampai di sini, kita bisa mengatakan bahwa membuang sampah sembarangan hukumnya haram apabila sampah yang dibuang memiliki dampak pencemaran lingkungan.

Di samping haram, perilaku mem-



buang sampah sembarangan sebagaimana dimaksud di atas pun bisa dikenai pasal kriminal dengan konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Sebutlah Imam Ghozali, sebagaimana dikutip oleh Imam Romli, menyatakan bahwa jika ada seseorang di pemandian umum terpeluset karena sisa atau bekas sabun yang dibuang di jalan pemandian itu (tempat lewat), kemudian orang itu meninggal dunia atau mengalami cedera, maka setidaknya ada dua pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, yaitu orang yang kurang bersih dalam membuang bekas sabunya dan pengelola pemandian umum tersebut.

Dosa Perilaku Membuang Sampah Sembarangan

Kalau tidak sampai pada pencemaran lingkungan atau menimbulkan kematian/cacat sebagaimana keterangan di atas, apakah membuang sampah sembarangan kemudian menjadi boleh? Tentu

tidak seperti itu. Meski tidak mencemari lingkungan (dalam arti menjadi hal yang sangat berbahaya), namun perilaku membuang sampah sembarangan tetap membuat lingkungan kotor. Kita tentu setuju bahwa mengotori lingkungan sudah bisa membuat orang lain terganggu. Oleh karena itu, kita didorong oleh agama untuk tidak melakukannya.

Belajar membuang sampah yang benar, inilah solusi yang ditawarkan oleh Pesantren Tebuireng agar terhindar dari dosa mengotori atau mencemari lingkungan. Pesantren Tebuireng saat ini memiliki unit yang dikembangkan dengan serius, yaitu Bank Sampah Tebuireng. Di unit ini, kita bisa belajar bagaimana mengelola sampah, yang tujuannya tidak adalah upaya melestarikan alam dan lingkungan yang sudah diamankan oleh Allah SWT kepada kita.

Dosa harus ditaubati, ya. Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah antara yang mudah dicerna (terurai) oleh

bumi dan yang sulit, meminimalisir sampah non-organik (khususnya plastik), hingga membuat aturan yang mengikat kepada konsumen hingga produsen oleh pemerintah adalah wujud konkret taubat kita sebagai manusia atas segala pencemaran yang kita lakukan, termasuk laku membuang sampah sembarangan.

Dari Iman Menuju Aksi Lingkungan

Hari Bumi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran ekologis yang berakar pada iman. Islam telah memberikan landasan kuat bahwa menjaga kebersihan dan menghindari perusakan lingkungan adalah bagian dari ibadah.

Maka mari kita mulai dari hal yang sederhana namun bermakna: tidak membuang sampah sembarangan. Sebab dari satu tindakan kecil itu, kita sedang menjaga bumi, memelihara ciptaan Allah, dan menjalankan ajaran Nabi kita. Wallahu a'lam. ♦kemenag.go.id



HEBOH BERAS OPLOSAN

Gegara menaikkan harga di tingkat konsumen, temuannya malah beras oplosan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan solusinya.

Kenaikan harga beras di tingkat eceran terjadi sejak Juni 2025. Namun, pada periode yang sama harga pembelian gabah oleh penggilingan padi justru sedang menurun. Dari sanalah terungkap aneka penyimpangan oleh produsen penggilingan gabah menjadi padi. Yang mencolok adalah beras oplosan, campur-aduk beras berkualitas tinggi dengan jenis yang lebih rendah namun dibandrol sebagai beras premium (kualitas terbaik).

"Ini kami sampaikan, kami mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen," ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juli 2025.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mengalami peningkatan sebesar 14 persen atau sekitar tiga juta ton lebih. Kenaikan ini membuat pasokan berada di atas kebutuhan nasional.

Namun, harga konsumen tetap naik sementara harga di tingkat petani menurun. "Seharusnya kalau (harga) di petani naik, baru bisa naik di tingkat konsumen," tambahnya.

Menemukan anomali (kondisi tidak normal) itu, lanjut Andi Amran, kementeriannya memeriksa 268 merek beras yang beredar di pasaran. Bukan periksa asal-asalan begitu saja rupanya.

"Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras, karena stok kita besar," tandasnya.

Alhasil, ditemukanlah 212 merek terindikasi melanggar aturan baik dari sisi standard kualitas, pengoplosan, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya kemasan lima kilogram (kg), isinya 4,5 kg.

"Kemudian ini 85 persen yang tidak sesuai standard, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi, ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium. Beras curah tapi dijual harga medium, dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo," terangnya.

Toh Amran menjelaskan pula 212 merek beras tadi tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari la-

bel. "Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang," ucap Amran.

Selain itu, Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Andi Amran mengungkapkan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

"Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun," jelas Amran.

Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

"Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium," tandasnya.

Menanggapi temuan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta agar soal beras ini diusut tuntas. "Jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan yang tentunya ini merugikan masyarakat," kata Titiek.

Ia mendorong Kementan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menindak tegas pelaku, baik skala kecil



maupun besar. "Kita enggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil. Harus ditindak ya kalau memang betul salah, terbukti dia ngoplos," tegasnya.

Memang, yang disebut sebagai perusahaan besar oleh Ketua Komisi IV DPR itu ada yang tersangkut urusan beras ini. Malah Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan 212 merek beras kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya pemeriksaan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri berlangsung pada 10-14 Juli 2025.

Tercatat empat perusahaan produsen dan distributor beras yaitu Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa Bareskrim terkait dugaan pelanggaran mutu dan ta-

sawit dari hulu ke hilir.

Belakangan beredar kabar Martua Sitorus sudah tidak berada di Wilmar sejak bertahun-tahun lalu. "Bapak Martua Sitorus sudah mundur dari jabatan COO Wilmar Group sejak 2013. Setelah itu, beliau tidak lagi terlibat dalam manajemen dan operasional perusahaan tersebut," ungkap manajemen Karunia Prima Nastari (KPN) Corporation yang kini menaungi bisnis Martua Sitorus.

Sedangkan PT Food Station Tjipinang Jaya dimintai keterangan terkait produk seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total 9 sampel asal Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Ja-

ras Raja" dengan berbagai jenis produk yang telah dipasarkan di seluruh Indonesia baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Beras Raja diproses dari varietas padi murni menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi hingga menghasilkan beras berkualitas serta higienis tanpa pemutih, pengawet dan pewangi.

Direktur Utama PT Belitang Panen Raya, Kelvin Winata, melalui kuasa hukumnya Titis Rachmawati, membenarkan telah diperiksa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri. "Benar sudah diperiksa, dan hingga kini belum ada hasil apapun. Kami kooperatif. Pemeriksaan lebih banyak menyangkut soal perizinan dan proses pengolahan," ujar Titis, Senin, 14 Juli 2025.

Menurut dia, PT Belitang Panen Raya tetap berkomitmen menjaga kualitas mutu dan takaran produk yang dipasarkan. Semua proses produksi telah di-



karan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan besar masih berlangsung.


"Betul. Masih dalam proses pemeriksaan," ujar Helfi, Jumat, 11 Juli 2025. Keempatnya, sambung Helfi, diperiksa berdasarkan sampel beras kemasan dari berbagai daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Satgas Pangan.

Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta. Kelompok usaha Wilmar merupakan perusahaan agribisnis global yang berdiri sejak 1991 oleh Kuok Khoo Hong dan Martua Sitorus. Anak usahanya di sektor beras adalah PT Wilmar Padi Indonesia. Cakupan bisnis Wilmar meliputi pula industri perkebunan

karta yang melekat dengan nama Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Food Station bergerak di bidang distribusi dan penjualan bahan pangan, serta menyediakan jasa pergudangan, resi gudang, pertokoan, dan pengangkutan, khususnya untuk komoditas beras.

Selanjutnya PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari tujuh sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang penggilingan padi dan diikuti dengan ekspansi penggilingan padi kedua di dekat area persawahan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan pada 2015.

PT. Belitang Panen Raya telah menghasilkan produk beras dengan brand "Be-


Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras, karena stok kita besar.

lakukan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. "Kami juga telah melakukan uji mutu sebelum produk sampai ke masyarakat, baik melalui laboratorium internal maupun eksternal yang sesuai aturan," tegasnya.

Titis menambahkan, perusahaan tetap membuka diri dan menyerahkan seluruh bukti proses produksi kepada penyidik. "Kami menghormati proses penyelidikan dan tetap kooperatif," ujarnya.

Terkait pemberitaan yang sempat menimbulkan keresahan, PT Belitang Panen Raya meminta maaf kepada masyarakat. "Kami berupaya menjaga mutu dan takaran produk. Harapan kami, distributor dan konsumen tetap memantau proses yang berjalan dan bersama menjaga kualitas pangan Indonesia," ujarnya.

Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek. PT Sentosa Utama Lestari, yang dikenal melalui merek dagang Vasham, merupakan perusahaan agrikultur terpadu yang berfokus pada pemberdayaan petani. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Japfa Group, salah satu pelaku utama di sektor agribisnis dan peternakan terpadu di Indonesia.

Dalam operasionalnya, PT Santosa Utama Lestari memiliki cakupan luas, mulai dari produksi pakan ternak, budidaya

makanan. Japfa dikenal sebagai salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di Asia yang berfokus pada penyediaan protein hewani berkualitas.

Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S, mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri. Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.

"Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses

untuk mengatasi masalah ini, lanjut Zulhas, salah satu caranya yakni lewat infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto yang meluncur pada 21 Juli 2025.

Zulhas mengungkapkan, oplosan beras ini terjadi akibat tidak adanya infrastruktur yang memadai dari pemerintah ihwal penanganan penjualan beras di pasar. "Karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana berasnya? taruh di pasarkan. Karena nggak ada infrastruktur, taruhnya di pasar. Di pasar dioplos," ujarnya di Gedung Menara Kompas, Rabu, 16



ayam, pengolahan daging ayam, hingga distribusi produk-produk berkualitas tinggi ke berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan ini menjadi bagian penting dalam ekosistem industri manufaktur pangan nasional, dengan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap protein hewani yang sehat dan terjangkau.

Sedangkan induk perusahaan Japfa adalah jaringan agribisnis dan pangan multinasional yang berkantor pusat di Singapura, dengan operasi utama di Indonesia melalui PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, termasuk produksi pakan ternak, pembibitan ayam, budidaya perikanan, peternakan sapi, dan pengolahan produk

produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku," kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu, 12 Juli 2025.

Nah, selain soal perusahaan besar tadi, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengemukakan agar temuan ini tidak hanya ditindaklanjuti oleh Mentan Amran, tetapi juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). "Tolong Menkonya juga turun tangan, jangan diam-diam saja. Supaya ini dikordinasikan, jangan sedikit-sedikit heboh ini, heboh itu. Ini rakyat jadi bingung," ujarnya.

Gayung pun bersambut. Menko Bidang Pangan Zulhas mengemukakan,

Juli 2025

Jadi, sambungnya, koperasi desa dapat menjadi solusi. "Makanya kita mau ada koperasi desa nanti kalau ada Kopdes 80 ribu desa, setiap desa ada koperasinya kan, jadi kalau ada operasi pasar (nanti) langsung kasih koperasi, nggak mungkin dioplos karena tiap desa (ada koperasi)," jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menambahkan, lewat infrastruktur ini nantinya penyaluran bakal melalui koperasi untuk menghindari kegiatan pengoplosan. "Perlu infrastruktur penduduk kita yang 280 juta ini, masa pemerintah tidak punya infrastruktur untuk menyalurkan kalau perlu operasi pasar, minyak goreng, bantuan-bantuan sosial dan lain-lain," tandasnya. ♦

RAWAN KORUPSI DI RANAH PENDIDIKAN

Ranah pendidikan begitu mulia. Namun, tetap rawan korupsi: penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Yang mencolok belakangan ini adalah dugaan korupsi pada proyek pengadaan komputer jinjing (laptop) dengan sistem operasi Chrome (Chromebook) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kejaksaan Sgung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini.

Tiga tersangka ditahan dan seorang lagi masih dicari karena berada di luar negeri. "Berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada malam hari ini menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Selasa, 15 Juli 2025.

Keempat tersangka itu, pertama, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 yang juga kuasa pengguna ang-

garan di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar, Sri Wahyuningsih (SW). Kedua, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Ristek 2020, sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan direktoratnya, Mulyatsyah (MUL)

Ketiga, Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan.. Selanjutnya tersangka keempat Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbud Ristek, Ibrahim Arief (IBAM).

Qohar yang segera beralih tugas menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari itu mengatakan pula, dua tersangka, yakni Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah, ditahan di rutan. Sementara Ibrahim menjadi tahanan kota karena memiliki sakit jantung. "IBAM penahanan kota karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ada gangguan



jantung kronis,” ujarnya.

Sedangkan Jurist Tan masih berada di luar negeri. Tercatat setidaknya sudah empat kali perempuan yang menjadi Staf Khusus Menteri saat Nadiem menjabat ini tidak memenuhi panggilan penyidik karena sudah berada di luar negeri

“Kalau tidak salah tidak berada di Indonesia sehingga ada perbedaan yurisdiksi, daerah, wilayah, negara. Maka tentu membutuhkan koordinasi yang ini sekarang sedang dibicarakan oleh penyidik,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Rabu, 18 Juni 2025.

Harli menjelaskan Jurist Tan melalui kuasa hukumnya mengaku tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena ada kegiatan pribadi. Jurist, kata dia, kemudian mengajukan agar pemeriksaan secara daring. Selain itu, Jurist juga menyerahkan keterangan tertulis di luar dari permintaan penyidik dengan harapan agar diperiksa secara daring. Akan tetapi, Harli menyebut hal itu tidak bisa dipenuhi penyidik lantaran dibutuhkan kehadiran secara langsung.

“Penyidik sesungguhnya mengharapkan bahwa yang bersangkutan ini hadir secara fisik langsung,” ujarnya. Menurut Harli, penyidik tidak menyanggupinya karena harus diperiksa secara langsung.

Alhasil hingga Juli 2025, Jurist tetap mangkir. Sebelumnya, pemeriksaan Jurist sudah terjadwal pada Selasa, 1 Juli 2025. “Nggak datang,” kata Kapuspenkum yang segera beralih tugas menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Harli juga mengemukakan penyidik tidak bisa menghubungi Jurist Tan secara langsung. Sedangkan komunikasi hanya dilakukan melalui kuasa hukumnya. Ia menegaskan bahwa penyidik Kejaksaan masih menempuh pendekatan persuasif agar Jurist Tan memenuhi panggilan.

Tak urung Jurist Tan telah ditetapkan sebagai satu dari empat tersangka “Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu ChromeOS untuk pengadaan TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) pada tahun anggaran 2020–2021,”

Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan 2019-2022 pada akhir Mei 2025. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli mengemukakan,

penyidik mendalami dugaan adanya permafakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada 2020.

Kajian itu, kata Harli, diduga diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi Chrome. “Padahal penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan seribu unit Chromebook oleh

Chrome.

Sedangkan Mendikbud Ristek 2019-2024 Nadiem Makarim sudah menjalani dua kali pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Hingga pertengahan Juli 2025 pemeriksaan Nadiem masih sebagai saksi dalam kasus pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome ini.

Nadiem Makarim telah membantah terjadi perubahan kajian. Dia menyatakan kajian pertama dan kedua memiliki tujuan yang berbeda. Menurut dia, kajian pertama bertujuan untuk penggunaan di dae-



Pustekkom Kemendikbud Ristek dan hasilnya tidak efektif,” ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem

rah 3T (Terpencil, Terdepan dan Terluar). Sementara kajian kedua ditujukan untuk penggunaan di daerah yang sudah memiliki jaringan internet yang baik.

Bagaimana kelanjutan kasus pengadaan laptop Chromebook ini? Dapat kita simak bersama-sama. Yang jelas, ranah pendidikan memang rawan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. ♦

Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa Satu Kelas TUAI KRITIK DARI BERBAGAI KALANGAN

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya kebijakan di bidang Pendidikan, yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Di antara kebijakan yang menuai pro dan kontra adalah larangan wisuda, yang dianggap menghapus momen penting bagi para siswa, kebijakan pelarangan study tour yang dinilai mengurangi pengalaman belajar di luar kelas.

Setidaknya ada tujuh (7) daftar kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memicu pro dan kontra di dunia Pendidikan. Ketujuh kebijakan tersebut adalah:

1. Wawasan Kebangsaan dan Karakter
2. Pendidikan Moral dan Spiritual
3. Larangan Piknik Study Tour

Siswa

Dan baru-baru ini, Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan di dunia Pendidikan, yang menuai pro dan kontra, yaitu kebijakan yang memperbolehkan satu kelas diisi oleh 50 siswa. Kebijakan tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan anggota dewan hingga para tokoh Pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lalu Hadrian Irfani mengkritik sejumlah kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah kebijakan yang



4. Toilet di Dalam Kelas
5. Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
6. Larangan Wisuda Semua Jenjang
7. Larangan Penggunaan Motor untuk

memperbolehkan satu kelas diisi oleh 50 siswa.

"Kalau kebijakan jangka pendek terus dilakukan, justru kesinambungan pro-

gram pendidikan kita tidak akan tercapai," kata Lalu Hadrian Irfani, dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, seperti dilansir dari Tempo, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah daerah (Pemda) berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan jangka pendek di bidang pendidikan tersebut tidak terjadi di daerah-daerah lain.

Terkait kebijakan satu kelas bisa diisi oleh 50 siswa, yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat. Lalu mengatakan, provinsi tersebut tidak termasuk ke dalam daerah khusus atau tertentu, yang mengharuskan satu kelas terdiri dari 50 siswa.

Lebih lanjut, Lalu mengatakan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi tersebut telah dikeluhkan oleh masyarakat. Sekolah swasta juga ikut dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, karena kebijakan sekolah negeri diisi 50 siswa membuat sekolah swasta menjadi kekurangan siswa.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi beralasan dengan kebijakan satu kelas 50 orang untuk jenjang SMA dan SMK, tidak akan begitu berpengaruh terhadap pembelajaran. Dirinya menilai proses belajar mengajar di tingkat atas ini tidak bisa disamakan dengan tingkat SD ataupun SMP.

"Kalau SD itu kan gurunya perlu satu-satu tuh. Kalau SMA dan SMK kan sudah beda interaksi belajarnya. Paparan, membaca, pelajari. Jadi beda," kata Dedi Mulyadi, Kamis (3/7/2025).

Sementara tentang kekhawatiran para kepala sekolah swasta akan kekurangan siswa, Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa kebijakannya tersebut diterbitkan untuk anak dari keluarga tidak mampu, yang di sekitar rumahnya jauh dari sekolah swasta.

"Artinya aturan ini untuk di daerah-daerah tertentu yang jumlah sekolahnya masih sangat terbatas, maka saya mempersilakan untuk menerima maksimal 50," tambahnya.

Selain mendapat kritik dari kalangan DPR, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang memperbolehkan satu kelas yang awalnya diisi 36 siswa menjadi 50 siswa tersebut, juga mendapat respon dari Pengamat Pendidikan, Edi Subkhan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai akan membuat guru kewalahan, pengelolaan kelas jadi repot, serta belajar menjadi tidak optimal.

"Bisa dibayangkan hanya dengan 30-an siswa saja guru sudah kewalahan,

apalagi kalau sampai 50 siswa sekelas. Pasti bukan cuma pengelolaan kelas lebih repot, melainkan proses dan hasil belajarnya tidak akan optimal," kata Edi Subkhan, Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), seperti dilansir dari NU Online, Selasa (15/7/2025).

Sementara itu, dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), juga menanggapi kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tersebut dengan kritik tajam, karena kebijakan tersebut dinilai akan berdampak serius terhadap keberlangsungan sekolah swasta dan pesantren di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, kebijakan tersebut telah menggerus jumlah pendaftar di sekolah-sekolah yang dikelola Persyarikatan, khususnya di tingkat dasar



dan menengah.

"Secara umum, bisa dikatakan kami sangat terdampak di beberapa sekolah. Jumlah siswa yang mendaftar turun signifikan," kata Sekretaris PWM Jabar, Iu Ruslana dalam keterangannya, seperti dilansir dari republika, Senin (14/7/2025).

Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini pun, merinci kondisi Pendidikan di berbagai daerah seperti Sukabumi, Depok dan Garut. Menurutnya, di salah satu SMK Muhammadiyah di Garut, dari 206 lulusan hanya 153 siswa yang mendaftar kembali. Sementara di SMK Muhammadiyah 1 Cikampek, jumlah pendaftar juga menurun dari 789 lulusan hanya 642 siswa. Meski begitu, Iu Ruslana menyatakan bahwa masih ada sekolah di Cirebon yang jumlah siswanya relatif stabil.

"Kami berharap pemerintah kalau mau ngambil kebijakan dikaji dulu mendalam. Jangan seenaknya, karena kami ini swasta yang sudah berjuang sejak zaman kemerdekaan. Bahkan Muhammadiyah sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka," tambahnya.

Tanggapan yang sama juga diungkapkan Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Barat, KH Abdurrahman. Kiai Abdurrahman mengatakan, kebijakan 50 siswa dalam satu kelas secara tidak langsung akan merugikan pesantren dan sekolah-sekolah swasta.

"Ini menambah deretan kebijakan yang tidak berpihak pada pendidikan swasta. Pesantren kehilangan hingga 70 persen calon santri, karena siswa yang sebelumnya mendaftar, justru pindah ke sekolah negeri yang menambah kuota," ungkap Kiai Abdurrahman, seperti dilansir dari inilah.com, Selasa (15/7/2025).

Kiai Abdurrahman menilai seperti ada kesan bahwa sekolah swasta dianggap sebagai 'pesaing' oleh pemerintah.

"Kami melihat pesantren dan sekolah swasta seolah dianggap musuh. Padahal, Pemprov Jabar sendiri pernah mengakui tidak bisa mencakup semua kebutuhan pendidikan tanpa peran swasta," katanya tegas.

Mereka, baik itu DPR, Tokoh Pendidikan, Muhammadiyah maupun NU mendesak agar kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan mendalam, sebelum diterapkan.

Muhammadiyah dan NU juga menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta dan pesantren dalam penyusunan kebijakan strategis di sektor pendidikan. [◆]



Presiden Prabowo Terus Ajak Investor Asing Bangun RS BAGAIMANA NASIB RS INDONESIA

Debut Health Tourism Indonesia dibuat pada Rabu, 25 Juni 2025, dengan diresmikannya Bali International Hospital (BIH) oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari peesmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Denpasar, Bali. BIH dibangun pada era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dikonsultani rumah sakit internasional ternama di dunia, Mayo Clinic Amerika Serikat.

BIH Hadir dari kegelisahan Presiden Jokowi ketika itu, karena masyarakat Indonesia berbondong-bondong berobat ke luar negeri. Yang banyak duit berobat ke Singapura, China, Amerika Serikat, dan Eropa. Yang sedang-sedang saja memilih menyerbu berbagai rumah sakit di Malaysia dan negara ASEAN lainnya.

Presiden Prabowo tak kalah gelisah. Usai dilantik dia langsung menawarkan kerjasama bidang kesehatan dengan berbagai negara. Bahkan di setiap kesempatan, dan dengan semua mitra dari berbagai negara, ia menyatakan Indonesia memberi izin berdirinya rumah sakit asing di sini.

Saat menyampaikan pidato utama di APEC CEO Summit di National Grand Theater Peru, Kamis, 14 November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan reformasi sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk membuka pintu bagi universitas dan rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia.

Pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto soal izin mendirikan rumah sakit asing di Indonesia disampaikan pada Minggu (13/7/2025) saat bertemu Dewan Uni Eropa. Tak pelak lagi. Banyak pihak yang cemas dan ketar-ketir melihat langkah Pres-

iden, yang sedemikian gencar menawarkan berdirinya rumah sakit asing di Indonesia. Tapi banyak pula yang menyambut dengan gembira.

Positifnya Lebih Banyak dari Negatifnya

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dua tahun lalu menyebut bahwa sedikitnya Rp167 triliun per tahun devisa Indonesia terbang ke luar negeri, karena masyarakat ramai-ramai berobat di negara-negara lain. Jika tersedia rumah sakit dalam negeri, yang mampu memberikan layanan sama seperti di negara-negara lain itu, tentu masyarakat Indonesia memilih berobat di sini saja. Inilah yang mendasari kebijakan Pemerintah Indonesia memberi izin rumah sakit asing buka cabang di Indonesia.

Diminta komentarnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengatur rumah sakit asing boleh beroperasi di Indonesia.

"Itu juga kan sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya, jadi yang diomongin Pak Presiden itu bukan hal yang baru," ujar Menkes usai meresmikan The First Da Vinci Xi in Indonesia di RS Siloam,

Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ia mengatakan bahwa rumah sakit di Indonesia tetap dapat bersaing dengan layanan kesehatan asing tersebut. Bahwa rumah sakit asing yang beroperasi di Indonesia bukanlah ancaman bagi layanan kesehatan nasional.

"(RS asing yang buka cabang di RI) bukan (ancaman). Saya yakin dia bisa (bersaing)," ujar Menkes Budi.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan ada plus minusnya. Namun dari uraiannya, tersirat jelas bahwa sisi positifnya jauh lebih besar. Sisi positifnya antara lain, kebijakan Presiden itu bisa menghadirkan persaingan sehat dan profesional di bidang medis.

"Dengan adanya RS asing, warga negara kita yang biasanya berobat ke luar negeri bisa berobat di RS tersebut tetapi posisinya ada di dalam negeri, sehingga ada pemasukan yang tadinya terbang ke luar negeri sekarang negara juga kebagian," katanya dikutip dari MI.

Dampak positif lainnya, menurut Irma, RS pasti terpicu untuk berbenah diri. Pasalnya jika tidak ia akan kehilangan pasien.

Apa sisi negatifnya? Menurut Irma, jika liberalisasi kebablasan sehingga jumlah RS asing di Indonesia membludak, pasti berdampak negatif kepada RS lokal.

BIH, RS Internasional Indonesia Gandeng Banyak Mitra Asing

Bali International Hospital (BIH) membuka babak baru dunia kesehatan Indonesia dengan peresmian pada 25 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikelola Pertamina Bina Medika IHC, BIH berdiri megah di atas lahan seluas 67.465 meter persegi. BIH menawarkan fasilitas modern berkapasitas 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, 38 ruang ICU, dan empat cath lab. Dirancang dengan mengutamakan kenyamanan dan martabat pasien, rumah sakit ini siap destinasi unggulan wisata medis di Asia.

BIH menggandeng sejumlah nama besar dunia kesehatan termasuk Icon Cancer Centre (bagian dari Icon Group), Innoquest dan Pathology Asia Holdings, Sapporo Cardiovascular Clinic, Hong Kong Asia Medical Group (HKAMG), hingga SingHealth. Kerja sama ini tidak hanya bertujuan memperkuat transfer keahlian dan teknologi, tetapi juga memperkaya kualitas layanan medis nasional.

"Beroperasinya BIH menjadi pertemuan standar global dengan talenta lokal. Bersama para mitra, kami yakin membangun

warisan layanan kesehatan untuk generasi masa depan," ujar Dr. Dewi Fankhuningdyah Fitriana, Direktur Utama PT Pertamedika Bali Hospital.

Icon Cancer Centre akan mulai beroperasi di BIH pada awal Mei 2025 menjadi momen bersejarah, sebab untuk pertama kalinya dokter asing diizinkan berpraktik di Indonesia melalui skema KEK Kesehatan Sanur.

"Kemitraan ini adalah redefinisi standar layanan, bukan hanya di bidang onkologi tetapi untuk seluruh spesialisasi medis," kata Dr. Noel Yeo, Chief of Commercial & Operations BIH.

BIH juga dilengkapi teknologi tercanggih dunia seperti MRI Siemens 3.0Tesla, CT Scanner 256-slice, Varian TrueBeam untuk radioterapi, dan GE Senographe Pristina Mammogram. Dengan dukungan klinis Icon, pasien Indonesia kini bisa mengakses layanan kanker terintegrasi setara rumah sakit luar negeri — tanpa perlu terbang ke luar negeri.

"Kami bangga membawa layanan kanker kelas dunia lebih dekat ke rumah pasien Indonesia," ujar Serena Wee, CEO Icon ASEAN.

Tak hanya onkologi, BIH juga mem-

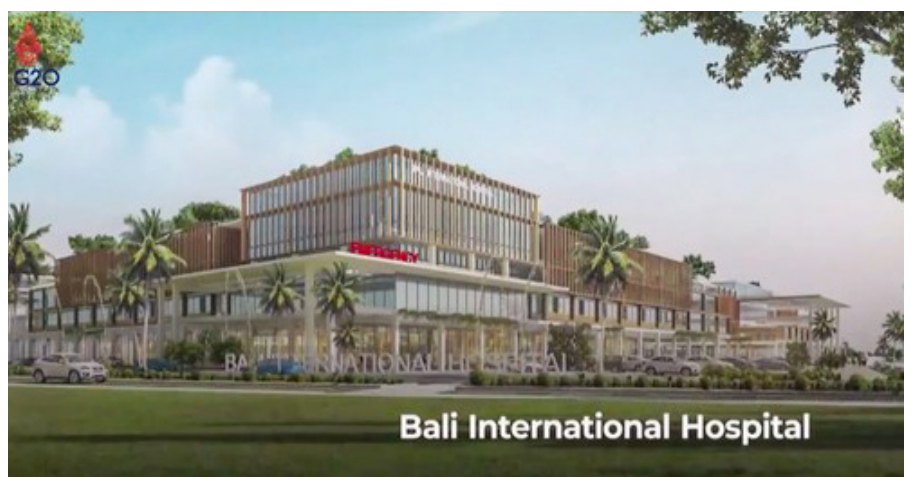
perkuat layanannya lewat mitra di bidang diagnostik dan kardiologi:

- * Innoquest dan Pathology Asia Holdings membawa laboratorium diagnostik berpresisi tinggi.
- * HKAMG dan Sapporo Cardiovascular Clinic dari Jepang memperkaya layanan kardiologi.
- * SingHealth berperan sebagai mitra akademik dalam program pendidikan berkelanjutan.

Kolaborasi internasional ini mendukung agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia: memperkuat kapasitas lokal, mempercepat inovasi, dan meningkatkan hasil kesehatan jangka panjang.

"Ini adalah momentum emas," tambah Dr. Hameni Wijaya, Chief Commercial Officer IHC. "Kami ingin membangun sistem kesehatan yang bisa dibanggakan Indonesia."

Dalam acara ini juga disampaikan apresiasi kepada Indonesia Healthcare Corporation (IHC) sebagai operator, Indonesia Investment Authority (INA) sebagai investor dana abadi negara, serta Swire Pacific sebagai mitra internasional yang berkontribusi dalam membangun infrastruktur kesehatan masa depan. ♦



RAMAI-RAMAI ASN KE JABATAN FUNGSIONAL: PELUANG ATAU RISIKO?

Meningkatnya tuntutan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpindah ke Jabatan Fungsional bukan lagi menjadi tren yang hanya sesaat, melainkan sudah menjadi arus yang tak terbendung.

Fenomena ini terjadi di semua kementerian, di mana banyak ASN yang menganggap Jabatan Fungsional sebagai jenjang karir yang lebih menjanjikan dibandingkan Jabatan Struktural.

Mengapa? Karena daya tarik tunjangan kinerja yang lebih tinggi dan kemungkinan untuk memperpanjang masa pensiun. Semakin tinggi jabatan fungsional yang diraih, semakin lama pula masa kerja yang dapat dilakukan. Hal ini merupakan tawaran yang sangat menarik, terutama bagi ASN yang sudah mendekati masa pensiun.

Kendati antusiasme, semangat ini bukannya tanpa risiko. Jika tidak ditangani dengan baik, semangat kolektif ini berpotensi menjadi gelombang pasang yang dapat merusak struktur pengembangan SDM secara keseluruhan.

Ketidakmampuan sistem untuk merespons meningkatnya minat dapat mengakibatkan ketidakadilan, kemacetan, dan bahkan konflik kepentingan di dalam birokrasi.

Kementerian Agama, sebagai salah satu institusi pemerintah dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat besar, menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait penempatan jabatan fungsional.

Hingga kini, belum ada regulasi yang jelas mengatur kedudukan, mekanisme, dan distribusi jabatan fungsional di lingkungan kementerian ini.

Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam penempatan pejabat fungsional antarsatuan kerja, di mana beberapa unit kelebihan atau kekurangan SDM sesuai kebutuhan organisasi.

Misalnya, ditemukan kasus Jabatan Fungsional Ahli Utama yang seharusnya



OLEH SUDIRMAN A. LAMADIKE

ditempatkan pada unit kerja strategis atau Unit Kerja yang dipimpin pejabat eselon 2 justru ditempatkan di unit kerja eselon III, atau posisi adanya penumpukan jabatan fungsional Arsiparis dalam satu unit kerja eselon III, padahal seharusnya disebarakan sesuai beban tugas.



Situasi ini menekankan pentingnya menyelaraskan semangat perubahan birokrasi dengan implementasi kebijakan dan perencanaan strategis SDM yang efektif.

Penempatan jabatan tidak boleh sema-

ta-mata bergantung pada keinginan ASN, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, peta kompetensi, dan tata kelola birokrasi yang kuat dan mengedepankan produktivitas.

Dengan demikian, sangat penting untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai kedudukan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agama sesegera mungkin sesuai dengan kebutuhan dan sebaran.

Dengan demikian semua unsur dapat terpenuhi, sehingga dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut dapat memenuhi tuntutan manajemen talenta, agar dapat menghilangkan duplikasi pekerjaan, dan memberikan panduan yang jelas.

Gelombang Pergeseran ASN ke jabatan-jabatan fungsional merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi yang harus disambut dengan antusias dan

kesiapan. Terlepas dari tantangan dan risiko yang mungkin timbul, peluang untuk membangun birokrasi yang lebih mudah beradaptasi, profesional, dan berorientasi pada kinerja tetap tersedia.

Dengan standar yang jelas, sistem manajemen sumber daya manusia yang kuat, dan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan tujuan organisasi, perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Harapan ke depan, para pemangku kepentingan di Kementerian Agama akan dapat menciptakan kebijakan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Semangat perubahan harus terus dijaga dengan tetap memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terencana dengan baik dan diarahkan pada tujuan jangka panjang.

Dengan demikian, perpindahan ASN ke jabatan fungsional tidak hanya sebagai respon terhadap dinamika karier ASN, tetapi juga merupakan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi yang kontemporer, efisien, dan berdaya saing tinggi. ♦kemenag.go.id



**IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000**



**IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000**



**IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000**

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



**IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000**



CONTACT PERSON: NIKEN

**021 - 791 96 781
0896 4369 4121**

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

HARGA RP. 125.000,-



PRABOWO CIUM HAJAR ASWAD

**INSYA ALLAH URUSAN
KUOTA HAJI MAKIN NAMBAH**

PENGALAMAN
LIMBAD
SAAT
UMRAH

SIAPA
PEDULI
PENCATATAN
NIKAH

DITSEN
BUKAN
SEKADAR
ANGKA

BUKA
PINTU
RUMAH SAKIT
ASING